

20
25

Laporan Tahunan The PRAKARSA
The PRAKARSA Annual Report



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Menavigasi Transisi Memperluas Kontribusi

The **PRAKARSA**





P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Menavigasi Transisi **Memperluas Kontribusi**





TENTANG LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan The PRAKARSA Tahun 2025 menyajikan gambaran mengenai profil, kinerja, capaian program dan advokasi, produk pengetahuan, serta penguatan kelembagaan sepanjang tahun 2025. Laporan ini juga memuat kontribusi The PRAKARSA dalam mendorong kebijakan publik berbasis bukti di bidang kebijakan sosial, ekonomi dan fiskal, serta pembangunan berkelanjutan. Selain merekam capaian dan dampak, laporan ini menggambarkan pembelajaran, tantangan, dan arah strategis The PRAKARSA dalam memasuki periode Renstra 2026–2030.

ANNUAL REPORT OVERVIEW

The PRAKARSA Annual Report 2025 presents an overview of the organization's profile, performance, program and advocacy achievements, knowledge products, and institutional strengthening throughout 2025. It highlights The PRAKARSA's contribution to evidence-based public policy in the areas of social policy, economic and fiscal policy, and sustainable development. Beyond reporting achievements and impact, the report reflects on key lessons, challenges, and the organization's strategic direction toward the 2026–2030 Strategic Plan.

20
25

Laporan Tahunan The PRAKARSA
The PRAKARSA Annual Report

 **PRAKARSA**
Welfare Initiative for Better Societies

Menavigasi Transisi Memperluas Kontribusi

The PRAKARSA





Sanggahan

Laporan Tahunan The PRAKARSA 2025 menyajikan program, kegiatan, capaian, dan kinerja organisasi selama tahun 2025. Istilah “The PRAKARSA” atau “Organisasi” merujuk pada Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif.

Laporan ini juga memuat arah, strategi, dan rencana ke depan yang dapat berubah sesuai dinamika eksternal. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai jaminan atas pencapaian target atau proyeksi.

Publikasi ini disusun untuk kepentingan informasi, transparansi, dan pertanggungjawaban publik. Penggunaan atau reproduksi materi laporan memerlukan persetujuan tertulis dari The PRAKARSA.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat The PRAKARSA, Jl. Rawa Bambu I No.9A, Jakarta Selatan 12520, Indonesia. Telepon: (+62 21) 7811798, Email: info@theprakarsa.org

Versi digital tersedia di www.theprakarsa.org

Disclaimer

The The PRAKARSA Annual Report 2025 presents the organization’s programs, activities, achievements, and performance throughout 2025. The terms “The PRAKARSA” or “Organization” refer to Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif.

This report also outlines future directions, strategies, and plans, which may change in response to external developments and should not be interpreted as guarantees of future targets or projections.

The publication is intended for information, transparency, and public accountability purposes. Reproduction or reuse of its contents requires prior written permission from The PRAKARSA.

For further information, please contact The PRAKARSA Sekretariat, Jl. Rawa Bambu I No.9A, South Jakarta 12520, Indonesia. Telephone:(+6221)7811798,Email:info@theprakarsa.org

The digital version is available at www.theprakarsa.org



Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Selamat datang di laporan tahunan 2025 The PRAKARSA.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi bagi The PRAKARSA. Di tingkat global, kecenderungan sebagian negara Global North yang semakin *inward looking*, skeptisisme terhadap agenda keadilan iklim, dan menguatnya tekanan terhadap redistribusi kekayaan global menciptakan tantangan baru bagi ruang sipil, advokasi keadilan sosial, dan keberlanjutan pendanaan. Di tingkat nasional, implementasi RPJMN 2025–2029, dinamika resentralisasi, dan perubahan lanskap pemerintahan membawa risiko dan peluang bagi organisasi riset dan advokasi kebijakan.

Di tengah kondisi tersebut, The PRAKARSA berupaya menjaga kesinambungan mandat kelembagaan yakni memperkuat kebijakan sosial, mendorong reformasi fiskal yang berkeadilan, serta mengawal agenda pembangunan berkelanjutan. Pada 2025, kami tetap aktif dalam formulasi kebijakan jaminan sosial, advokasi kemiskinan multidimensi, perluasan isu pekerja informal dan ekonomi digital, penguatan agenda UN Tax Convention, promosi pajak yang lebih progresif, keuangan berkelanjutan, transisi energi berkeadilan, pengembangan ekonomi hijau, dan penguatan kebijakan industri hijau.

Laporan ini juga menandai penutupan Renstra 2021–2025 sekaligus masa konsolidasi menuju Renstra baru 2026–2030. Karena itu, tema 2025 disusun sebagai kelanjutan dari tema-tema sebelumnya: 2023 menekankan resiliensi organisasi, 2024 menekankan pemanfaatan dampak bagi kebijakan inklusif, dan 2025 menekankan kemampuan menavigasi transisi sambil mempertahankan kontribusi yang telah dibangun. Tema “Menavigasi Transisi, Mempertahankan Kontribusi” dipilih untuk menegaskan bahwa dampak organisasi tidak cukup hanya diciptakan, dampak perlu dijaga, diterjemahkan ulang, diposisikan ulang,

Welcome to The PRAKARSA's 2025 Annual Report.

2025 was a year of transition for The PRAKARSA. Globally, the growing inward turn among a number of Global North countries, rising scepticism towards the climate justice agenda, and mounting pressure on global wealth redistribution created new challenges for civic space, social justice advocacy, and funding sustainability. Nationally, the rollout of the National Medium–Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029, recentralisation dynamics, and a shifting governance landscape brought both risks and opportunities for policy research and advocacy organisations.

Against this backdrop, The PRAKARSA worked to sustain its institutional mandate: strengthening social policy, advancing equitable fiscal reform, and championing the sustainable development agenda. In 2025 we remained actively engaged in social security policy formulation, multidimensional poverty advocacy, the expanding agenda on informal workers and the digital economy, the push for a UN Tax Convention, the promotion of more progressive taxation, sustainable finance, just energy transition, green economy development, and stronger green industrial policy.

This report also marks the closing of the 2021–2025 Strategic Plan and a period of consolidation towards the new 2026–2030 Strategic Plan. The 2025 theme is therefore framed as a continuation of those that came before it: 2023 emphasised organisational resilience, 2024 emphasised translating impact into inclusive policy, and 2025 emphasises the ability to navigate transition while broadening contribution. The theme “Navigating Transition, Broadening Contribution” was chosen to underscore that organisational impact is not simply created once, it must be protected, reinterpreted, repositioned, and expanded amid

dan diperluas di tengah perubahan konteks kebijakan, pendanaan, teknologi, serta jejaring.

Laporan ini juga menyajikan perubahan apa yang mulai terlihat: isu apa yang naik ke ruang kebijakan, aktor mana yang mulai menggunakan produk pengetahuan The PRAKARSA, jejaring apa yang menguat, dan fondasi apa yang semakin kokoh untuk menopang fase berikutnya.

Sepanjang tahun 2025, The PRAKARSA juga memperkuat fondasi internal organisasi melalui penyegaran struktur dan sumber daya manusia, peningkatan kualifikasi staf, pengembangan program magang, perbaikan tata kelola proyek dan komunikasi internal, serta pengelolaan keuangan yang semakin tertib. Dari sisi pendanaan, organisasi berhasil mempertahankan hubungan dengan donor eksisting, membuka kemitraan baru seperti Open Society Foundation (OSF) dan Climate and Land Use Alliance (CLUA), serta meningkatkan dana cadangan kelembagaan, termasuk melalui transisi kepemimpinan yang berlangsung tertib pada akhir tahun dan menjadi bagian penting dari penyiapan arah organisasi untuk periode 2026–2030.

Momentum penting lainnya dalam tahun 2025 adalah transisi kepemimpinan organisasi. Mulai 1 November 2025, Victoria Fanggidae menjalankan mandat sebagai Direktur Eksekutif The PRAKARSA untuk periode 2025–2030, menggantikan Ah Maftuchan yang kemudian melanjutkan kontribusinya sebagai Peneliti Senior. Peralihan ini menandai keberhasilan organisasi menjaga kesinambungan arah strategis, dan regenerasi kepemimpinan pada saat bersamaan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, laporan tahunan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai konteks 2025, struktur organisasi, capaian programatik, pendanaan dan kinerja keuangan, pembelajaran organisasi, serta rencana dan inisiatif untuk tahun 2026.

shifting policy, funding, technology, and network contexts.

This report also sets out the changes that are beginning to show: which issues have risen onto the policy agenda, which actors have begun to use PRAKARSA's knowledge products, which networks have grown stronger, and which foundations have become more solid in support of the next phase.

Throughout 2025, The PRAKARSA also strengthened its internal foundations through the renewal of its structure and human resources, upgrading staff qualifications, developing the internship programme, improving project governance and internal communications, and tightening financial management. On the funding side, the organisation maintained relationships with existing donors, opened new partnerships including with the Open Society Foundations (OSF) and the Climate and Land Use Alliance (CLUA), and grew its institutional reserves including through a leadership transition that proceeded in an orderly manner at the end of the year and became an important part of setting the organisation's direction for 2026–2030.

Another defining moment in 2025 was the organisation's leadership transition. Effective 1 November 2025, Victoria Fanggidae assumed the mandate of Executive Director of The PRAKARSA for the 2025–2030 period, succeeding Ah Maftuchan, who has since continued his contribution as a Senior Researcher. This handover reflects the organisation's success in preserving strategic continuity while renewing its leadership at the same time.

As part of our commitment to transparency and public accountability, this annual report presents a comprehensive picture of the 2025 context, our organisational structure, programmatic achievements, funding and financial performance, organisational learning, and our plans and initiatives for 2026.



Daftar Isi

Table of Content



Ringkasan Eksekutif

Executive Summary

Daftar Isi

Table of Content

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

Kata Pengantar Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Foreword from the Executive Director



HIGHLIGHTS DAN PENCAPAIAN

Highlights and Achievements

Highlight Pencapaian Dampak Lembaga

Institutional Impact Highlights



TRANSISI KEPEMIMPINAN

Leadership Transition

Transisi Kepemimpinan dan Kesinambungan Strategis

Leadership Transition and Strategic
Continuity

01

PENDAHULUAN

Introduction



24

Sejarah The PRAKARSA

History of The PRAKARSA

25

Sekilas The PRAKARSA

About The PRAKARSA

27

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami

Our Vision, Mission and Values

29

Budaya Organisasi

Organisation Culture

30

Tinjauan Dinamika Internal dan Eksternal

Review of Internal and External Dynamics

33

Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organization and Human Resources

37

Profil Badan Pengurus Harian

Executive Management Profiles

38

Badan Pengurus

Board Of Governors

53

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development

54

Kesejahteraan Staf

Staff Wellbeing

59

Kesetaraan Gender, Keberagaman, dan Inklusi

Gender Equality, Diversity and Inclusion

60



02

21

JEJAK LANGKAH

Our Journey



62

Capaian Kerja-Kerja

Programmatic Achievements

63

Media Engagement

Media Engagement

85

Unit Usaha dan Layanan Pengetahuan

Business Unit and Capacity Development
Services

92

Kolaborasi Multipihak

Multi-Stakeholder Collaboration

100



REFLEKSI 2025

2025 Reflection



104

Refleksi di Tahun 2025

Reflection on 2025

105

Pembelajaran

Lessons Learned

107



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Transparency and Accountability



112

Ringkasan Kinerja Keuangan The PRAKARSA

Summary of The PRAKARSA's Financial
Performance

113

Hasil Audit Tahun 2025

Audit Result for 2025

114

Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak

Compliance with Tax Regulations

120



RENCANA DAN INISATIF TAHUN 2026

Plans and Initiatives for 2026



122

Rencana dan Inisiatif The PRAKARSA di Tahun 2026

The PRAKARSA's Plans and Initiatives for
2026

123



06 PENUTUP

Closing



126

Ringkasan Pencapaian Utama Tahun 2025

Summary of Key Achievements in 2025

127

Strategi Keberlanjutan

Sustainability Strategy

128

Ungkapan Terima Kasih

Acknowledgements

129

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



2022 Thriving in Challenging Times

Memasuki fase pemulihan pasca pandemi, 2022 menjadi momentum bagi The PRAKARSA untuk bangkit dan bergerak menuju transformasi organisasi 2021-2025. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas sebagai lembaga riset berstandar global, meski dalam situasi penuh tantangan. Keterlibatan Indonesia dalam Presidensi G20, termasuk Civil 20, memberi peluang bagi The PRAKARSA untuk memperkuat kepemimpinan dan posisi di level global. Laporan tahun ini disusun dengan pendekatan outcome harvesting, mencerminkan capaian kerja, sumber daya, dan akuntabilitas organisasi sebagai wujud peningkatan kepercayaan publik.

As the world entered a post-pandemic recovery phase, 2022 became a momentum for The PRAKARSA to rise and progress toward its organizational transformation for 2021-2025. The focus was directed toward strengthening its capacity as a global, even in difficult circumstances Indonesia's G20 Presidency, including Civil 20, offered The PRAKARSA an opportunity to reinforce its leadership and visibility at the global level. This year's report was prepared using an outcome harvesting approach, reflecting work achievements, human resources, and organizational accountability as a way of strengthening public trust in The PRAKARSA.



2023 A Journey of Resilient Growth

Tahun 2023 diwarnai krisis geopolitik, inflasi global, dan ancaman iklim. The PRAKARSA tangguh memperluas peran nasional melalui advokasi RPJP dan RPJMN, serta regional lewat keterlibatan keketuaan ASEAN. Fokus advokasi jaminan sosial pekerja migran, bisnis inklusif, pembangunan berkelanjutan. Tema *A Journey of Resilient Growth* menegaskan pertumbuhan organisasi tidak instan, melainkan proses berkelanjutan. Di tengah kesulitan, The PRAKARSA bergerak maju memperkuat komitmen. Laporan ini mencerminkan capaian dan akuntabilitas organisasi sebagai kontribusi masyarakat, bangsa, dan komunitas global.

The year 2023 was marked by geopolitical crises, global inflation, and climate threats. The PRAKARSA remained resilient, expanding its national role through advocacy for RPJP and RPJMN, and regional engagement in ASEAN chairmanship. Advocacy focused on migrant workers' social protection, inclusive business, and sustainable development. The theme *A Journey of Resilient Growth* affirms that organizational growth is not instant but a continuous process. Amid challenges, The PRAKARSA moved forward, strengthening its commitment. This report reflects the organization's achievements and accountability as contributions to society, the nation, and the global community.



2024 20 Years Forward: from Resilience to Impact

Tahun 2024 menjadi momen istimewa bagi The PRAKARSA, menandai dua dekade perjuangan organisasi mendorong kebijakan adil, demokratis, makmur, dan berkelanjutan. Setelah fase *resilience* saat pandemi, *thriving* pasca pandemi, serta resilient growth di tengah dinamika global, The PRAKARSA kini memasuki usia kedewasaan. Dua puluh tahun adalah tonggak penting, fase ketika kedewasaan bertransformasi menjadi keberanian menghasilkan dampak nyata. Laporan tahunan ini menegaskan orientasi pada *policy impact* berkelanjutan di tingkat nasional, regional, dan global, merefleksikan perjalanan panjang dari ketahanan menuju kontribusi nyata berdampak luas.

The year 2024 is a special milestone for The PRAKARSA, marking two decades of advancing just, democratic, prosperous, and sustainable policies. After resilience during the pandemic, thriving in post-pandemic challenges, and resilient growth amid global dynamics, The PRAKARSA enters organizational maturity. Twenty years is a crucial turning point, where maturity transforms into courage to deliver real impact. This annual report affirms The PRAKARSA's orientation toward sustainable policy impact at national, regional, and global levels, reflecting its journey from resilience to meaningful, broader contributions.



2025 Menavigasi Transisi, Memperluas Kontribusi

Navigating Transitions, Expanding Contributions

Tahun 2025 menandai langkah PRAKARSA di dekade ketiganya, di tengah berbagai transisi. Pemerintahan baru menjalankan RPJMN 2025–2029 dengan perubahan kebijakan fiskal, efisiensi anggaran, dan program prioritas. Secara global, fragmentasi geopolitik dan perubahan pendanaan menguji ketahanan masyarakat sipil, sementara transisi energi dan krisis iklim menuntut kebijakan adil bagi kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, tema Menavigasi Transisi, Memperluas Kontribusi mencerminkan komitmen The PRAKARSA memperkuat advokasi keadilan fiskal, perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola demokratis.

The year 2025 marked PRAKARSA's step into its third decade amid major transitions. The new government implemented the 2025–2029 RPJMN, alongside shifts in fiscal policy, budget efficiency, and priority programmes. Globally, geopolitical fragmentation and changing development financing tested civil society resilience, while the energy transition and climate crisis called for fair policies for vulnerable groups. In this context, Navigating Transitions, Expanding Contributions reflects The PRAKARSA's commitment to strengthening advocacy for fiscal justice, social protection, sustainable development, and democratic governance.



Kata Pengantar Direktur Eksekutif The PRAKARSA Foreword from the Executive Director



**Victoria
Fanggida, Ph.D**

Executive Director of
The PRAKARSA

“

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan The PRAKARSA Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan transparansi, akuntabilitas, serta refleksi atas berbagai upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun dalam mendorong kebijakan publik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

We thank God Almighty for the completion of The PRAKARSA Annual Report 2025. This report shows our commitment to transparency, accountability, and reflection on the work undertaken over the past year to advance public policy that is inclusive, just, and sustainable.

Tahun 2025 ditandai oleh berbagai krisis, dari tekanan geopolitik, kelesuan ekonomi global dan ancaman perang. Begitu pula tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi domestik yang mengikutinya. Dalam konteks tersebut, kami konsisten bekerja melalui riset berbasis bukti, advokasi kebijakan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong agar Indonesia tetap konsisten mengupayakan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkeadilan. Transisi juga bagi kami merupakan proses yang dimaknai dalam konteks internal organisasi, di mana pada tahun ini terjadi transisi kepemimpinan.

Melalui semua itu, The PRAKARSA terus berupaya menjawab berbagai tantangan tersebut. Laporan ini merangkum capaian, pembelajaran, serta dampak dari berbagai program dan inisiatif yang telah kami jalankan ditahun 2025. Dalam konteks inilah, laporan tahunan The PRAKARSA tahun ini kami hadirkan dengan tajuk **Menavigasi Transisi, Memperluas Kontribusi**.

2025 was marked by multiple crises: geopolitical pressure, a sluggish global economy, and the threat of war, alongside the domestic economic uncertainty that followed. In that context, we worked consistently through evidence-based research, policy advocacy, and stronger collaboration with a wide range of stakeholders to ensure Indonesia stays the course towards a greener, more inclusive, and more equitable economy. Transition, for us, is also a process that plays out internally: this was the year our own leadership changed hands.

Through all of this, The PRAKARSA has continued to respond to the challenges before us. This report summarises the achievements, lessons, and impact of the programmes and initiatives we carried out in 2025. It is in this spirit that we present this year's annual report under the title **Navigating Transition, Broadening Contribution**.



Keberhasilan yang telah kami capai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk mitra kerja, donor, pemerintah, masyarakat sipil, serta seluruh tim yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin.

Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai lembaga riset dan advokasi yang independen dan kredibel, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berdampak bagi pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan The PRAKARSA Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan kontribusi kami, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

What we have achieved would not have been possible without the support of many parties, our partners, donors, government counterparts, civil society, and the entire team whose dedication carried this work forward. To all of them we extend our deepest appreciation and thanks for the trust and cooperation we have shared.

Looking ahead, we are committed to strengthening our role as an independent and credible research and advocacy institution, and to producing policy recommendations that are relevant and consequential for more inclusive development in Indonesia.

We recognise that this report has its limitations. We therefore welcome constructive criticism and suggestions to help us improve in the years to come.

Finally, we hope that The PRAKARSA Annual Report 2025 offers a clear picture of our performance and contribution, and serves as a useful reference for all our stakeholders.

Jakarta, Juli 2026

Jakarta, July 2026

Victoria Fanggida, Ph.D

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Executive Director, The PRAKARSA

Menavigasi Transisi, Memperluas Kontribusi melalui Riset dan Advokasi Kebijakan

*Navigating Transition, Expanding Contribution
through Research and Policy Advocacy*



Highlight dan Pencapaian

Sepanjang 2025, The PRAKARSA memperluas dampak melalui penguatan advokasi berbasis bukti, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, perluasan jejaring dan legitimasi, serta penguatan fondasi kelembagaan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat nasional, regional, maupun global.

Throughout 2025, The PRAKARSA expanded its impact by strengthening evidence-based advocacy, enhancing stakeholder capacity, broadening networks and legitimacy, and reinforcing its institutional foundation to advance more inclusive, equitable, and sustainable policy change at the national, regional, and global levels.

Highlights and Achievements



Highlight Pencapaian Dampak Lembaga Institutional Impact Highlights

Perubahan pada agenda dan diskursus kebijakan

Pada ranah kebijakan sosial, penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi dalam forum Bappenas, BPS, dan DKI Jakarta memperlihatkan bahwa pendekatan pengukuran kemiskinan yang selama ini diperjuangkan The PRAKARSA mulai memperoleh legitimasi sebagai benchmark pelengkap bagi ukuran kemiskinan moneter. Pada isu jaminan sosial, keterlibatan dalam revisi UU SJSN, *tripartite dialogue*, dan forum-forum reformasi pensiun menunjukkan bahwa rekomendasi organisasi semakin masuk ke ruang perumusan kebijakan formal.

Pada isu fiskal dan perpajakan, outcome yang paling menonjol adalah menguatnya penerimaan bahwa keadilan pajak tidak dapat dibatasi pada diskursus domestik. Inisiasi jaringan think tank regional seperti CAPTAIN (Coalition of Asia Pacific Tax Analysis and Initiative Network) dan pengawalan UN Tax Convention menunjukkan bahwa The PRAKARSA berhasil memperluas skala advokasi dari nasional ke regional dan global. Pada isu pembangunan berkelanjutan, organisasi ikut menggeser cara pandang terhadap hilirisasi, nikel, dan industri hijau: dari sekadar agenda pertumbuhan dan investasi menjadi agenda yang juga harus mempertimbangkan pembiayaan, HAM, lingkungan, dan kualitas pekerjaan.

Perubahan pada kapasitas dan perilaku pemangku kepentingan

Pencapaian penting lainnya adalah meningkatnya kapasitas aktor-aktor di luar organisasi untuk menggunakan pengetahuan kebijakan secara lebih operasional. Program CONCEIVE bagi BPS, pelatihan policy brief untuk pekerja sosial Kemensos, pelatihan

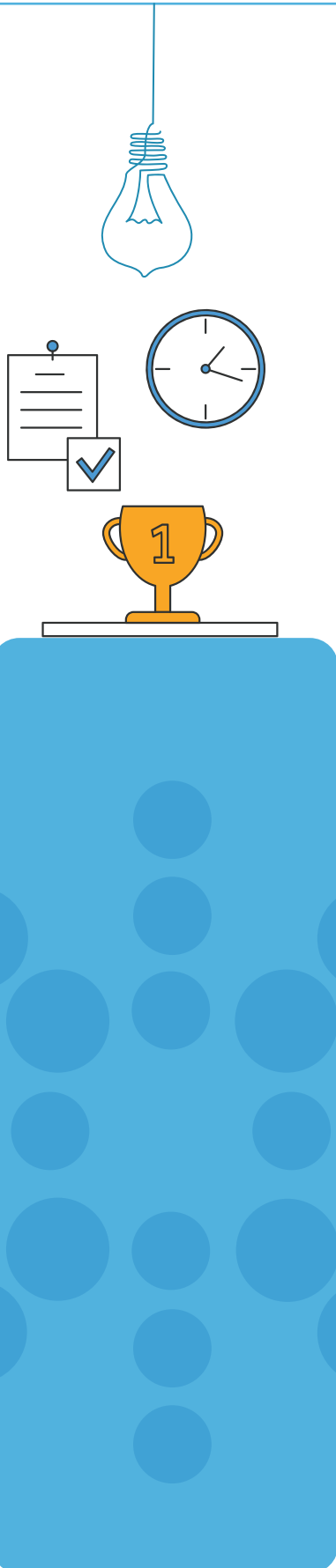
Shifts in the policy agenda and discourse

In social policy, the use of the Multidimensional Poverty Index in forums convened by Bappenas, Statistics Indonesia (BPS), and the Jakarta provincial government shows that the approach to poverty measurement that The PRAKARSA has long championed is beginning to gain legitimacy as a complementary benchmark to monetary poverty measures. On social security, our involvement in the revision of the National Social Security System Law (UU SJSN), in tripartite dialogue, and in pension reform forums indicates that the organisation's recommendations are increasingly entering formal policy-making spaces.

On fiscal and tax issues, the most striking outcome is the growing acceptance that tax justice cannot be confined to domestic discourse. Initiating a regional think tank network, the Coalition of Asia Pacific Tax Analysis and Initiative Network (CAPTAIN), and monitoring the UN Tax Convention process demonstrate that The PRAKARSA has successfully scaled its advocacy from the national to the regional and global levels. On sustainable development, the organisation has helped shift how downstreaming, nickel, and green industry are understood: from a purely growth-and-investment agenda to one that must also account for financing, human rights, the environment, and job quality.

Changes in stakeholder capacity and behaviour

Another important achievement is the increased capacity of actors outside the organisation to use policy knowledge in more operational ways. The CONCEIVE programme for BPS, policy brief training for social workers at the Ministry of Social Affairs,



bersama YFAS bagi serikat buruh dan pengemudi daring, pelatihan advokasi kebijakan bagi staf lokal kedutaan negara asing, serta berbagai *capacity building* perpajakan dan keuangan menunjukkan bahwa The PRAKARSA tidak hanya memproduksi pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memperluas kapasitas epistemik para pengguna kebijakan.

Dengan kata lain, hasil kerja organisasi mulai berpindah dari model 'knowledge dissemination' ke model 'capability transfer'. Ini penting karena perubahan kebijakan yang berkelanjutan tidak cukup ditopang oleh satu lembaga think tank; ia membutuhkan ekosistem aktor yang mampu menerjemahkan data, menulis argumen kebijakan, dan melakukan advokasi berbasis bukti di ranah masing-masing.

Perubahan pada jejaring, legitimasi, dan positioning organisasi

Sepanjang 2025, The PRAKARSA memperkuat *positioning* sebagai think and do tank yang tidak hanya kredibel secara metodologis, tetapi juga lincah dalam engagement. Hal ini tercermin dari keterlibatan dalam forum BRICS Civil Council, C20, OECD *accession monitoring*, UNRBHR Forum, kolaborasi multipihak nasional, serta pengakuan melalui sertifikasi Equivalency

joint training with YFAS for trade unions and online drivers, policy advocacy training for local staff at Australian embassies, and a range of capacity-building work on taxation and finance all show that The PRAKARSA does not produce knowledge solely for itself, but also expands the epistemic capacity of policy users.

In other words, the organisation's work is beginning to shift from a "knowledge dissemination" model to a "capability transfer" model. This matters because durable policy change cannot rest on a single think tank; it requires an ecosystem of actors able to interpret data, construct policy arguments, and conduct evidence-based advocacy within their own domains.

Changes in networks, legitimacy, and organisational positioning

Over the course of 2025, The PRAKARSA strengthened its positioning as a think-and-do tank that is not only methodologically credible but also agile in engagement. This is reflected in our participation in the BRICS Civil Council, C20, OECD accession, and the UN Forum on Business and Human Rights; in national multi-stakeholder collaborations; and in recognition through Equivalency



Determination dari NGOsource. Rekognisi tersebut memperluas daya jangkauan organisasi, meningkatkan kepercayaan mitra, dan membuka peluang kolaborasi lintas batas yang lebih substantif.

Di saat yang sama, penguatan komunikasi publik melalui opini, podcast, infografis, dan pertumbuhan kanal profesional seperti LinkedIn memperlihatkan bahwa positioning organisasi semakin kuat sebagai rujukan kebijakan. Outcome ini penting karena memperbesar peluang agar produk pengetahuan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan hidup di ruang publik dan ruang pengambilan keputusan.

Perubahan pada fondasi kelembagaan

Tahun 2025 juga menghasilkan outcome kelembagaan yang signifikan. Transisi kepemimpinan berlangsung tanpa memutuskan kesinambungan agenda, komposisi SDM diperbarui, kapasitas internal diperkuat, dan ruang fiskal organisasi membaik melalui pertumbuhan dana cadangan. Pada saat yang sama, organisasi mulai mempersiapkan fase life after BUILD Program, pembentukan entitas PT untuk unit usaha, dan penyusunan Renstra 2026-2030.

Bagi organisasi riset kebijakan, outcome kelembagaan seperti ini sama pentingnya dengan outcome programatik. Kualitas advokasi jangka panjang sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas tim, kesehatan fiskal, dan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan konteks.

Determination certification from NGOsource. Such recognition extends the organisation's reach, builds partner confidence, and opens up more substantive opportunities for cross-border collaboration.

At the same time, stronger public communication through op-eds, podcasts, and infographics, together with growth on professional channels such as LinkedIn, shows that the organisation is increasingly established as a policy reference point. This outcome matters because it increases the likelihood that knowledge products do not end their lives as documents, but live on in public debate and in decision-making spaces.

Changes in institutional foundations

2025 also produced significant institutional outcomes. The leadership transition took place without interrupting agenda continuity, the staff composition was renewed, internal capacity was strengthened, and the organisation's fiscal space improved through growth in reserves. At the same time, the organisation began preparing for the "life after BUILD" phase, the establishment of a limited liability company (PT) for its business unit, and the drafting of the 2026-2030 Strategic Plan.

For a policy research organisation, institutional outcomes of this kind matter as much as programmatic ones. The quality of long-term advocacy is determined in large part by the quality of governance, the capacity of the team, fiscal health, and the organisation's ability to adapt to a changing context.





Transisi Kepemimpinan

Leadership Transition

The PRAKARSA berkomitmen untuk terus memperkuat peran riset dan advokasi berbasis bukti, memperluas kapasitas dan jejaring pemangku kepentingan, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan melalui kolaborasi di tingkat nasional, regional, maupun global.

The PRAKARSA is committed to strengthening evidence-based research and policy advocacy, expanding the capacity and networks of stakeholders, and advancing more inclusive, equitable, and sustainable policies through collaboration at the national, regional, and global levels.

Transisi Kepemimpinan dan Kesenambungan Strategis Leadership Transition and Strategic Continuity



Salah satu tonggak kelembagaan paling penting pada 2025 adalah pergantian kepemimpinan The PRAKARSA. Pada 31 Oktober 2025, organisasi secara resmi mengumumkan penunjukan Victoria Faggidae sebagai Direktur Eksekutif untuk periode 2025-2030, efektif mulai 1 November 2025, menggantikan Ah Maftuchan yang telah memimpin lembaga selama satu dekade sejak 2015. Transisi ini tidak hanya menandai pergantian figur, tetapi juga menunjukkan kapasitas organisasi dalam melakukan regenerasi kepemimpinan secara tertib, kredibel, dan terencana.

Makna strategis dari peralihan ini terletak pada terjaganya kesinambungan pengetahuan dan arah advokasi. Ah Maftuchan tetap melanjutkan

One of the most significant institutional milestones of 2025 was the succession in The PRAKARSA's leadership. On 31 October 2025, the organisation formally announced the appointment of Victoria Faggidae as the Executive Director for the 2025-2030 period, effective 1 November 2025, succeeding Ah Maftuchan, who had led the institution for a decade. This transition marks more than a change of figurehead; it demonstrates the organisation's capacity to renew its leadership in an orderly, credible, and planned way.

The strategic significance of the handover lies in the continuity of knowledge and advocacy direction it preserves. Ah Maftuchan continues to contribute



kontribusinya sebagai Peneliti Senior, sehingga akumulasi pengalaman, memori institusional, dan warisan advokasi yang telah dibangun tidak terputus. Di sisi lain, penunjukan Victoria memberi sinyal pembaruan kepemimpinan yang bertumpu pada figur internal yang telah lama memahami kerja-kerja organisasi, pernah memegang peran sebagai Manajer Program dan Riset, dan sejak 2021 menjabat Deputy Direktur. Kombinasi antara kesinambungan dan pembaruan ini penting bagi lembaga think tank yang bergerak dalam lanskap kebijakan yang dinamis.

Pergantian kepemimpinan ini dapat dibaca sebagai capaian kelembagaan tersendiri. Proses suksesi berjalan dengan menjaga kepercayaan internal dan eksternal, sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan fokus organisasi ke depan: penguatan SDM, fundraising, strategi advokasi, serta konsistensi posisi dan visibilitas kelembagaan di tengah perubahan lanskap kebijakan dan mitra. Dengan kata lain, transisi kepemimpinan pada 2025 bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan bagian dari penguatan institusi untuk memastikan bahwa agenda riset, advokasi, dan pembangunan pengetahuan The PRAKARSA tetap berlanjut, makin solid, dan makin berdampak pada periode Renstra 2026-2030.

as a Senior Researcher, so that the accumulated experience, institutional memory, and advocacy legacy built over the years remain intact. At the same time, Victoria's appointment signals a leadership renewal grounded in an internal figure who has long understood the organisation's work, having previously served as Programme and Research Manager and, since 2021, as Deputy Director. This combination of continuity and renewal is important for a think tank operating in a dynamic policy landscape.

The leadership change can be read as an institutional achievement in its own right. The succession process preserved both internal and external confidence, while also serving as a moment to sharpen the organisation's forward focus: strengthening human resources, fundraising, and advocacy strategy, and maintaining consistency of position and institutional visibility amid a shifting policy and partnership landscape. In short, the 2025 leadership transition was not a ceremonial event but part of an institutional strengthening effort to ensure that The PRAKARSA's research, advocacy, and knowledge-building agenda continues, grows more solid, and becomes more impactful in the 2026-2030 Strategic Plan period.



Pendahuluan

Introduction

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi.

The organisation and its staff are committed to carrying out work, making decisions, establishing policies fairly, and prioritising efforts to enhance the welfare of all employees.

Sejarah The PRAKARSA

History of The PRAKARSA

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan non-profit dan non-pemerintah, dengan bentuk legal perkumpulan, yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004 di Jakarta melalui Akta Notaris Publik Nurul Larasati, SH Nomor 03 Tanggal 31 Agustus 2004 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005. Nama resmi The PRAKARSA adalah "Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif" atau *"Initiative for Welfare State and Alternative Development"* yang disingkat dengan The PRAKARSA.

The PRAKARSA memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan

The PRAKARSA is a non-profit, non-governmental policy research and advocacy institution, legally constituted as an association (Perkumpulan), founded in 31 August 2004 in Jakarta through Notarial Deed No. 03 of Notary Nurul Larasati, S.H., dated 31 August 2004, and ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-21. HT.01.03.TH.2005. The organisation's formal name is "Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif", the Initiative for Welfare State and Alternative Development, abbreviated as The PRAKARSA.

The PRAKARSA's mandate is to contribute to the building of a democratic, just, and prosperous society by producing knowledge and disseminating innovative ideas in the fields of welfare and alternative development, in service of socio-economic justice and public wellbeing. In its early years, The PRAKARSA

The PRAKARSA berperan membangun masyarakat demokratis, adil, dan makmur dengan menghasilkan pengetahuan serta menyebarkan ide-ide inovatif demi keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan bersama.

The PRAKARSA contributes to building a democratic, just, and prosperous society by generating knowledge and promoting innovative ideas for social justice and public welfare.



kesejahteraan masyarakat. Pada awal berdirinya, The PRAKARSA menempatkan diri sebagai salah satu sistem pendukung untuk pengembangan ide dan inovasi di kalangan masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia melalui peningkatan kapasitas, keahlian dan keterampilan tingkat lanjut bagi masyarakat sipil terutama dalam aspek kebijakan dan kelembagaan. Ini sesuai dengan konteks Indonesia pada dekade awal Reformasi di mana Indonesia baru saja memasuki era demokrasi yang vibran dan terlepas dari pemerintahan otoriter sebelumnya, sehingga penting untuk mengisi era Reformasi dengan analisis dan rekomendasi kebijakan dari kalangan masyarakat sipil, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam alam demokrasi.

Pada perkembangannya, isu kebijakan dan konteks sosial ekonomi yang dialami Indonesia semakin berkembang, sehingga melalui berbagai perencanaan strategis lembaga, fokus The PRAKARSA tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan isu negara kesejahteraan dalam arti sempit, namun berkembang pada isu-isu yang semakin relevan bagi Indonesia (dan dunia). Pada pertengahan dekade kedua tahun 2000-an, fokus isu The PRAKARSA mengerucut pada tiga isu kebijakan utama yaitu Kebijakan Sosial, Kebijakan Ekonomi dan Fiskal serta Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai isu *cross-cutting*.

positioned itself as one of the support systems for developing ideas and innovation among civil society and social movements in Indonesia, through advanced capacity, expertise, and skills development for civil society, particularly on policy and institutional matters. This reflected Indonesia's context in the first decade of Reformasi, when the country had only recently entered an era of vibrant democracy after emerging from authoritarian rule, and when it was vital to fill that new era with policy analysis and recommendations from civil society as a form of active democratic participation.

As Indonesia's policy issues and socio-economic context evolved, successive rounds of institutional strategic planning broadened The PRAKARSA's focus beyond civil society capacity building and the welfare state in its narrow sense, towards issues of growing relevance to Indonesia and the wider world. By the middle of the second decade of the 2000s, The PRAKARSA's thematic focus had crystallised around three core policy areas: Social Policy, Economic and Fiscal Policy, and Sustainable Development as a cross-cutting theme.



Sekilas The PRAKARSA

About The PRAKARSA

Welfare Initiatives for Better Societies



The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, "think and do tank", organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Indonesia.

The PRAKARSA is a policy research and advocacy institution, a "think and do tank" and a civil society organisation based in Jakarta, Indonesia.

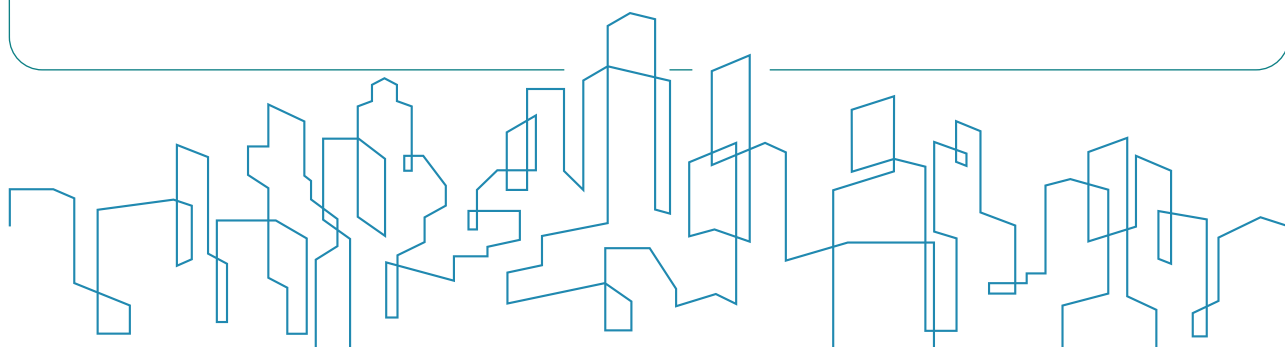


The PRAKARSA (Perkumpulan PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif) memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.

The PRAKARSA memilih untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dan penguatan perumusan kebijakan publik berbasis bukti dengan pendekatan multi-pihak bersama aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah. Area kerja The PRAKARSA di tingkat lokal, nasional, dan global.

The PRAKARSA (Perkumpulan PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif) holds a mandate to contribute to the building of a democratic, just, and prosperous society by producing knowledge and disseminating innovative ideas in the fields of welfare and alternative development, in service of socio-economic justice and public wellbeing. The PRAKARSA focuses on social policy, fiscal policy, and sustainable development.

The PRAKARSA has chosen to engage actively in policy advocacy and in strengthening evidence-based public policy formulation through a multi-stakeholder approach, working with both governmental and non-governmental actors. Our work spans the local, national, and global levels.





The PRAKARSA didukung oleh peneliti, praktisi, intelektual, dan pembuat kebijakan yang memiliki reputasi dalam produksi pengetahuan dan analisis kebijakan yang inovatif, solid, dan berbasis bukti.

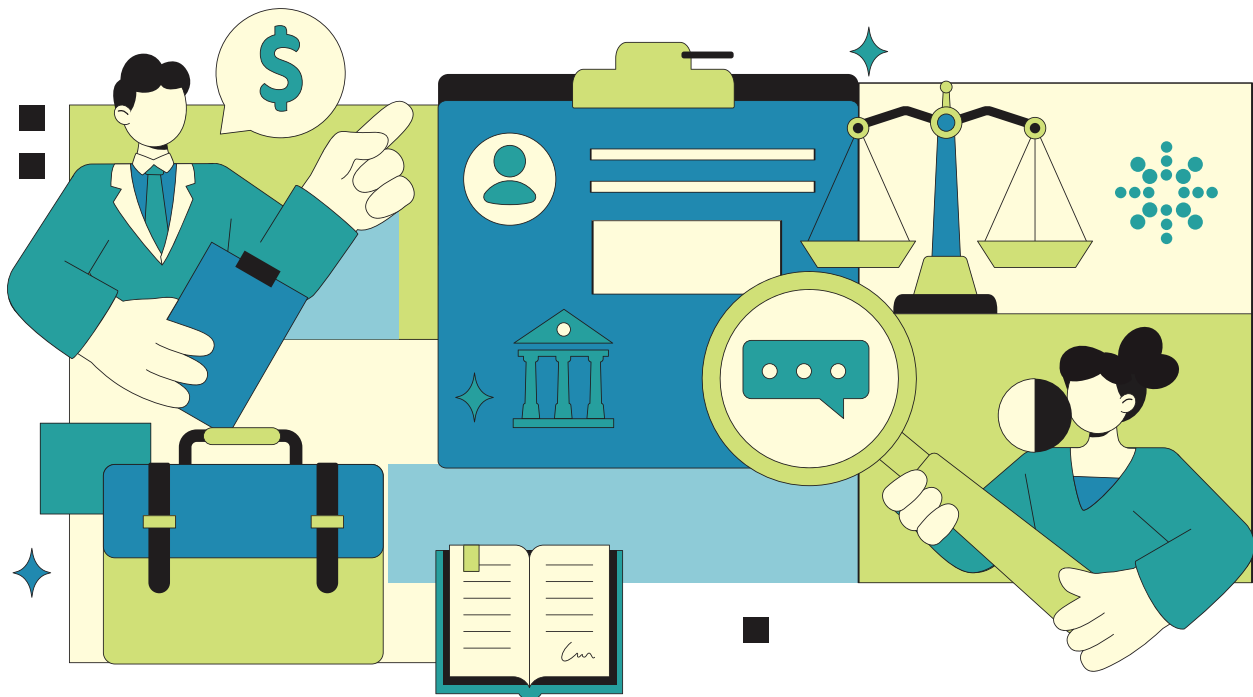
The PRAKARSA bergerak pada ranah “knowledge generating”, “engagement”, dan “problem solving” agar pengetahuan berkembang menjadi sebuah tindakan kebijakan

The PRAKARSA didukung oleh donor dan mitra pembangunan yang menghargai independensi analisis dan kerja-kerja kami.

The PRAKARSA is supported by researchers, practitioners, intellectuals, and policymakers with strong reputations in producing innovative, solid, and evidence-based knowledge and policy analysis.

The PRAKARSA works across the domains of knowledge generation, engagement, and problem solving, so that knowledge translates into policy action.

The PRAKARSA is supported by donors and development partners who value the independence of our analysis and our work.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami

Our Vision, Mission and Values



Visi Vision

Menjadi lembaga riset dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

To be a research and capacity development institution capable of pioneering innovative and transformative ideas that advance socio-economic justice and wellbeing.

Misi Mission

- 01** memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan dan praktik kebijakan kesejahteraan

To produce and promote discourse, knowledge, and practice in welfare policy.

- 02** Melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan berkelanjutan

To conduct research and analysis in social policy, fiscal policy, and sustainable development policy.

- 03** Menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan

To deliver capacity development, education, and training for stakeholders.

- 04** Mengembangkan jejaring antar *think-tank*, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan

To build networks among think tanks, civil society organisations, and the private sector in order to initiate policy reform.



Budaya Organisasi

Organisation Culture

- 01  **Keadilan dan Kesejahteraan**
Justice and Wellbeing
- 02  **Integritas**
Integrity
- 03  **Loyalitas**
Loyalty
- 04  **Disiplin**
Discipline
- 05  **Inklusif**
Inclusiveness
- 06  **Partisipatif**
Participation
- 07  **Anti korupsi**
Anti-Corruption

01 **Keadilan dan Kesejahteraan** Justice and Wellbeing

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk mensejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang objektif, adil, dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan staf. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

The organisation and its staff are committed to carrying out their work, making decisions, and setting policy in a manner that is just and that prioritises the wellbeing of everyone within the organisation. Our systems are designed to ensure an objective, fair, and accountable approach to staff welfare. Human rights and workers' rights are upheld in the organisation's relationships with its employees and partners. Improving staff wellbeing is fundamental to organisational productivity and sustainability.

02 **Integritas** Integrity

Organisasi dan staf melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dengan penuh integritas. Integritas bermakna bahwa organisasi dan staf akan menjaga kejujuran dan memegang prinsip moral yang mendahulukan kepentingan bersama, akuntabilitas, dan kejujuran dalam praktik kerjanya. Staf The PRAKARSA sesungguhnya mewakili organisasi. Dengan demikian staf harus menyadari bahwa dalam

The organisation and its staff carry out their work with integrity. Integrity means that the organisation and its staff uphold honesty and moral principles that place the common interest, accountability, and truthfulness at the heart of their practice. The PRAKARSA staff represent the organisation; staff must therefore recognise that how they conduct themselves reflects on the organisation as a whole.

perilaku yang dibawakan staf menjadi bagian dari organisasi.

03 **Loyalitas** Loyalty

Organisasi mengupayakan lingkungan kerja yang kondusif bagi staf untuk belajar, tumbuh, dan produktif dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan kewajiban untuk membangun keterikatan dan kesetiaan staf terhadap organisasi. Staf berupaya untuk menjaga wibawa, kepentingan dan mandat organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Staf mengetahui posisi organisasi dalam seluruh kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi dan mendukung kerja-kerja advokasi tersebut. Staf harus melakukan segala upaya untuk mempromosikan kepentingan yang baik bagi organisasi.

The organisation works to create a working environment conducive to staff learning, growth, and productivity, in full awareness that investing in people is an obligation and a foundation for building staff commitment and loyalty. Staff, in turn, uphold the standing, interests, and mandate of the organisation in carrying out their work. Staff understand the organisation's position across all of its advocacy work and support that work, making every effort to advance the organisation's legitimate interests.

04 **Disiplin** Discipline

Organisasi menegakkan kedisiplinan dengan menetapkan kebijakan secara transparan dan mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran. Proses akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua staf mematuhi dan menyesuaikan diri dengan petunjuk dan peraturan organisasi, baik dengan maupun tanpa pengawasan. Jika terjadi pelanggaran dan perselisihan, seluruh staf harus menjaga itikad baik untuk mencari jalan keluar dan solusi yang baik bagi kepentingan bersama.

The organisation upholds discipline by setting policy transparently and taking action when violations occur. Processes are conducted openly and accountably. All staff comply with and adapt to the organisation's guidance and rules, whether or not they are being supervised. Where violations or disputes arise, all staff are expected to act in good faith in seeking a resolution that serves the common interest.

05 **Inklusif** Inclusiveness

Organisasi berkomitmen untuk menjadi lembaga yang inklusif dan mandiri dalam lingkup kerja *civil society organization*. Dengan demikian, organisasi memastikan posisi dan arah strategis organisasi akan

The organisation is committed to being inclusive and independent within the civil society sphere. It therefore ensures that its positions and strategic direction prioritise national unity and a commitment

mengutamakan persatuan bangsa dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Seluruh staf dan organisasi turut bersikap penuh toleran terhadap perbedaan dalam dan di luar organisasi. Dalam perbedaan pendapat, semua staf dan organisasi harus saling menghormati dan santun dalam mengupayakan terjadinya dialog antarpribadi.

to Indonesia. All staff and the organisation as a whole practise tolerance towards difference, both within and beyond the organisation. Where opinions differ, staff and the organisation are expected to treat one another with respect and courtesy in pursuing dialogue.

06 Partisipatif Participation

Organisasi berkomitmen untuk mendorong lingkungan kerja yang partisipatif dengan landasan bahwa semua pihak memiliki kapasitas dan tekad untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi, pendekatan partisipatif akan diupayakan. Pendekatan ini turut diterapkan dalam relasi eksternal organisasi dengan pihak lainnya, termasuk donor, pemerintah, parlemen, rekan OMS, akademisi, dan ahli lainnya.

The organisation is committed to fostering a participatory working environment, grounded in the conviction that everyone has the capacity and the will to contribute to the organisation's progress. A participatory approach is pursued in planning, decision-making, implementation, and monitoring and evaluation alike. This approach also extends to the organisation's external relationships – with donors, government, parliament, fellow civil society organisations, academics, and other experts.

07 Anti Korupsi Anti-Corruption

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk menegakkan etika antisuap dan antikorupsi dalam kebijakan organisasi, baik secara keuangan maupun relasi organisasi.

As an expression of transparency and accountability, the organisation is committed to upholding anti-bribery and anti-corruption ethics across its policies, both in financial matters and in its institutional relationships.

Hubungan antara The PRAKARSA dan staf ditopang oleh nilai-nilai organisasi kami yaitu keadilan dan kesejahteraan, integritas, loyalitas, disiplin, inklusif, partisipatif, dan anti korupsi serta dipandu standar perilaku dan etika yang ditetapkan dalam pelaksanaan program. Nilai-nilai ini secara teratur dikomunikasikan melalui rapat, pertemuan, kegiatan pelatihan, dan berbagai kegiatan eksternal yang dipimpin oleh tim manajemen, serta didukung oleh mekanisme *whistleblower* yang menyediakan berbagai saluran rahasia dan aman bagi staf untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai organisasi.

Komitmen kami terhadap keberlanjutan tertanam dalam strategi The PRAKARSA, yang memberikan arahan strategis jangka panjang berlandaskan tujuan mulia, relevan dan mampu bersaing untuk masa depan bagi The PRAKARSA. Strategi ini berdasar pada keyakinan utama kami bahwa produk pengetahuan yang ditunjang oleh kinerja staf yang baik akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Untuk memastikan bahwa

visi, misi, strategi dan nilai organisasi dapat dipahami dan diinternalisasi dengan baik, maka manajemen terus melakukan berbagai upaya penguatan dan pengembangan.

The relationship between The PRAKARSA and its staff rests on our organisational values — justice and wellbeing, integrity, loyalty, discipline, inclusiveness, participation, and anti-corruption — and is guided by the standards of conduct and ethics established for programme implementation. These values are communicated regularly through meetings, gatherings, training activities, and external events led by the management team, and are supported by a whistleblowing mechanism that provides confidential and secure channels for staff to report any indication of a breach of the organisation's values.

Our commitment to sustainability is embedded in The PRAKARSA's strategy, which provides long-term strategic direction grounded in a purpose that is meaningful, relevant, and fit for the future. That strategy rests on our core conviction that knowledge products underpinned by

Tinjauan Dinamika Internal dan Eksternal

Review of Internal and External Dynamics



Dinamika Global dan Lanskap Pendanaan Global Dynamics and the Funding Landscape

Tahun 2025 berlangsung di tengah pergeseran tatanan global yang makin transaksional dan berorientasi kepentingan jangka pendek. Sejumlah negara Global North bergerak semakin *inward looking*, merealokasi anggaran publik ke prioritas pertahanan dan keamanan di tengah eskalasi konflik, serta menurunkan komitmen agenda keadilan iklim, redistribusi kekayaan global, dan penguatan tata kelola pembangunan. Sebaliknya, banyak aktor di Global South justru semakin asertif mendorong reformasi tata kelola global. Bagi organisasi masyarakat sipil, pergeseran ini menghadirkan tantangan ganda: ruang sipil yang lebih ketat sekaligus kompetisi narasi dan pendanaan yang makin kompetitif, seiring bergesernya arsitektur donor dari pola multilateral menuju pendanaan bilateral yang bersifat transaksional dan makin diikat kepentingan donor. Model pendanaan yang lebih ramping dan berbasis hubungan antarpemerintah ini menekan lapisan lembaga nirlaba dan mitra pelaksana, sehingga banyak organisasi menghadapi pilihan untuk beradaptasi, mengecil, atau berhenti.

2025 unfolded amid a shift towards a more transactional global order oriented to short-term interests. A number of Global North countries have turned increasingly inward, reallocating public budgets to defence and security priorities amid escalating conflict, and scaling back their commitments to climate justice, global wealth redistribution, and stronger development governance. Many actors in the Global South, by contrast, have become more assertive in pushing for global governance reform. For civil society organisations, this shift presents a double challenge: tighter civic space alongside sharper competition over both narrative and funding, as the donor architecture moves from multilateral patterns towards bilateral funding that is transactional in character and increasingly tied to donor interests. This leaner, government-to-government funding model squeezes the layer of non-profit institutions and implementing partners, leaving many organisations facing a choice between adapting, shrinking, or closing.

Pergeseran itu tampak paling nyata pada kontraksi pendanaan pembangunan. Bantuan pembangunan resmi (official development assistance/ODA) dari negara-negara anggota OECD Development Assistance Committee (DAC) menjadi USD 174,3 miliar pada 2025, turun 23,1% dibanding 2024. Kondisi ini menandai kontraksi tahunan terbesar sepanjang sejarah pencatatan sekaligus penurunan untuk tahun kedua berturut-turut, yang mengempalakan level ODA global ke posisi tahun 2015, tahun ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) baru diadopsi (OECD, 2025). Amerika Serikat menjadi penyumbang penurunan terbesar yakni sekitar tiga perempat dari total penurunan seiring ODA-nya yang merosot 56,9% menyusul pembekuan bantuan luar negeri dan pembubaran USAID pada awal 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemangkasan menyentuh komponen inti bantuan, bukan sekadar pos yang fluktuatif: ODA bilateral turun 26,4%, bantuan kemanusiaan 35,8%, dan kontribusi inti ke sistem PBB 27% dengan negara kurang berkembang dan kawasan Afrika Sub-Sahara sebagai yang paling terdampak. Tahun 2025 juga menjadi tahun kedua beruntun di mana Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman memangkas ODA secara bersamaan, situasi pertama dalam hampir tiga dekade dan OECD memproyeksikan penurunan lanjutan sekitar 5,8% pada 2026, sehingga tren ini belum akan berbalik dalam waktu dekat.

Kontraksi ini merambat langsung ke jantung pembiayaan organisasi masyarakat sipil. Secara global, ODA yang disalurkan ke dan melalui organisasi masyarakat sipil ikut menurun, sementara di tingkat nasional tekanannya terasa cepat: USAID mengalokasikan sekitar USD 153,5 juta untuk Indonesia pada 2024, dan pembekuan Januari 2025 seketika menghentikan proyek berjalan sehingga sejumlah lembaga terpaksa menempuh efisiensi tajam. Center for Global Development memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemangkasan hingga 95% atau lebih atas nilai program USAID sebelumnya. Survei cepat Asia Philanthropy Circle atas 367 lembaga nirlaba di Asia Tenggara memperkuat gambaran ini: 70% responden bergantung pada pendanaan USAID, mitra kehilangan

That shift is most visible in the contraction of development funding. Official Development Assistance (ODA) from members of the OECD Development Assistance Committee (DAC) fell to USD 174.3 billion in 2025, down 23.1 per cent in 2024. This marks the largest annual contraction on record and a second consecutive year of decline, returning global ODA to its 2015 level, the year the Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted (OECD, 2025). The United States accounted for the largest share of the fall, roughly three-quarters of the total, as its ODA dropped by 56.9 per cent following the freeze on foreign assistance and the dissolution of USAID in early 2025. For the first time in history, the cuts reached the core components of assistance rather than merely its more volatile lines: bilateral ODA fell 26.4 per cent, humanitarian assistance 35.8 per cent, and core contributions to the UN system 27 per cent, with least developed countries and Sub-Saharan Africa the hardest hit. 2025 was also the second consecutive year in which the United States, the United Kingdom, France, and Germany cut ODA simultaneously, the first such occurrence in nearly three decades – and the OECD projects a further decline of around 5.8 per cent in 2026, meaning the trend is unlikely to reverse in the near term.

This contraction has fed directly into the financing base of civil society organisations. Globally, ODA channelled to and through civil society organisations has also declined, while at the national level the pressure has been felt quickly: USAID allocated some USD 153.5 million to Indonesia in 2024, and the January 2025 freeze halted ongoing projects overnight, forcing a number of institutions into sharp cost-cutting. The Center for Global Development lists Indonesia among the countries facing cuts of 95 per cent or more to the value of previous USAID programming. A rapid survey by the Asia Philanthropy Circle covering 367 non-profits in Southeast Asia reinforces this picture: 70 per cent of respondents depended on USAID funding, partners lost around USD 275 million, and only about USD 2 million was thought

sekitar USD 275 juta, dan hanya sekitar USD 2 juta yang diyakini dapat tergantikan dalam setahun dengan Indonesia termasuk paling terdampak dan sektor advokasi, pendidikan, serta iklim sebagai yang paling rentan. Kerentanan ini terasa khusus bagi lembaga riset dan advokasi kebijakan, yang kerja-kerjanya kerap dinilai kurang mendesak dibanding bantuan kemanusiaan sehingga lebih cepat terdampak reprioritisasi. Filantropi domestik dan swasta belum mampu menutup celah tersebut; yang menguat justru kompetisi pendanaan yang lebih ketat, dorongan lokalisasi, dan pergeseran dari pola pendanaan transaksional menuju relasional. Bagi The PRAKARSA, konteks ini mempertegas urgensi diversifikasi sumber daya dan penguatan proposisi nilai yang khas agar tetap relevan dan kompetitif.

to be replaceable within a year, with Indonesia among the most affected and the advocacy, education, and climate sectors among the most vulnerable. This vulnerability is particularly acute for policy research and advocacy institutions, whose work is often judged less urgent than humanitarian assistance and is therefore hit faster by reprioritisation. Domestic and private philanthropy has not been able to close the gap; what has grown instead is tighter funding competition, pressure towards localisation, and a shift from transactional to relational funding patterns. For The PRAKARSA, this context underlines the urgency of diversifying resources and sharpening a distinctive value proposition in order to remain relevant and competitive.



Dinamika Nasional National Dynamics

Pada tingkat nasional, tahun 2025 mengawali implementasi RPJMN 2025-2029 sekaligus menjadi tahun pertama pemerintahan hasil transisi 2024, yang membawa reorientasi prioritas fiskal dan program. Kecenderungan resentralisasi kebijakan pada beberapa isu berisiko mempersempit ruang pengaruh masyarakat sipil, namun juga membuka peluang kemitraan yang strategis dengan lembaga think tank yang mampu menawarkan masukan berbasis bukti. Kondisi ini menuntut The PRAKARSA membaca ulang peta aktor, narasi, dan ruang advokasi, termasuk mengidentifikasi aktor kunci pada lembaga eksekutif dan legislatif serta menjaga keselarasan narasi keadilan dan kesejahteraan dengan prioritas kebijakan nasional tanpa kehilangan independensi analitis. Di sisi lain, ruang fiskal dan tekanan efisiensi belanja turut memengaruhi ketersediaan pendanaan bagi kegiatan riset berbasis bukti. Kompetisi antarlembaga yang meningkat termasuk perebutan talenta terbaik serta ekspektasi donor dan publik yang makin tinggi terhadap transparansi dan bukti dampak, menaikkan standar profesionalisme yang harus dipenuhi organisasi untuk menjaga daya saing dan kredibilitasnya.

At the national level, 2025 marked the start of implementation of the RPJMN 2025-2029 as well as the first year of the administration formed after the 2024 transition, bringing a reorientation of fiscal and programme priorities. A tendency towards policy recentralisation on certain issues risks narrowing civil society's space for influence, but it also opens opportunities for strategic partnerships with think tanks able to offer evidence-based input. This requires The PRAKARSA to reassess the map of actors, narratives, and advocacy spaces, including identifying key actors within the executive and legislature, and keeping its narrative of justice and wellbeing aligned with national policy priorities without losing analytical independence. At the same time, narrowing fiscal space and pressure for spending efficiency affect the availability of funding for evidence-based research. Growing competition between institutions, including for the best talent, together with rising donor and public expectations for transparency and demonstrated impact, raises the standard of professionalism the organisation must meet to sustain its competitiveness and credibility.

Perkembangan Teknologi Technological Developments

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), tidak hanya relevan sebagai alat bantu kerja tetapi juga sebagai area isu baru yang berpotensi menjadi tema riset dan pengembangan kapasitas. Hal ini membuka peluang bagi The PRAKARSA untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menjajaki agenda tematik baru yang berkaitan dengan tata kelola teknologi, pekerjaan, produktivitas, dan dampak sosial-ekonomi digitalisasi. Pada saat yang sama, adopsi teknologi memunculkan pertanyaan tata kelola baru, mulai dari perlindungan data, dampak otomasi terhadap pasar kerja, hingga kesenjangan digital yang beririsan langsung dengan keadilan sosial dan perlindungan pekerja yang selama ini diperjuangkan organisasi.

Technological change, particularly artificial intelligence (AI), is relevant not only as a work tool but also as an emerging issue area with potential as a theme for research and capacity development. This opens opportunities for The PRAKARSA to improve efficiency while exploring new thematic agendas relating to technology governance, work, productivity, and the socio-economic effects of digitalisation. At the same time, technology adoption raises new governance questions from data protection to the impact of automation on the labour market and the digital divide all of which intersect directly with the social justice and worker protection agendas the organisation has long pursued.

Implikasi terhadap Lembaga Implications for the Organisation

Dari keseluruhan dinamika di atas, kebutuhan strategis The PRAKARSA pada tahun 2025 dapat diringkas ke dalam empat kata kunci: *agility*, *positioning*, *collaboration*, dan *quality*. Organisasi perlu lincah membaca perubahan konteks, tegas memosisikan diri pada isu-isu strategis, mampu membangun kolaborasi lintas sektor, dan konsisten menjaga mutu riset. Di atas keempatnya, lanskap pendanaan yang menyempit menjadikan diversifikasi sumber daya dan langkah bertahap menuju kemandirian finansial sebagai prasyarat agar pengaruh yang telah dibangun dapat dijaga dan diperluas. Dengan pengelolaan yang tepat, tekanan eksternal ini justru dapat menjadi momentum untuk memosisikan ulang organisasi, mempertajam fokus tematik, memperkuat proposisi nilai, dan membangun fondasi kelembagaan yang lebih tangguh.

Taken together, these dynamics can be distilled into four strategic priorities for The PRAKARSA in 2025: *agility*, *positioning*, *collaboration*, and *quality*. The organisation needs to read contextually change nimbly, position itself clearly on strategic issues, build cross-sector collaboration, and maintain consistent research quality. Above all four, a narrowing funding landscape makes resource diversification and incremental steps towards financial self-reliance a precondition for protecting and expanding the influence already built. Managed well, this external pressure can become a moment to reposition the organisation, sharpen its thematic focus, strengthen its value proposition, and build more resilient institutional foundations.

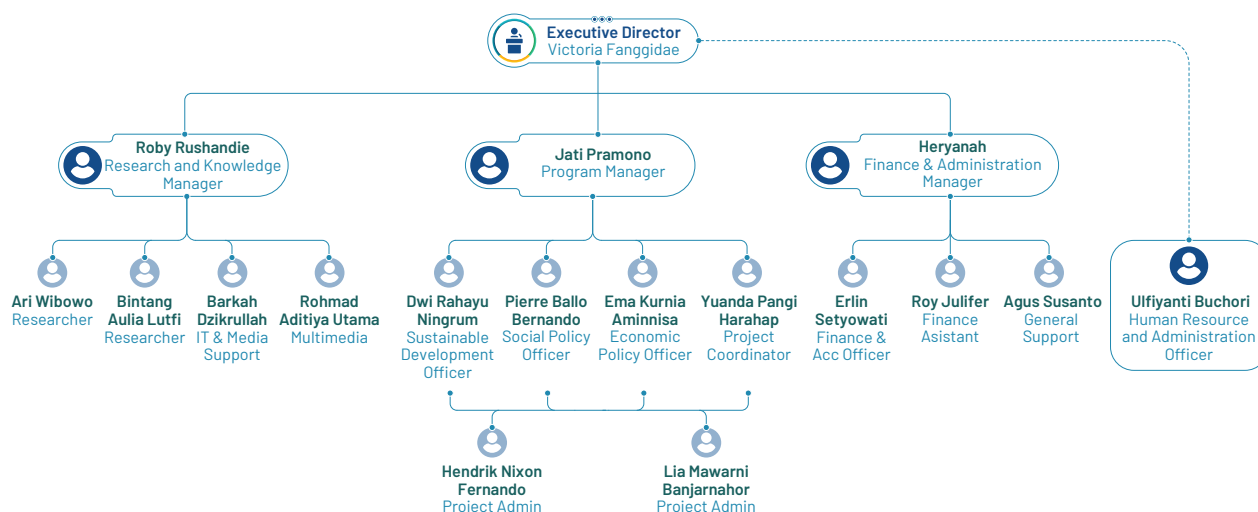


Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organization and Human Resources

Sepanjang 2025, komposisi manajemen dan staf The PRAKARSA mengalami sejumlah penyesuaian sebagai bagian dari proses regenerasi organisasi. Selain transisi kepemimpinan di tingkat Direktur Eksekutif, terjadi pergantian pada beberapa posisi manajerial dan staf, termasuk Manajer Program serta Manajer Penelitian dan Pengetahuan serta sejumlah personel baru yang bergabung pada pertengahan hingga akhir 2025. The PRAKARSA menyampaikan apresiasi yang tulus atas dedikasi dan kontribusi rekan-rekan yang telah menyelesaikan masa baktinya, sekaligus menyambut bergabungnya kolega-kolega baru untuk melanjutkan penguatan program, riset, dan advokasi organisasi.

Over the course of 2025, the composition of The PRAKARSA's management and staff underwent a number of adjustments as part of an organisational renewal process. In addition to the leadership transition at Executive Director level, several managerial and staff positions changed hands including the Programme Manager and the Research and Knowledge Manager alongside a number of new colleagues who joined between mid- and late 2025. The PRAKARSA extends its sincere appreciation for the dedication and contribution of those who have completed their service with us, and welcomes new colleagues joining to carry forward the strengthening of our programmes, research, and advocacy.


Update Desember 2025
Update Desember 2025


Profil Badan Pengurus Harian Executive Management Profiles



Victoria Fanggida, Ph.D

Direktur Eksekutif | Executive Director



Victoria menjabat sebagai Direktur Eksekutif The PRAKARSA sejak 1 November 2025, setelah sebelumnya mengemban peran sebagai Deputy Direktur sejak akhir tahun 2021. Ia memiliki gelar doktor dalam bidang Social Policy, Sociology and Social Theory pada School of Social and Political Sciences (SSPS), Faculty of Arts, University of Melbourne, Australia, serta gelar master's in development studies dari universitas yang sama. Sebelum di The PRAKARSA, Victoria bekerja sebagai staf dan konsultan di berbagai lembaga internasional di Indonesia seperti UNFPA, ILO, Oxfam, dan UN-WFP untuk isu pembangunan sosial dan kemanusiaan, serta magang pada lembaga advokasi Global Poverty Project di Melbourne. Ia berpengalaman mengelola proyek dari berbagai donor internasional, mengoordinasikan riset The PRAKARSA, serta memastikan kendali mutu produk tulisan organisasi seperti laporan riset, policy brief, dan buku. Minat riset Victoria adalah kebijakan sosial, khususnya jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan publik.

Victoria has served as Executive Director of The PRAKARSA since 1 November 2025, having previously held the role of Deputy Director since late 2021. She holds a doctorate in Social Policy, Sociology and Social Theory from the School of Social and Political Sciences (SSPS), Faculty of Arts, University of Melbourne, Australia, as well as a master's in development studies from the same university. Before joining The PRAKARSA, Victoria worked as a staff member and consultant with a range of international institutions in Indonesia including UNFPA, the ILO, Oxfam, and the UN World Food Programme on social development and humanitarian issues, and interned with the advocacy organisation Global Poverty Project in Melbourne. She brings experience managing projects for a variety of international donors, coordinating The PRAKARSA's research, and ensuring quality control across the organisation's written outputs, from research reports and policy briefs to books. Her research interests lie in social policy, particularly social security, employment, and public health.



Jati Pramono

Manajer Program | Programme Manager



Jati Pramono bergabung dengan The PRAKARSA pada Juni 2025 sebagai Manajer Program. Ia bertanggung jawab mengempankan strategi dan rencana kerja program, mengoordinasikan implementasi proyek, serta mengelola kemitraan dan anggaran, termasuk pemantauan dan evaluasi program, penyusunan proposal, dan dokumentasi pembelajaran. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, Jati bekerja di Kementerian PPN/Bappenas pada Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, dengan lebih dari sepuluh tahun pengalaman mengelola berbagai inisiatif kerja sama pembangunan, khususnya melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dengan negara-negara di Asia,

Afrika, dan Amerika Latin, serta menjadi penghubung antara pemerintah Indonesia dan mitra global seperti GIZ, JICA, USAID, UNDP, dan Indonesian AID. Jati menyelesaikan studi magister di Universitas Indonesia bidang Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, dan meraih gelar sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Gadjah Mada. Ia menaruh minat pada isu perkotaan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, kerja sama pembangunan, dan pembangunan berkelanjutan.

Jati Pramono joined The PRAKARSA in June 2025 as Programme Manager. He is responsible for developing programme strategy and work plans, coordinating project implementation, and managing partnerships and budgets, including programme monitoring and evaluation, proposal development, and learning documentation. Before joining The PRAKARSA, Jati worked at the Ministry of National Development Planning/Bappenas in the Directorate of Foreign Policy and International Development Cooperation, with more than ten years of experience managing development cooperation initiatives particularly through South-South and Triangular Cooperation with countries across Asia, Africa, and Latin America – and serving as a liaison between the Government of Indonesia and global partners such as GIZ, JICA, USAID, UNDP, and Indonesian AID. Jati holds a master's degree in Economic Planning and Development Policy from Universitas Indonesia and a bachelor's degree in Urban and Regional Planning from Universitas Gadjah Mada. His interests include urban issues, social justice, poverty reduction, development cooperation, and sustainable development.


Roby Rushandie

Manajer Riset dan Pengetahuan | Research and Knowledge Manager



Roby bergabung dengan The PRAKARSA pada Juni 2025 sebagai Manajer Riset dan Pengetahuan. Ia bertanggung jawab mengelola kegiatan penelitian dan manajemen informasi organisasi. Roby meraih gelar Master of Science (M.Sc) bidang International Business dari University of Birmingham, Inggris, dan gelar Sarjana Manajemen dari School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB). Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, ia memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman sebagai analis dan periset di sektor jasa keuangan Indonesia, khususnya pasar surat utang, termasuk riset untuk regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bursa Efek Indonesia, serta proyek konsultasi keuangan korporasi. Minat riset Roby berada pada isu-isu ekonomi, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, serta pasar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Roby joined The PRAKARSA in June 2025 as Research and Knowledge Manager, responsible for managing the organisation's research activities and information management. He holds a Master of Science in International Business from the University of Birmingham, United Kingdom, and a bachelor's degree in Management from the School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB). Before joining The PRAKARSA, he spent more than 12 years as an analyst and researcher in Indonesia's financial services sector, particularly in debt markets, including research for regulators such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance, the Hajj Financial Management Agency (BPKH), and the Indonesia Stock Exchange, as well as corporate finance consulting projects. His research interests centre on economic issues, including monetary and fiscal policy, and on inclusive and sustainable development markets.



Heryanah

Manajer Keuangan dan Administrasi | Finance and Administration Manager



Heryanah adalah Manajer Keuangan dan Administrasi di The PRAKARSA sejak 2018 – sekarang. Heryanah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banda Aceh. Sebelum di The PRAKARSA, Heryanah bekerja di NGO International dan beberapa NGO lokal dengan bidang pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan masalah keuangan. Heryanah memiliki pengalaman dalam proses audit, baik audit organisasi maupun audit proyek, melakukan perbaikan regulasi keuangan beserta dokumen-dokumen internal yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan keuangan. Heryanah saat ini sedang aktif melakukan pendampingan keuangan dari konsultan

terkait masalah perpajakan.

Heryanah has been Finance and Administration Manager at The PRAKARSA since 2018. She completed a bachelor's degree in Economics and Management at Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia in Banda Aceh. Before joining The PRAKARSA, Heryanah worked with an international NGO and several local NGOs, all in finance-related roles. She brings experience in audit processes both organisational and project audits and in improving financial regulations and the internal documentation that underpins financial reporting. She is currently working actively with consultants on financial and tax matters.



Ulfiyanti Buchori

Staf Administrasi dan Sumber Daya Manusia | Human Resources and Administration Officer



Ulfi menjabat sebagai Human Resource and Administration Officer periode 2022 sampai dengan saat ini. Ulfi menyelesaikan program Sarjana Manajemen dengan fokus sumber daya manusia (SDM) di Universitas Pamulang. Sebelum di The PRAKARSA, Ulfi menjabat sebagai Human Resource di private sector selama tujuh tahun bidang telekomunikasi, berkolaborasi dengan Universitas Telkom, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), dan sekolah-sekolah untuk menyerap tenaga kerja dan pemenuhan SDM yang berkualitas. Selain menjalankan peran sebagai Human Resource, Ulfi juga aktif mengelola unit usaha lembaga yang saat ini telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia. Keterlibatannya mencerminkan komitmen terhadap pengembangan organisasi, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia maupun peningkatan kemandirian lembaga melalui unit usaha strategis.

Ulfi has served as Human Resources and Administration Officer since 2022. She completed a bachelor's degree in Management with a focus on human resources at Universitas Pamulang. Before joining The PRAKARSA, Ulfi spent seven years as a human resources practitioner in the private telecommunications sector, collaborating with Telkom University, the Centre for Vocational Training Development (BBPLK), and schools on workforce absorption and the supply of qualified personnel. Alongside her HR role, Ulfi also actively manages the organisation's business

Ulfi has served as Human Resources and Administration Officer since 2022. She completed a bachelor's degree in Management with a focus on human resources at Universitas Pamulang. Before joining The PRAKARSA, Ulfi spent seven years as a human resources practitioner in the private telecommunications sector, collaborating with Telkom University, the Centre for Vocational Training Development (BBPLK), and schools on workforce absorption and the supply of qualified personnel. Alongside her HR role, Ulfi also actively manages the organisation's business

unit, which has established a partnership with the Institute for Social and Political Research and Development (LPPSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia. Her work reflects a commitment to organisational development, both in people management and in strengthening institutional self-reliance through strategic business units.

Yuanda Pangsi Harahap

Koordinator Proyek Kebijakan Industri Hijau | Green Industrial Policy Project Coordinator



Yuanda merupakan Project Coordinator untuk proyek Low Carbon Development Initiative (LCDI) di The PRAKARSA sejak tahun 2024. Ia memiliki gelar Sarjana Pertanian dari IPB dan gelar Master dari UGM serta University of Agder, Norwegia, dengan fokus pada sustainability management. Sebelumnya, Yuanda memiliki lebih dari lima tahun pengalaman sebagai Sustainability Supervisor dan Project Management Lead di sektor swasta, serta terlibat dalam riset mengenai child labor dan deforestasi di beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet dan kakao. Di The PRAKARSA, ia berkontribusi pada penyusunan Grand Design Peta Jalan Ekonomi Hijau Indonesia dan kajian penganggaran untuk inisiatif Pembangunan

Rendah Karbon.

Yuanda has been Project Coordinator for the Low Carbon Development Initiative (LCDI) at The PRAKARSA since 2024. He holds a bachelor's degree in Agriculture from IPB University and a master's degree from Universitas Gadjah Mada and the University of Agder, Norway, with a focus on sustainability management. He previously spent more than five years as a Sustainability Supervisor and Project Management Lead in the private sector and was involved in research on child labour and deforestation across commodities including palm oil, rubber, and cocoa. At The PRAKARSA, he contributes to the development of the Grand Design for Indonesia's Green Economy Roadmap and to budgeting analysis for low-carbon development initiatives.

Dwi Rahayu Ningrum

Staf Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan | Sustainable Development Policy Officer



Dwi mulai bergabung di PRAKARSA sejak 2015 dan sejak 2021 ia dipercaya sebagai Officer Kebijakan Sustainable Development. Dwi menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang pada program studi Agribisnis dan sedang menempuh studi S2 dalam bidang Kebijakan Publik dengan fokus pada Kebijakan Climate Change di UIII. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Dwi terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian kampus dengan topik penelitian terkait ekonomi pertanian. Dwi tertarik pada isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, kesetaraan gender, serta bisnis dan hak asasi manusia. Dwi terlibat dalam advokasi kebijakan terkait isu-isu tersebut, terutama lewat jaringan

CSO Koalisi Responsibank Indonesia yang dikoordinir The PRAKARSA dan Fair Finance Asia. Dwi aktif dalam riset-riset terkait praktik pembiayaan perbankan di sektor ekstraktif, pembiayaan perubahan iklim hingga inklusi

keuangan. Selain itu, Dwi juga terlibat dalam riset kemiskinan multidimensi, aliran keuangan gelap, perdagangan rokok ilegal, dan sebagainya.

Dwi joined PRAKARSA in 2015 and has served as Sustainable Development Policy Officer since 2021. She completed her undergraduate studies in Agribusiness at Universitas Brawijaya, Malang, and is currently pursuing a master's degree in Public Policy with a focus on climate change policy at UII. Before joining The PRAKARSA, Dwi was involved in university research on agricultural economics. Her interests span sustainability issues including climate change, just energy transition, gender equality, and business and human rights. She is engaged in policy advocacy on these issues, particularly through the ResponsiBank Indonesia Coalition – a CSO network coordinated by The PRAKARSA – and Fair Finance Asia. Dwi is active in research on banking finance practices in the extractive sector, climate finance, and financial inclusion, as well as research on multidimensional poverty, illicit financial flows, and the illicit tobacco trade.



Pierre Bernando Ballo

Staf Kebijakan Sosial | Social Policy Officer



Pierre merupakan Officer bidang Kebijakan Sosial di The PRAKARSA sejak April 2025 dan bertanggung jawab atas penelitian, pengelolaan proyek, serta advokasi pada isu-isu kebijakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan Program Perlindungan Sosial di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, dan sempat menempuh studi singkat pada jurusan Studi Pembangunan, University of Sussex, melalui beasiswa pemerintah. Sebelum menjadi Officer di The PRAKARSA, Pierre bekerja sebagai konsultan hubungan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan nasional seperti Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), Perlindungan Data Pribadi, perdagangan karbon lintas batas, dan Universal Health Coverage (UHC), serta menjadi asisten riset untuk proyek evaluasi dampak yang didanai The World Bank. Pierre menaruh minat pada isu pembangunan lintas sektor, khususnya kemiskinan, jaminan dan bantuan sosial, UHC, pendidikan bagi kelompok marjinal, serta transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

Pierre has been Social Policy Officer at The PRAKARSA since April 2025, responsible for research, project management, and advocacy on social policy issues, particularly social protection programmes in the health and employment sectors. He holds a bachelor's degree in Political Science from Universitas Indonesia and undertook short-term study in Development Studies at the University of Sussex through a government scholarship. Before joining The PRAKARSA, Pierre worked as a government relations consultant, advocating on national policies including the excise duty on sugar-sweetened beverages (MBDK), personal data protection, cross-border carbon trading, and Universal Health Coverage (UHC), and served as a research assistant on a World Bank-funded impact evaluation project. His interests span cross-sectoral development issues, particularly poverty, social insurance and assistance, UHC, education for marginalised groups, and energy transition and low-carbon development.


Ema Kurnia Aminnisa

Staf Kebijakan Ekonomi dan Fiskal | Economic and Fiscal Policy Officer



Ema merupakan Economic Policy Officer di The PRAKARSA sejak April 2025. Ia bertanggung jawab mendukung pelaksanaan program dan penelitian kebijakan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan keadilan sosial, mencakup analisis kebijakan fiskal dan moneter, isu ketimpangan ekonomi, serta advokasi berbasis data untuk mendorong kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Ema menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi di Ritsumeikan University, Jepang, dengan beasiswa penuh MEXT. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, ia menjabat sebagai Asisten Akademik pada Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan terlibat dalam proyek penelitian bidang makroekonomi

dan fiskal, serta pernah magang di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Minat utamanya adalah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta transisi menuju ekonomi yang adil.

Ema has been Economic Policy Officer at The PRAKARSA since April 2025. She supports the delivery of policy programmes and research, particularly in development economics and social justice, covering fiscal and monetary policy analysis, economic inequality, and data-driven advocacy for inclusive and sustainable public policy. Ema completed a master's degree in Economics at Ritsumeikan University, Japan, on a full MEXT scholarship. Before joining The PRAKARSA, she served as an Academic Assistant in the Master's Programme in Development Economics at the Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, and was involved in research projects on macroeconomics and fiscal policy, as well as interning at the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Her principal interests are inclusive and sustainable development policy and the transition to a just economy.


Hendrik Nixon Fernando

Administrasi Proyek | Project Administrator



Hendrik Nixon Fernando bergabung dengan The PRAKARSA pada 2025 sebagai Project Admin. Ia memberikan dukungan administratif dan operasional kepada tim peneliti dan Program Officer, termasuk memastikan kelengkapan dokumen program, validasi bukti pendukung, serta pengawasan kepatuhan pengeluaran sesuai SOP organisasi. Hendrik merupakan lulusan Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Kristen Indonesia, dengan pengalaman sebagai staf keuangan antara lain di Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Asian Games 2018. Keahliannya mencakup administrasi keuangan, akuntansi, perpajakan, dan manajemen dokumen.

Hendrik Nixon Fernando joined The PRAKARSA in 2025 as Project Admin. He provides administrative and operational support to the research team and Programme Officers, including ensuring the completeness of programme documentation, validating supporting evidence, and monitoring expenditure compliance with the organisation's standard operating procedures. Hendrik holds a bachelor's degree in Economics (Accounting) from Universitas Kristen Indonesia, with experience as a finance officer at the Indonesian Olympic Committee (KOI)

and the 2018 Asian Games. His expertise covers financial administration, accounting, taxation, and document management.



Lia Mawarni Banjarnahor

Administrasi Proyek | Project Administrator



Lia Mawarni Banjarnahor bergabung dengan The PRAKARSA pada 2025 sebagai Project Admin. Ia memberikan dukungan administratif dan operasional kepada tim peneliti dan Program Officer, termasuk memastikan kelengkapan dokumen program, validasi bukti pendukung, serta pengawasan kepatuhan pengeluaran sesuai SOP organisasi. Lia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Komputer Indonesia Bandung, dengan pengalaman profesional sejak 2019 pada bidang administrasi dan keuangan di berbagai sektor. Keahliannya mencakup administrasi keuangan, akuntansi, perpajakan, dan manajemen dokumen.

Lia Mawarni Banjarnahor joined The PRAKARSA in 2025 as Project Admin. She provides administrative and operational support to the research team and Programme Officers, including ensuring the completeness of programme documentation, validating supporting evidence, and monitoring expenditure compliance with the organisation's standard operating procedures. Lia holds a bachelor's degree in Economics (Financial Management) from Universitas Komputer Indonesia, Bandung, with professional experience since 2019 in administration and finance across a range of sectors. Her expertise covers financial administration, accounting, taxation, and document management.



Ah Maftuchan

Peneliti Senior | Senior Researcher



Maftuchan menjabat sebagai Direktur Eksekutif The PRAKARSA pada periode 2015–2025, dan sejak 1 November 2025 melanjutkan kontribusinya sebagai Peneliti Senior. Sejak 2021, ia menjalankan studi jenjang doktoral bidang kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan sebelumnya memperoleh gelar magister kesejahteraan sosial (M.Kesos) dari universitas yang sama. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Maftuchan bekerja di GIZ/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit sebagai konsultan ahli bidang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai praktisi pembangunan dan pengamat kebijakan publik, ia kerap menjadi narasumber dan memberikan layanan

konsultasi kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan swasta, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maftuchan menaruh minat pada isu social policies, fiscal policies, dan sustainable development.

Maftuchan served as Executive Director of The PRAKARSA from 2015 to 2025 and, since 1 November 2025, has continued his contribution as a Senior Researcher. Since 2021 he has been pursuing doctoral studies in

social welfare at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, having previously earned a master's degree in social welfare (M.Kesos) from the same university. Before joining The PRAKARSA, Maftuchan worked at GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) as an expert consultant on good governance. As a development practitioner and public policy commentator, he is a frequent speaker and provides advisory services to government, civil society organisations, and private companies both in Indonesia and abroad. His interests lie in social policy, fiscal policy, and sustainable development.


Setyo Budiantoro

Peneliti Senior | Senior Researcher



Setyo Budiantoro adalah Peneliti Senior di The PRAKARSA. Ia mendapatkan gelar masternya di bidang Ekonomi Pembangunan di International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam di Den Haag dan menyelesaikan program pelatihan Analisis Kemiskinan Multidimensi oleh Universitas Oxford dan Universitas George Washington. Ia juga adalah MIT Sloan IDEAS Fellow 2024. Saat ini ia memimpin Pilar Pembangunan Ekonomi di Seknas SDGs Indonesia di bawah Bappenas. Budi adalah penulis yang produktif dalam analisis kebijakan, artikel dan buku di berbagai media nasional dan regional.

Setyo Budiantoro is a Senior Researcher at The PRAKARSA. He holds a master's degree in Development Economics from the International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, in The Hague, and has completed a training programme in Multidimensional Poverty Analysis run by the University of Oxford and George Washington University. He is also a 2024 MIT Sloan IDEAS Fellow. He currently leads the Economic Development Pillar at the SDGs National Secretariat under Bappenas. Budi is a prolific author of policy analysis, articles, and books across national and regional media.


Nor Ismah

Peneliti Senior | Senior Researcher



Nor Ismah adalah salah satu peneliti senior di The PRAKARSA. Ia menyelesaikan studi doktoral di Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) setelah sebelumnya memperoleh gelar MA dalam bidang Studi Asia Tenggara dari School of Pacific and Asian Studies di University of Hawaii di Manoa, Amerika Serikat. Penelitiannya berfokus pada bidang-bidang seperti Islam, produksi pengetahuan perempuan, dan media. Nor Ismah terpilih sebagai finalis Gosling-lim 2023 dan Association of Asian Studies Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies. Beasiswa bergengsi ini diselenggarakan di Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Michigan.

Nor Ismah is one of The PRAKARSA's senior researchers. She completed her doctoral studies at the Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), having previously earned an MA in Southeast Asian Studies from the

School of Pacific and Asian Studies at the University of Hawai'i at Mānoa, United States. Her research focuses on Islam, women's knowledge production, and media. Nor Ismah was selected as a finalist for the 2023 Gosling-Lim Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies, awarded by the Association for Asian Studies and hosted at the Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan.



Andreas Darmega Sihotang

Peneliti Senior | Senior Researcher



Andreas merupakan peneliti senior The PRAKARSA sejak 2023. Andreas mendapatkan gelar Ph.D. di Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri di Columbia, US dan Master of Arts in Conflict Transformation dari Center for Justice and Peace, Eastern Mennonite University di Virginia. Andreas memiliki minat penelitian pada isu terkait partisipasi publik, kinerja organisasi publik, analisis kebijakan, dan evaluasi program. Saat ini ia bekerja sebagai Assistant Professor pada Clinton School of Public Service di University of Arkansas. Sebelumnya, Andreas pernah bekerja untuk badan PBB dan organisasi nirlaba selama lebih dari 15 tahun dengan peran berbeda di bidang bantuan kemanusiaan, sensitivitas konflik dan pembangunan perdamaian, pembangunan internasional, dan advokasi kebijakan.

Andreas has been a senior researcher at The PRAKARSA since 2023. He holds a Ph.D. from the Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri, Columbia, and a Master of Arts in Conflict Transformation from the Center for Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, Virginia. His research interests include public participation, public organisation performance, policy analysis, and programme evaluation. He currently works as an Assistant Professor at the Clinton School of Public Service, University of Arkansas. Previously, Andreas worked for UN agencies and non-profit organisations for more than 15 years in roles spanning humanitarian assistance, conflict sensitivity and peacebuilding, international development, and policy advocacy.



Bintang Aulia Lutfi

Peneliti | Researcher



Bintang saat ini sebagai peneliti The PRAKARSA sejak tahun 2023. Bintang menyelesaikan Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, Bintang telah aktif terlibat dalam riset ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah. Dia bekerja sebagai asisten riset dan surveyor, berkolaborasi dengan dosen dan mitra pemerintah untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi terkait dengan proyek-proyek penelitian. Bintang memiliki ketertarikan pada berbagai isu yang terkait dengan ekonomi, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat dan masalah keuangan. Di The PRAKARSA, Bintang terlibat dalam berbagai riset ekonomi, fiskal dan sosial, dengan penekanan pada metode kuantitatif.

Bintang has been a researcher at The PRAKARSA since 2023. He completed a Master of Science in Islamic Economics at Universitas Airlangga. Before joining The PRAKARSA, Bintang was actively involved in development economics and Islamic economics research, working as a research assistant and surveyor in collaboration with academics and government partners to collect data and analyse information for research projects. His interests span economic issues, particularly public welfare and financial matters. At The PRAKARSA, Bintang contributes to a range of economic, fiscal, and social research with an emphasis on quantitative methods.

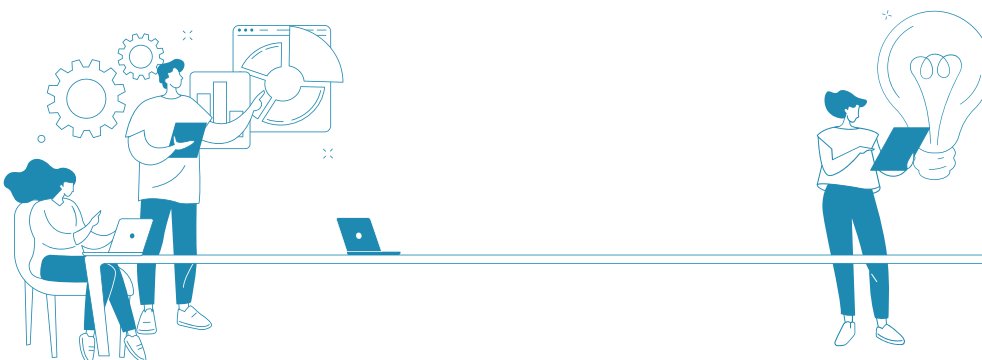
Ari Wibowo

Peneliti | Researcher



Ari Wibowo bergabung di The PRAKARSA sebagai peneliti sejak Juni 2025. Perannya mencakup pengelolaan siklus riset secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan menjaga kualitas substansi riset, mendukung manajemen pengetahuan dan informasi, serta membantu pelaksanaan Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL). Ari menyelesaikan studi S1 di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, dan S2 pada Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, ia menjabat sebagai Program Officer untuk isu HAM, Demokrasi, dan Ketimpangan di INFID. Ari memiliki keahlian pada isu bisnis dan HAM, demokrasi, agraria pesisir dan pulau-pulau kecil, ekologi politik sumber daya alam, tata kelola kebijakan, serta masyarakat adat dan komunitas pedesaan.

Ari Wibowo joined The PRAKARSA as a researcher in June 2025. His role covers the full research cycle – from planning and implementation to reporting – safeguarding the substantive quality of research, supporting knowledge and information management, and assisting with Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL). Ari completed his undergraduate studies in the Department of Communication Science and Community Development, Faculty of Human Ecology, IPB University, and his master's degree in Policy Studies at the Graduate School, Universitas Gadjah Mada. Before joining The PRAKARSA, he served as Programme Officer for human rights, democracy, and inequality at INFID. Ari's expertise covers business and human rights, democracy, coastal and small-island agrarian issues, the political ecology of natural resources, policy governance, and Indigenous peoples and rural communities.





Barkah Dzikrullah

IT & Media Support | IT & Media Support



Barkah Dzikrullah bergabung dengan The PRAKARSA pada Juni 2025 sebagai IT dan Media Support. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh infrastruktur komputer, jaringan, perangkat komunikasi, serta elemen pendukung teknologi lainnya. Barkah menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Teknik Informatika di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) Bali. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, ia memiliki pengalaman sebagai Leader IT Infrastructure di sejumlah perusahaan, termasuk PT HWG, MIFX, dan Telkom.

Barkah Dzikrullah joined The PRAKARSA in June 2025 as IT and Media Support. He is responsible for managing the organisation's computing infrastructure, networks, communication devices, and other supporting technology. Barkah completed a bachelor's degree in Informatics Engineering at the Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI), Bali. Before joining The PRAKARSA, he served as IT Infrastructure Lead at a number of companies, including PT HWG, MIFX, and Telkom.



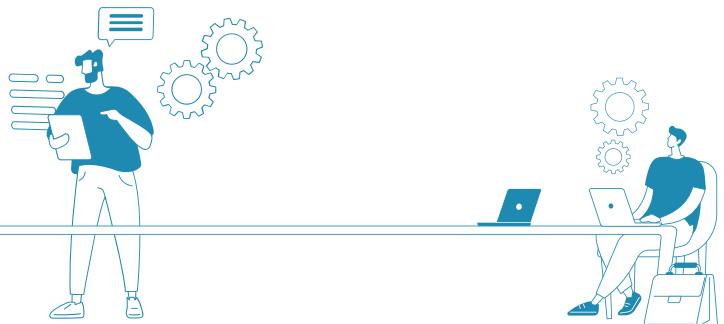
Rohmad Aditya Utama

Media & Communication | Media & Communication



Adit bergabung di The PRAKARSA sebagai Staf Media dan Komunikasi sejak 2022. Aditya menyelesaikan pendidikannya di bidang Komunikasi dan Penyiaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memiliki perhatian yang tinggi pada isu kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan demokrasi terutama yang berkaitan dengan media.

Adit joined The PRAKARSA as a Media and Communications Staff member in 2022. He holds a degree in Communication and Broadcasting from Sunan Kalijaga Islamic State University, Yogyakarta. Adit is deeply passionate about social welfare, environmental issues, and democracy, particularly through the lens of media.



Erin Setyowati

Staf Keuangan dan Akuntansi | Finance and Accounting Officer



Erin Setyowati bekerja di The PRAKARSA sejak 2018 sebagai Finance & Accounting Officer. Erin merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya, Erin memiliki pengalaman kerja sebagai finance dan accounting di sektor swasta di bidang retail, manufaktur, dan properti. Erin memiliki minat dibidang perpajakan nirlaba terutama yang berhubungan dengan NGO. Hingga saat ini Erin telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang perpajakan yang berhubungan dengan perpajakan nirlaba untuk mendukung pengembangan organisasi.

Erin Setyowati has worked at The PRAKARSA since 2018 as Finance and Accounting Officer. She holds a bachelor's degree in Economics and Accounting from Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Previously, Erin worked in finance and accounting in the private sector across retail, manufacturing, and property. Her interests lie in non-profit taxation, particularly as it applies to NGOs, and she has completed a range of training courses on non-profit tax matters in support of the organisation's development.

Roy Julifer Silaban

Asisten Keuangan dan Akuntansi | Finance and Accounting Assistant



Roy Julifer Silaban bergabung dengan The PRAKARSA pada Agustus 2025 sebagai Finance & Accounting Assistant. Ia bertanggung jawab mengelola petty cash, mendokumentasikan seluruh dokumen keuangan, mengelola rekening bank organisasi, serta melaksanakan pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35. Roy meraih gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Advent Surya Nusantara. Dengan ketelitian di bidang administrasi dan akuntansi keuangan, ia berkomitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas The PRAKARSA.

Roy Julifer Silaban joined The PRAKARSA in August 2025 as Finance and Accounting Assistant. He is responsible for managing petty cash, documenting all financial records, managing the organisation's bank accounts, and executing and recording financial transactions in line with the ISAK 35 accounting standard. Roy holds a bachelor's degree in Economics (Accounting) from Universitas Advent Surya Nusantara. Bringing precision to financial administration and accounting, he is committed to supporting transparency and accountability at The PRAKARSA.



Agus Susanto

General Support | General Support



Agus bergabung dengan The PRAKARSA sejak 2008 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan selama sepuluh tahun. Agus mendukung kebutuhan administrasi di dalam atau di luar kantor untuk semua kegiatan dalam The PRAKARSA.

Agus joined The PRAKARSA in 2008, having previously worked at a consulting firm for ten years. Agus supports administrative needs both inside and outside the office across all of The PRAKARSA's activities.





Internship dan Praktikum Internships and Practicums

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas talenta muda dan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, sepanjang tahun 2025 The PRAKARSA menerima mahasiswa/i tingkat akhir dari perguruan tinggi mitra untuk menjalani program magang dan praktikum. Program ini diikuti oleh enam mahasiswa/i, yaitu mahasiswa/i Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia (Ahmad Nabil Putra Priono, Daffa Tora Dewa Kusumo, dan Kayla Faldiani); mahasiswi Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada (Widyadhana Paramita Yonanta); mahasiswa program Master of Public Policy and Management, The University of Melbourne (Tri Handoko); dan mahasiswa College of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University (Saw Law Eh Po). Keenamnya merupakan mahasiswa/i aktif tingkat akhir yang menjalani magang dan praktikum sebagai bagian dari penilaian mata kuliah maupun praktik kerja lapangan.

Selama masa magang dan praktikum, keempat mahasiswa/i tersebut dilibatkan secara aktif dalam sejumlah kegiatan riset dan program yang dijalankan oleh The PRAKARSA. Keterlibatan ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami proses kerja lembaga riset dan think tank, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, dukungan analisis kebijakan, hingga penyusunan bahan advokasi dan rekomendasi kebijakan publik. Secara khusus, ketiga mahasiswa dari Universitas Indonesia menyusun dan menjalankan sebuah program asesmen, yang hasilnya kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian intervensi sebagai salah satu rekomendasi dari hasil asesmen tersebut. Keterlibatan ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa/i dalam memahami proses kerja lembaga riset dan think tank.

Bagi The PRAKARSA, kehadiran mahasiswa/i magang turut memperkuat kerja-kerja riset dan advokasi lembaga melalui kontribusi tenaga dan gagasan

As part of PRAKARSA's commitment to developing young talent and strengthening collaboration with higher education institutions, PRAKARSA hosted internship and practicum placements throughout 2025 for final-year students from partner universities. Six students took part: from the Social Welfare Studies Programme at Universitas Indonesia (Ahmad Nabil Putra Priono, Daffa Tora Dewa Kusumo, and Kayla Faldiani); from the Social Development and Welfare Studies Programme at Universitas Gadjah Mada (Widyadhana Paramita Yonanta); from the Master of Public Policy and Management programme at The University of Melbourne (Tri Handoko); and from the College of Asia Pacific Studies at Ritsumeikan Asia Pacific University (Saw Law Eh Po). All six were active final-year students undertaking their placements as part of coursework assessment or fieldwork practice.

During their placements, the four students were actively involved in a range of The PRAKARSA's research and programme activities. This gave them direct experience of how a research institution and think tank works – from data collection and processing, to supporting policy analysis, to developing advocacy materials and public policy recommendations. In particular, the three students from Universitas Indonesia designed and delivered an assessment programme, the findings of which were followed up with an intervention as one of the assessment's recommendations.

For The PRAKARSA, the presence of interns strengthens our research and advocacy work through the energy and fresh thinking of young scholars.

segar dari kalangan akademisi muda. Program ini sekaligus menjadi wujud nyata kolaborasi The PRAKARSA dengan perguruan tinggi dalam mencetak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu kesejahteraan sosial, keadilan dan kebijakan publik, sejalan dengan visi The PRAKARSA untuk terus berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

The programme is also a concrete expression of The PRAKARSA's collaboration with universities in nurturing a generation that cares about social welfare, justice, and public policy — in line with our vision of contributing to the development of knowledge and of quality human resources.

Badan Pengurus Board Of Governors



01
**Purnama
Adil Marata**

Ketua
Chair



02
**Ati
Nurbaeti**

Sekretaris
Secretary



03
**Binny
Buchori**

Bendahara
Treasurer



04
**Sugeng
Bahagijo**

Anggota
Member



05
**Yuyun
Ismawati**

Anggota
Member



06
**M. Hanif
Dhakiri**

Anggota
Member

“

Tata Kelola yang Baik untuk Dampak yang Berkelanjutan

Badan Pengurus Harian berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif, guna memperkuat kontribusi The PRAKARSA bagi masyarakat.

The Executive Board is committed to upholding transparent, accountable, and inclusive governance to strengthen The PRAKARSA's contribution to society.



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development



Sebagai organisasi yang terus tumbuh, kami juga berkomitmen tumbuh bersama dengan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi. Kami berupaya terus membangunkapabilitasstafmelaluiberbagai pelatihan dan pendidikan, termasuk dalam hal digitalisasi dan inovasi. Kami juga berupaya meningkatkan kompetensi dari para mitra Civil Society Organization (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendukung ekosistem organisasi. Ini menunjukkan prinsip kami untuk menjalankan organisasi secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap publik.

Pada tahun 2025, secara internal The PRAKARSA memfasilitasi dua sesi workshop dan dua sesi pelatihan (*training*) bagi staf sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga. Rangkaian workshop dan pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen The PRAKARSA dalam terus memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, baik dalam aspek substansi program dan riset, maupun aspek tata kelola keuangan dan manajemen lembaga.

As an organisation that continues to grow, we are committed to growing together with our people. We work continuously to build staff capability through training and education, including in digitalisation and innovation. We also work to strengthen the competencies of our civil society organisation (CSO) partners in support of the wider organisational ecosystem. This reflects our principle of running the organisation sustainably while contributing to the public good.

In 2025, The PRAKARSA facilitated two workshops and two training sessions for staff internally as part of efforts to strengthen the institution's human resource capacity. These workshops and training form part of The PRAKARSA's commitment to continuously strengthening the capacity and competence of its people, both in the substance of programmes and research and in financial governance and institutional management.


Lokakarya
Workshop

**Regional Expert Workshop
& UN Tax Convention, Bangkok**
Regional Expert Workshop & UN Tax
Convention, Bangkok

Proyek Project
F4A

Peserta Participant
Staf program dan manajemen
Programme and management
staff

Lokakarya
Workshop

**Business and Human Rights
& COBHRA**
Business and Human Rights & COBHRA

Proyek Project
FFA

Peserta Participant
Staf Program dan Peneliti
Programme staff and
researchers

Pelatihan
Training

**Empowering Civil Society:
Mengawal Pajak menuju Keadilan**
Empowering Civil Society: Advancing
Tax Justice

Proyek Project
F4A

Peserta Participant
Staf Program dan Manajemen
Programme staff and researchers



Pelatihan Training

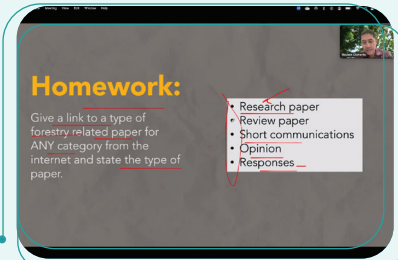
PSAK 24
PSAK 24

 **Proyek Project
Build**

 **Peserta Participant
Staf Keuangan
Finance Staff**

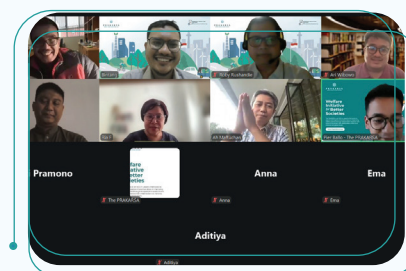
Selain pelatihan yang dilaksanakan dengan melibatkan narasumber eksternal, kami juga secara rutin menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM melalui sharing knowledge internal. Sharing knowledge dapat dilakukan bukan hanya oleh pihak di luar organisasi tetapi juga antarstaf dalam The PRAKARSA, dengan tema yang beragam dan narasumber oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Sharing knowledge yang dilakukan pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 5 kali dengan isu-isu yang dibahas antara lain sebagai berikut:

Alongside training delivered with external resource persons, we also run regular internal knowledge-sharing sessions to build staff capacity. These sessions are led not only by external speakers but also by PRAKARSA staff themselves, covering a range of themes with experts from Indonesia and abroad. Five knowledge-sharing sessions were held in 2025, covering the following topics:

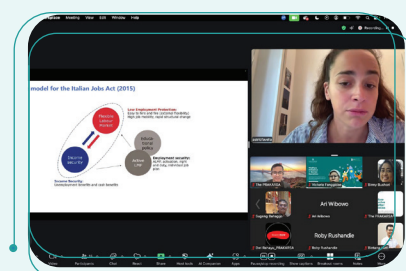
Tanggal Date	Tema dan Narasumber Topic & Speaker
17 Maret 2025 March 2025	<p>Jurnalistik, Strategi Visibility dan Publikasi Oleh Bambang Purnama (Media Expert)</p> <p>Journalism, Visibility Strategy and Publication By Bambang Purnama (Media Expert)</p> 
17 & 25 Juli 2025 July 2025	<p>Write Like A Pro 1 & 2 Oleh Reuben Clement, Ph.D (Sustainable Finance Specialist at ZSL)</p> <p>Write Like A Pro 1 & 2 By Reuben Clement, Ph.D (Sustainable Finance Specialist at ZSL)</p> 

22 Agustus 2025
August 2025

Green Industrial Policy in Indonesia
Oleh Prof. Zulfan Tadjoeeddin, Ph.D
(Associate Professor in Development
Studies at Western Sydney University)

Green Industrial Policy in Indonesia
By Prof. Zulfan Tadjoeeddin, Ph.D
(Associate Professor in Development
Studies at Western Sydney University)

22 September 2025
September 2025

**Active Labor Market Policies in Italy
and Lessons for Indonesia.**
Oleh Astrid Favella
(Peneliti Pascadoktoral di Universitas Sapienza,
Roma)

**Active Labor Market Policies in Italy
and Lessons for Indonesia.**
By Astrid Favella (Postdoctoral Researcher at
Sapienza University of Rome)

22 Oktober 2025
October 2025

**The Role of Global South in The Era of
Geopolitical Competition**
Oleh Marco Fernandes
(Brazilian Representative at The BRIC Civil Council)

**The Role of Global South in The Era of
Geopolitical Competition**
By Marco Fernandes
(Brazilian Representative at The BRIC Civil Council)


Sejak tahun 2021, kami juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pendidikan staf melalui bantuan dana pendidikan dan keringanan dalam hal jam kerja. Pada tahun 2025, terdapat dua orang staf yang resmi menyelesaikan pendidikan S2, satu staf untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2.

Berkat semangat dan kerja keras seluruh staf, The PRAKARSA mampu membukukan kinerja yang baik pada tahun 2025, sehingga menjadi sebuah landasan yang baik untuk pertumbuhan ke depannya. Ini tidak terlepas dari komposisi badan pelaksana harian

Since 2021, we have also been committed to supporting staff education through education grants and flexible working hours. In 2025, two staff members formally completed their master's degrees and one staff member began master's-level study.

Thanks to the commitment and hard work of all our staff, The PRAKARSA delivered strong performance in 2025, providing a solid platform for future growth. This rests in large part on the composition of our executive team.

Komposisi staf / Badan Pelaksana Harian
Composition of Staff / Executive Leadership Team



Kesejahteraan Staf

Staff Wellbeing



The PRAKARSA menjadikan kesejahteraan staf sebagai fokus utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kami menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membangun organisasi, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan staf yang meliputi aspek fisik, emosional, dan mental. Pada tahun 2024, kami masih melanjutkan komitmen kami untuk mempertahankan keseimbangan antara kerja di kantor dan kerja dari rumah. Kami juga berkomitmen untuk mendukung staf agar dapat bekerja dengan sehat dan produktif, terutama bagi ibu yang memiliki anak.

Pada tahun 2025, organisasi kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan ganda bagi staf, keluarga, dan badan pengurus, termasuk penyediaan asuransi kesehatan tambahan selain kewajiban ketenagakerjaan seperti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di organisasi. Dengan memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung, sehingga staf dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Perlindungan ini mencerminkan perhatian kami terhadap kebutuhan dan kesejahteraan semua anggota organisasi, serta komitmen kami untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung.

The PRAKARSA places staff wellbeing at the heart of its people management. We apply strategies to improve the quality of our human resources in order to build the organisation, while attending to staff wellbeing in its physical, emotional, and mental dimensions. In 2025, we continued our commitment to maintaining a balance between office-based and home-based working. We are also committed to supporting staff to work healthily and productively, particularly mothers with young children.

In 2025, our organisation committed to providing dual protection for staff, their families, and the governing board, including supplementary health insurance in addition to statutory employment obligations such as the national health insurance (BPJS Kesehatan) and employment social security (BPJS Ketenagakerjaan) schemes. This initiative forms part of our efforts to improve the wellbeing of our people. By providing better health coverage, we hope to create a safer and more supportive working environment in which staff can work with greater peace of mind and productivity. This protection reflects our attention to the needs and wellbeing of everyone in the organisation, and our commitment to building an inclusive and supportive working culture.



Kesetaraan Gender, Keberagaman, dan Inklusi

Gender Equality, Diversity and Inclusion



The PRAKARSA adalah organisasi yang terbuka bagi semua orang, dan kami senantiasa berupaya meningkatkan inklusivitas. Komitmen kami terhadap kesetaraan gender tercermin dalam komposisi kepemimpinan pada akhir tahun 2025: posisi Direktur Eksekutif dijabat oleh perempuan, dan tiga dari lima posisi di tingkat manajemen diisi oleh perempuan. Secara keseluruhan, badan pelaksana harian terdiri atas tujuh perempuan dan sepuluh laki-laki. Dengan demikian, perempuan memimpin organisasi dan menempati mayoritas posisi manajemen, sementara laki-laki masih menjadi mayoritas pada keseluruhan tim — kondisi yang kami sampaikan secara terbuka dan menjadi bahan pertimbangan dalam rekrutmen serta pengembangan SDM ke depan.

Kami juga memiliki kebijakan untuk memenuhi kebutuhan khusus staf perempuan di The PRAKARSA. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang setara, kami mendukung staf perempuan melalui berbagai pengaturan yang sesuai, seperti waktu kerja fleksibel dan dapat bekerja lebih banyak dari rumah. Staf perempuan dengan anak berusia hingga dua tahun diberikan kelonggaran dalam durasi waktu kerja untuk mencapai 8 jam sehari, serta dapat mengajukan izin tambahan atau cuti untuk perawatan anak dan keadaan darurat lainnya. Dalam kegiatan pertemuan tatap muka, baik di dalam maupun luar kota, staf perempuan dapat didampingi oleh baby-sitter atau anggota keluarga. Kami juga menyediakan cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti untuk ayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami terus berkomitmen untuk mendukung kesempatan yang sama bagi semua orang serta mendorong keberagaman dalam hal usia, gender, budaya, agama, etnis, dan disabilitas. Meski demikian, kami menyadari masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam mendukung pekerja dengan disabilitas dan keragaman lainnya.

The PRAKARSA is an organisation open to all, and we continually work to increase our inclusivity. Our commitment to gender equality is reflected in the composition of our leadership at the close of 2025: the Executive Director role is held by a woman, and women hold three of the five positions at management level. Across the executive body as a whole, the organisation comprises seven women and ten men. Women therefore lead the organisation and hold the majority of its management positions, while men remain the majority of the wider team — a picture we set out plainly, and one that informs how we approach recruitment and staff development going forward.

We also have policies in place to meet the specific needs of women staff at The PRAKARSA. In working to create an equitable environment, we support women staff through appropriate arrangements such as flexible working hours and greater scope to work from home. Women staff with children up to two years of age are given flexibility in how they meet the eight-hour working day, and may request additional leave or time off for childcare and other emergencies. For in-person meetings, whether in Jakarta or elsewhere, women staff may be accompanied by a babysitter or family member. We also provide menstrual leave, maternity leave, and paternity leave in line with applicable regulations.

We remain committed to supporting equal opportunity for all and to promoting diversity in age, gender, culture, religion, ethnicity, and disability. That said, we recognise that challenges remain in implementation, particularly in supporting workers with disabilities and other forms of diversity.



Jejak Langkah

Our Journey

The PRAKARSA terus melangkah untuk mendorong perubahan melalui riset, pengetahuan, dan advokasi kebijakan. Dengan memperkuat kolaborasi dan menghadirkan solusi berbasis bukti, kami berkomitmen membangun kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

The PRAKARSA continues to move forward in driving change through research, knowledge, and policy advocacy. By strengthening collaboration and advancing evidence-based solutions, we are committed to shaping policies that are more equitable, inclusive, and sustainable for society.

Capaian Kerja-Kerja

Programmatic Achievements



Kebijakan Sosial Social Policy

Keterlibatan dalam Formulasi Kebijakan Jaminan Sosial

Engagement in social security policy formulation

Sepanjang 2025, The PRAKARSA terlibat dalam sejumlah proses kebijakan sosial yang strategis. Organisasi berkontribusi dalam peer review revisi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang diselenggarakan Komite III DPD RI, serta aktif pada National Tripartite Policy Dialogue bersama ILO dan Bappenas dengan memberikan masukan terkait perluasan jaminan pensiun bagi pekerja informal dan rencana pembagian akun JHT.

The PRAKARSA juga terlibat pada formulasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) DKI Jakarta 2026, evaluasi RAD-PD 2024-2025, serta proses penyusunan RKPD DKI Jakarta 2026 dan Musrenbang DKI Jakarta 2025. Selain itu, organisasi berpartisipasi dalam simposium integrasi kebijakan pengembangan SDM sektor digital informal dengan memaparkan riset *ride-hailing* untuk pemangku kepentingan pemerintah dan swasta.

Throughout 2025, The PRAKARSA was involved in a number of strategic social policy processes. The organisation contributed to the peer review of the revision of the National Social Security System Law (UU SJSN) convened by Committee III of the Regional Representative Council (DPD RI), and participated actively in the National Tripartite Policy Dialogue with the ILO and Bappenas, providing input on extending pension coverage to informal workers and on plans to split old-age savings (JHT) accounts.

The PRAKARSA also contributed to the formulation of Jakarta's Regional Action Plan for the Respect, Protection and Fulfilment of the Rights of Persons with Disabilities (RAD-PD) 2026, the evaluation of the 2024-2025 RAD-PD, and the preparation of Jakarta's Regional Government Work Plan (RKPD) 2026 and the 2025 Jakarta development planning consultation (Musrenbang). In addition, the organisation took part in a symposium on integrating human capital development policy for the informal digital sector, presenting our ride-hailing research to government and private sector stakeholders.

Menjadi Rujukan Pengambil Kebijakan

Becoming a reference point for decision-makers

Pada ranah *evidence-based policy*, The PRAKARSA dipercaya menjadi narasumber dalam program CONCEIVE Badan Pusat Statistik dengan materi strategi advokasi dan komunikasi kebijakan kemiskinan berbasis data multidimensi. Organisasi juga terlibat dalam Pokja Kesejahteraan pada forum

In the field of evidence-based policy, The PRAKARSA was invited to serve as a resource institution for Statistics Indonesia's CONCEIVE programme, delivering material on advocacy and communication strategies for poverty policy grounded in multidimensional data. The organisation

diseminasi Direktorat PKPM Bappenas, di mana Indeks Kemiskinan Multidimensi dijadikan salah satu *benchmark* pengukuran kemiskinan nasional.

Selain itu, The PRAKARSA diundang pada forum Ranwal RPKD DKI Jakarta untuk memaparkan Indeks Kemiskinan Multidimensi sebagai salah satu rujukan program pengentasan kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa produk pengetahuan organisasi telah bergerak dari sekadar output penelitian menjadi rujukan kebijakan.

also participated in the Welfare Working Group at a dissemination forum convened by Bappenas' Directorate of Poverty Reduction and Community Empowerment, where the Multidimensional Poverty Index was adopted as one benchmark for national poverty measurement.

The PRAKARSA was further invited to Jakarta's preliminary draft Regional Poverty Reduction Plan (RPKD) forum to present the Multidimensional Poverty Index as a reference for poverty reduction programming. This demonstrates that the organisation's knowledge products have moved beyond research outputs to become policy reference points.

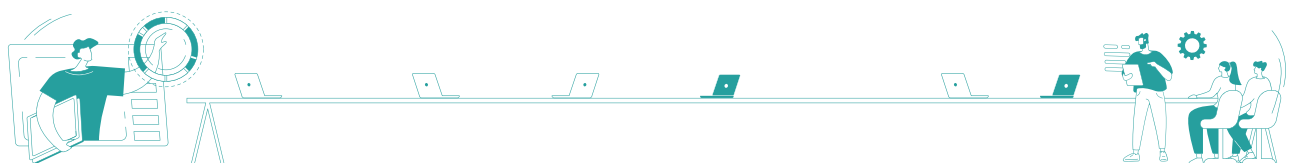
Perluasan Kolaborasi Multipihak Expanding Multi-Stakeholder Collaboration

Pada 2025, The PRAKARSA memulai riset gig worker, ojek online, dan digital economy bersama PSDK UGM. Survei dan pengumpulan data dilakukan di dua kota dengan total responden dan informan mencapai 650 orang. Organisasi juga merilis temuan awal riset Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia melalui diskusi publik daring.

In 2025, The PRAKARSA launched research on gig workers, motorcycle ride-hailing drivers, and the digital economy in partnership with PSDK Universitas Gadjah Mada. Surveys and data collection were carried out in two cities, reaching a total of 650 respondents and informants. The organisation also released preliminary findings from its research on Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia through an online public discussion.

Kolaborasi lain mencakup kontribusi penulisan satu bab untuk edited book 10 tahun Jaminan Pensiun yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan, keterlibatan dalam Deklarasi KuMPUL tentang perlindungan kelanjutusiaan, serta joint podcast bersama ILO yang menyoroti isu ketenagakerjaan, labor market, dan perlindungan sosial dengan total views lebih dari 25.000 pada platform media sosial.

Other collaborations included contributing a chapter to an edited volume marking ten years of the pension scheme, published by BPJS Ketenagakerjaan; participation in the KuMPUL Declaration on protection in older age; and a joint podcast with the ILO on employment, labour markets, and social protection, which attracted more than 25,000 views across social media platforms.



Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Economic and Fiscal Policy

Inisiator Jejaring Internasional Initiating International Networks

Di bidang kebijakan ekonomi dan fiskal, The PRAKARSA berperan sebagai inisiator pembentukan Coalition Asia Pacific Tax Analysis and Initiative Network (CAPTAIN). Inisiatif ini menunjukkan upaya organisasi untuk mendorong advokasi pajak yang lebih kolaboratif di tingkat regional.

Organisasi juga melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk penelitian ekonomi restoratif, termasuk CLUA, LTKL, PT RMU, PT ASL, dan tokoh-tokoh masyarakat. sepanjang tahun 2025 agenda ekonomi restoratif bahkan memperoleh tambahan pendanaan dari LTKL, yang memperlihatkan adanya resonansi isu dengan mitra baru.

In economic and fiscal policy, The PRAKARSA initiated the Coalition of Asia Pacific Tax Analysis and Initiative Network (CAPTAIN). This initiative reflects the organisation's efforts to build more collaborative tax advocacy at the regional level.

The organisation also engaged a range of parties on restorative economy research, including CLUA, LTKL, PT RMU, PT ASL, and community leaders. During 2025, the restorative economy agenda secured additional funding from LTKL, indicating that the issue is resonating with new partners.

Kolaborasi Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Advocacy Collaboration and Capacity Building

The PRAKARSA menyelenggarakan policy dialogue dengan memaparkan hasil penelitian mengenai dinamika rasio pajak di negara-negara ASEAN serta policy brief bertajuk "Mengawal Kepentingan Indonesia dalam Negosiasi UN Tax Convention". Organisasi juga menyiapkan materi kampanye dalam bentuk video mengenai UN Tax dan wealth tax yang telah dipublikasikan melalui kanal YouTube The PRAKARSA dan jejaring organisasi masyarakat sipil di bidang perpajakan.

Di tingkat akar, The PRAKARSA menyelenggarakan capacity building bagi organisasi masyarakat di Jakarta mengenai perpajakan dan mendorong keterlibatan mereka dalam monitoring isu perpajakan nasional maupun global. Organisasi juga berkolaborasi dengan ASPPUK untuk sosialisasi Buku Praktis Pajak serta menyelenggarakan diskusi publik dan launching white paper Agenda Reformasi Perpajakan bersama Forum Pajak Berkeadilan Indonesia.

The PRAKARSA convened a policy dialogue presenting research findings on tax ratio dynamics across ASEAN countries, alongside a policy brief titled "Safeguarding Indonesia's Interests in the UN Tax Convention Negotiations". The organisation also produced campaign materials in video format on the UN Tax Convention and wealth taxation, published through The PRAKARSA's YouTube channel and the networks of civil society organisations working on taxation.

At the grassroots level, The PRAKARSA delivered capacity building on taxation for community organisations in Jakarta and encouraged their engagement in monitoring national and global tax issues. The organisation also worked with ASPPUK to disseminate the Practical Tax Handbook, and convened a public discussion and launch of the white paper "A Tax Reform Agenda" together with the Indonesian Forum for Tax Justice.



Pembangunan Berkelanjutan dan Kebijakan Industri Hijau Sustainable Development and Green Industrial Policy



Mendorong Keuangan Berkelanjutan dan Transisi Berkeadilan

Advancing sustainable finance and a just transition

Sebagai koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia, The PRAKARSA aktif memperkuat kesadaran publik dan generasi muda terkait keuangan berkelanjutan. Salah satu inisiatifnya adalah penyelenggaraan Consumer Festival di UPN Veteran Jakarta pada 27 November 2025 yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa. Organisasi juga menyusun masukan untuk penyempurnaan dokumen Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2, khususnya pada sektor AFOLU.

Dalam agenda transisi energi berkeadilan, The PRAKARSA menyelenggarakan dialog kebijakan "Dekarbonisasi Industri Nikel yang Berkeadilan" dengan menghadirkan Kementerian ESDM, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, CSO, dan akademisi. Organisasi juga berpartisipasi dalam pertemuan tahunan di Milan, Bangkok Climate Action Week 2025, dan kolaborasi regional FFA untuk memberikan rekomendasi integrasi prinsip just energy transition dan gender ke dalam dokumen APAEC Phase 3 (2026-2030).

As coordinator of the ResponsiBank Indonesia Coalition, The PRAKARSA has been active in building public and youth awareness of sustainable finance. One such initiative was a Consumer Festival held at UPN Veteran Jakarta on 27 November 2025, attended by around 300 students. The organisation also prepared input for the refinement of the second version of the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI), particularly on the AFOLU sector.

On the just energy transition agenda, The PRAKARSA convened a policy dialogue on "Just Decarbonisation of the Nickel Industry", bringing together the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Indonesian Nickel Mining Association, civil society organisations, and academics. The organisation also took part in the annual meeting in Milan, Bangkok Climate Action Week 2025, and regional collaboration through Fair Finance Asia to provide recommendations on integrating just energy transition and gender principles into the APAEC Phase 3 (2026-2030) document.



Bisnis dan HAM, LCDI, dan Agenda Industri Hijau

Business and Human Rights, LCDI, and the Green Industry Agenda

The PRAKARSA turut mendukung integrasi bisnis dan HAM melalui pelatihan berbasis komunitas (COBHRA), pemberian masukan pada penyusunan pedoman uji tuntas HAM untuk indikator lingkungan dan perubahan iklim, serta dialog publik mengenai kaitan antara pembiayaan bank, aktivitas industri ekstraktif, dan dampak ekologis di Sumatra.

Dalam kerangka Low Carbon Development Indonesia (LCDI), The PRAKARSA berkontribusi pada penyusunan Grand Design Ekonomi Hijau Indonesia

The PRAKARSA supported the integration of business and human rights through community-based training (COBHRA), input into the development of human rights due diligence guidance on environmental and climate change indicators, and public dialogue on the links between bank financing, extractive industry activity, and ecological impacts in Sumatra.

Within the Low Carbon Development Indonesia (LCDI) framework, The PRAKARSA contributed to the development of the Grand Design for Indonesia's

2045, evaluasi Dana Insentif Daerah (DID) terhadap target pembangunan rendah karbon, engagement dengan DPR RI, diskusi pendanaan bersama Bappenas dan BPD LH, serta validasi integrasi berbagai platform monitoring penurunan emisi.

Tahun 2025 juga menandai ekspansi isu green industrial policy sebagai proyek lintas sektor perdana yang lebih sistematis. Capaian penting meliputi riset monitoring dan evaluasi RIPIN serta RPIP, audiensi dengan BSKJI dan Pusat Industri Hijau, expert review temuan awal studi, serta keterlibatan dalam Future Leaders Program SOAS University of London dengan topik kebijakan industri di ASEAN.

Green Economy 2045, the evaluation of Regional Incentive Funds (Dana Insentif Fiskal/DIF) against low-carbon development targets, engagement with the House of Representatives, financing discussions with Bappenas and the Environmental Fund Management Agency (BPD LH), and validation of the integration of various emissions-reduction monitoring platforms.

2025 also marked the expansion of green industrial policy as our first, more systematic cross-sectoral project. Key achievements included research on the monitoring and evaluation of the National Industrial Development Master Plan (RIPIN) and Provincial Industrial Development Plans (RPIP), meetings with the Agency for Industrial Standardisation and Services Policy (BSKJI) and the Green Industry Centre, expert review of preliminary study findings, and participation in the Future Leaders Programme at SOAS University of London on industrial policy in ASEAN.

Rekognisi Keahlian dan Jejaring Recognition of Expertise and Networks

Rekognisi terhadap The PRAKARSA sebagai sumber keahlian kebijakan terlihat dari keterlibatan organisasi dalam berbagai forum multipihak. Di tingkat nasional, organisasi menjadi pembicara dalam diskusi publik mengenai ketimpangan dan SDGs, expert workshop regional tentang dampak insentif pajak global dan sistem perdagangan, dialog percepatan akses Indonesia ke OECD, serta forum Refleksi May Day 2025.

Di tingkat internasional, The PRAKARSA tergabung dan menjadi salah satu chair pada working group Financial and Monetary System in Multipolarity di BRICS Civil Council. Organisasi juga menyuarakan isu darurat ketimpangan global dan kebutuhan pajak bagi orang super kaya pada KTT C20 Afrika Selatan, serta berbagi pengalaman advokasi dalam konferensi internasional "Bridge for Change: Building Sustainable Futures" di Den Haag.

Recognition of The PRAKARSA as a source of policy expertise is evident in the organisation's participation in a range of multi-stakeholder forums. Nationally, the organisation spoke at public discussions on inequality and the SDGs, a regional expert workshop on the impact of global tax incentives and the trading system, a dialogue on accelerating Indonesia's OECD accession, and the May Day 2025 Reflection Forum.

Internationally, The PRAKARSA joined and co-chairs the working group on the Financial and Monetary System in Multipolarity at the BRICS Civil Council. The organisation also raised the emergency of global inequality and the need to tax the ultra-wealthy at the C20 Summit in South Africa, and shared its advocacy experience at the international conference "Bridge for Change: Building Sustainable Futures" in The Hague.

Rekognisi 2025 Recognition

Arena Arena	Bentuk Rekognisi Form of Recognition
 Nasional National	Diskusi SDGs bersama Oxfam dan Penabulu; Expert workshop Asia tentang global tax incentives; Dialog akses OECD; Forum Refleksi May Day 2025. SDGs discussion with Oxfam and Penabulu; Asia expert workshop on global tax incentives; OECD accession dialogue; May Day 2025 Reflection Forum.
 Internasional International	Chair working group BRICS Civil Council; Seruan pajak untuk orang super kaya pada C20 Afrika Selatan; Bridge for Change di Den Haag. Working group co-chair, BRICS Civil Council; call for taxing the ultra-wealthy at the C20 Summit in South Africa; Bridge for Change, The Hague.

Penelitian dan Manajemen Pengetahuan Research and Knowledge Management

Sepanjang tahun 2025, The PRAKARSA memperkuat perannya sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan melalui portofolio publikasi yang mencakup laporan penelitian, working paper, white paper, policy brief, dan buku panduan. Seluruh produk tersebut dirancang untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti sekaligus memperluas jangkauan diseminasi pengetahuan kepada pembuat kebijakan, mitra pembangunan, kalangan akademik, media, dan publik.

Secara substantif, publikasi 2025 merefleksikan konsistensi fokus organisasi pada tiga agenda besar, yaitu penguatan kebijakan sosial yang inklusif, reformasi fiskal yang berkeadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Setiap publikasi tidak berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi juga merumuskan implikasi kebijakan, opsi intervensi, dan rekomendasi yang relevan untuk ditindaklanjuti.

Melalui pendekatan tersebut, produk pengetahuan The PRAKARSA semakin menegaskan fungsi strategisnya sebagai rujukan kebijakan, instrumen

Throughout 2025, The PRAKARSA strengthened its role as a policy research and advocacy institution through a publication portfolio spanning research reports, working papers, white papers, policy briefs, and practical handbooks. All of these outputs are designed to support evidence-based policymaking while extending the reach of knowledge dissemination to policymakers, development partners, academia, the media, and the public.

Substantively, our 2025 publications reflect the organisation's consistent focus on three major agendas: strengthening inclusive social policy, advancing equitable fiscal reform, and promoting sustainable development. Each publication goes beyond mapping the problem to set out policy implications, intervention options, and actionable recommendations.

Through this approach, The PRAKARSA's knowledge products increasingly serve their strategic function as policy reference points, advocacy instruments, and

advokasi, dan medium penguatan posisi organisasi dalam percakapan strategis di tingkat nasional maupun global.

a means of strengthening the organisation's position in strategic conversations nationally and globally.



Policy Brief Policy Brief

PB 52 Pajak Impor yang Tinggi: Krisis Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas.

High Import Taxes, The Assistive Devices Crisis for Persons with Disabilities.

PB 53 Transformasi Perbankan Sebagai Katalisator Utama Realisasi Target Iklim Nasional.

Banking Transformation as a Key Catalyst for Realising National Climate Targets.

PB 54 Mengawal Kepentingan Indonesia dalam Negosiasi UN Tax Convention.

Safeguarding Indonesia's Interests in the UN Tax Convention Negotiations.



Judul/Contoh output terpilih
Selected Titles / Representative Outputs



Buku Book

Buku Praktis Pajak untuk edukasi dan mendorong transparansi serta partisipasi aktif wajib pajak

Practical Tax Guide to Educate Taxpayers and Promote Transparency and Active Participation.





Laporan/White Paper Reports / White Papers

- Laporan Pemeringkatan Bank 2024
- White Paper Agenda Reformasi Pajak
- Dinamika Rasio Pajak ASEAN
- White Paper Membiayai Transisi Energi Berkeadilan
- White Paper Sudah Waktunya Indonesia Mengakselerasi Program-Program Kerja Aktif.
- Bank Assessment Report 2024
- White Paper on a Tax Reform Agenda
- Tax Ratio Dynamics in ASEAN
- White Paper on Financing a Just Energy Transition
- White Paper: It Is Time for Indonesia to Accelerate Active Labour Market Programmes.



Judul/Contoh output terpilih
Selected Titles / Representative Outputs



Op-ed pilihan Selected Op-Eds

- Kemiskinan Turun, Ketimpangan Melebar.
- Poverty Declines, Inequality Widens.
- Lagu Pop Swasembada Pangan.
- The Food Self-Sufficiency Pop Song.
- Bersahabat dengan Ekonomi Serabutan.
- Making Peace with the Odd-Jobs Economy
- Health Insurance Co-payment Policy.
- Health Insurance Co-payment Policy.
- Equitable Reform Required for the Ojol Industry.
- Equitable Reform Needed for the Ojol Industry
- Nasib Lansia Setelah Bonus Demografi Berakhir.
- The Fate of Older People After the Demographic Dividend Ends.



Judul/Contoh output terpilih
Selected Titles / Representative Outputs



Highlight Publikasi Penelitian Publication Highlights

Ringkasan Publikasi Utama 2025 Summary of Major Publications, 2025

01 Laporan Penelitian Research Report

Dinamika Rasio Pajak di ASEAN Tax Ratio Dynamics in ASEAN

Sorotan Temuan Key findings

Membandingkan Indonesia, Thailand, dan Vietnam; menegaskan pentingnya reformasi administrasi, digitalisasi, dan perluasan basis pajak.

Compares Indonesia, Thailand, and Vietnam; underscores the importance of administrative reform, digitalisation, and broadening the tax base.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Memperkuat argumen reformasi fiskal berbasis pembelajaran regional dan menjadi rujukan dialog kebijakan perpajakan kawasan.

Strengthens the case for fiscal reform grounded in regional learning and serves as a reference for regional tax policy dialogue.

02 Laporan Asesmen Assessment Report

Laporan Pemeringkatan Bank 2024 Bank Ranking Report 2024

Sorotan Temuan Key findings

Menilai kebijakan bank pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; menunjukkan komitmen iklim perbankan masih rendah.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Menjadi evidence base untuk advokasi keuangan berkelanjutan dan penguatan tuntutan revisi regulasi OJK.

Assesses bank policies on environmental, social, and governance dimensions; finds banks' climate commitments still weak.

Provides an evidence base for sustainable finance advocacy and for strengthening the case for revising OJK regulations.



03 Working Paper

Program-Program Pasar Kerja Aktif (ALMP) Active Labour Market Programmes (ALMP)

Sorotan Temuan Key findings

Menyoroti fragmentasi kebijakan pasar kerja aktif, skill mismatch, dan dominasi sektor informal; menawarkan kerangka flexicurity yang adaptif.

Highlights fragmentation in active labour market policy, skills mismatch, and the dominance of the informal sector; proposes an adaptive flexicurity framework.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Mendorong pergeseran diskursus dari kebijakan ketenagakerjaan yang reaktif menuju intervensi pasar kerja yang lebih terintegrasi.

Shifts the discourse from reactive employment policy towards more integrated labour market interventions.

04 Kertas Kebijakan

Membiayai Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia Financing a Just Energy Transition in Indonesia

Sorotan Temuan Key findings

Memperluas agenda transisi energi dari isu dekarbonisasi menjadi isu pembiayaan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok terdampak.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Memperkuat posisi The PRAKARSA dan ResponsiBank dalam mengadvokasi transisi energi yang inklusif, akuntabel, dan berpihak pada komunitas rentan.

Broadens the energy transition agenda from decarbonisation to questions of financing, social justice, and protection for affected groups.

Strengthens the position of The PRAKARSA and ResponsiBank in advocating an energy transition that is inclusive, accountable, and oriented to vulnerable communities.



05 White Paper White Paper

Agenda Reformasi Pajak A Tax Reform Agenda

Sorotan Temuan Key findings

Menyusun tawaran reformasi pajak yang menekankan perluasan basis pajak, penguatan administrasi, transparansi, dan keadilan sosial.

Sets out a tax reform proposal emphasising a broader tax base, stronger administration, transparency, and social justice.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Menjadi dokumen advokasi koalisi yang menjembatani agenda teknokratis perpajakan dengan narasi pemerataan ekonomi.

Serves as a coalition advocacy document bridging the technocratic tax agenda with the narrative of economic equity.

06 Buku Praktis Practical Guide

Buku Praktis Pajak Practical Tax Handbook

Sorotan Temuan Key findings

Menyederhanakan isu perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, pelaku UMKM, koperasi, dan masyarakat luas, termasuk pengenalan CoreTax.

Simplifies tax matters for individual taxpayers, MSMEs, cooperatives, and the wider public, including an introduction to CoreTax.



Nilai Strategis / Outcome Awal Strategic Value / Early Outcomes

Memperluas literasi pajak publik serta memperkuat mandat The PRAKARSA dalam demokratisasi pengetahuan kebijakan fiskal.

Broadens public tax literacy and strengthens The PRAKARSA's mandate to democratise fiscal policy knowledge.

● **Dinamika Rasio Pajak di ASEAN: Studi Kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam** ● Tax Ratio Dynamics in ASEAN: Case Studies of Indonesia, Thailand and Vietnam



Penelitian ini membandingkan rasio pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, dengan menyoroti reformasi administrasi, digitalisasi, dan perluasan basis pajak. Vietnam relatif berhasil memperkuat rasio pajak, Thailand menonjol dalam digitalisasi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas basis pajak dan memperkuat tata kelola.

This study compares tax ratios in Indonesia, Thailand, and Vietnam, highlighting administrative reform, digitalization, and tax base expansion. Vietnam has relatively strengthened its tax ratio, Thailand stands out in digitalization, while Indonesia continues to face challenges in broadening its tax base and strengthening governance.

Laporan penelitian ini memberikan pembacaan komparatif mengenai perkembangan rasio pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam dengan menempatkan rasio pajak sebagai indikator kapasitas fiskal, efektivitas administrasi perpajakan, dan kemampuan negara mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Vietnam relatif berhasil memperkuat rasio pajak melalui reformasi administrasi dan perluasan basis pajak, Thailand menonjol dalam reformasi pajak penghasilan orang pribadi serta digitalisasi sistem, sementara Indonesia menunjukkan kemajuan kepatuhan namun masih menghadapi keterbatasan dalam perluasan basis pajak. Bagi The The PRAKARSA, publikasi ini penting karena menyediakan dasar analitis yang kuat untuk mendorong agenda reformasi fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan, perluasan basis penerimaan, dan peningkatan kualitas tata kelola perpajakan di Indonesia.

This research report offers a comparative reading of tax ratio trends in Indonesia, Thailand, and Vietnam, treating the tax ratio as an indicator of fiscal capacity, the effectiveness of tax administration, and the state's ability to support more inclusive development. Its principal findings show that Vietnam has been relatively successful in strengthening its tax ratio through administrative reform and base broadening; Thailand stands out for its personal income tax reform and system digitalisation; while Indonesia has made progress on compliance but continues to face constraints in broadening its tax base. For The PRAKARSA, this publication matters because it provides a robust analytical basis for advancing a fiscal reform agenda oriented towards fairness, a broader revenue base, and better tax governance in Indonesia.



Laporan Pemeringkatan Bank 2024: Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Bank Assessment Report 2024: An Analysis of Progress in Bank Policy on Sustainable Finance



Laporan ini menilai kemajuan kebijakan perbankan dalam menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Temuan menunjukkan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan masih beragam, menegaskan perlunya standar, transparansi, dan pembiayaan yang lebih selaras dengan target iklim nasional.

This report assesses banks' progress in applying environmental, social, and governance principles. Findings show varied commitment to sustainable finance, highlighting the need for stronger standards, transparency, and financing aligned with national climate targets.

Laporan ini menelaah kemajuan kebijakan perbankan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam praktik pembiayaan dan investasi. Penilaian terhadap sejumlah bank besar menunjukkan bahwa sektor perbankan telah mulai bergerak ke arah keuangan berkelanjutan, namun tingkat komitmen dan kedalaman kebijakannya masih sangat beragam. Publikasi ini memiliki nilai strategis karena menyediakan evidence base untuk dialog kebijakan dengan regulator, lembaga keuangan, dan jejaring masyarakat sipil mengenai perlunya standar yang lebih kuat, transparansi yang lebih tinggi, serta orientasi pembiayaan yang lebih konsisten dengan target iklim nasional dan prinsip keberlanjutan.

This report examines progress in banking policy on integrating environmental, social, and governance considerations into financing and investment practice. Assessment of a number of major banks shows that the sector has begun to move towards sustainable finance, but that the level of commitment and the depth of policy vary considerably. The publication has strategic value in providing an evidence base for policy dialogue with regulators, financial institutions, and civil society networks on the need for stronger standards, greater transparency, and a financing orientation more consistent with national climate targets and sustainability principles.



Sudah Waktunya Indonesia Mengakselerasi Program-Program Pasar Kerja Aktif (ALMP) It Is Time for Indonesia to Accelerate Active Labour Market Programmes (ALMP)



Working paper ini menyoroti urgensi percepatan kebijakan pasar kerja aktif di tengah persoalan struktural seperti dominasi sektor informal, kesenjangan keterampilan, dan lemahnya keterhubungan pelatihan dengan kebutuhan industri. Publikasi ini menekankan pentingnya kerangka ALMP yang lebih terintegrasi, pendanaan berkelanjutan, keterlibatan industri, serta pendekatan flexicurity yang adaptif.

This working paper highlights the urgency of accelerating active labour market policies amid structural challenges, including informal employment, skills gaps, and weak links between training and industry needs. It emphasizes the importance of a more integrated ALMP framework, sustainable funding, industry engagement, and an adaptive flexicurity approach.

Working paper ini menyoroti urgensi percepatan kebijakan pasar kerja aktif di Indonesia di tengah menurunnya tingkat pengangguran terbuka namun masih kuatnya persoalan struktural, seperti dominasi sektor informal, kesenjangan keterampilan, dan lemahnya keterhubungan antara pelatihan dengan kebutuhan industri. Melalui telaah atas praktik nasional dan pembelajaran internasional, publikasi ini menekankan pentingnya kerangka ALMP yang lebih terintegrasi, didukung pendanaan berkelanjutan, dan melibatkan industri secara lebih sistematis. Nilai strategis publikasi ini terletak pada kemampuannya menerjemahkan isu pasar kerja ke dalam agenda kebijakan yang operasional, termasuk penguatan layanan pasar kerja, reformasi skema pelatihan, pembentukan Sector Skills Council, pengembangan Skill Development Fund, dan penerapan pendekatan flexicurity yang adaptif.

This working paper highlights the urgency of accelerating active labour market policy in Indonesia at a time when open unemployment is falling but structural problems persist, the dominance of the informal sector, skills gaps, and weak linkages between training and industry needs. Drawing on national practice and international lessons, the paper underlines the importance of a more integrated ALMP framework, supported by sustainable financing and more systematic industry involvement. Its strategic value lies in translating labour market issues into an operational policy agenda, including strengthening employment services, reforming training schemes, establishing Sector Skills Councils, developing a Skills Development Fund, and applying an adaptive flexicurity approach.



Membiayai Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

Financing a Just Energy Transition in Indonesia: Analysis and Policy Recommendations



Kertas kebijakan ini memperluas agenda transisi energi dari pengurangan emisi menuju pembiayaan yang berkeadilan bagi pekerja, kelompok rentan, dan komunitas terdampak. Publikasi ini memetakan pembiayaan iklim dan memperkuat advokasi The PRAKARSA dan Koalisi ResponsiBank Indonesia untuk transisi energi yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

This policy paper broadens the energy transition agenda from emissions reduction to equitable financing for workers, vulnerable groups, and affected communities. It maps climate finance and strengthens The PRAKARSA and ResponsiBank Indonesia Coalition's advocacy for an accountable, inclusive, and sustainable energy transition.

Kertas kebijakan ini memperluas diskursus transisi energi dari semata agenda pengurangan emisi menjadi agenda pembiayaan yang harus menjamin keadilan bagi pekerja, kelompok rentan, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, serta komunitas yang terdampak oleh perubahan struktur energi. Publikasi ini memetakan lanskap pembiayaan iklim di Indonesia, menelaah berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, dan menekankan perlunya integrasi prinsip keadilan dalam desain kebijakan transisi energi. Secara kelembagaan, publikasi ini memperkuat posisi The PRAKARSA dan Koalisi ResponsiBank Indonesia dalam advokasi pembiayaan transisi energi yang lebih akuntabel, inklusif, dan selaras dengan kepentingan sosial-ekologis jangka panjang.

This policy paper broadens the energy transition discourse from a purely emissions-reduction agenda to a financing agenda that must guarantee justice for workers, vulnerable groups, Indigenous peoples, women, persons with disabilities, and communities affected by changes in the energy structure. The publication maps Indonesia's climate finance landscape, examines a range of sustainable finance instruments, and stresses the need to embed justice principles in the design of energy transition policy. Institutionally, it strengthens the position of The PRAKARSA and the ResponsiBank Indonesia Coalition in advocating for energy transition financing that is more accountable, more inclusive, and aligned with long-term socio-ecological interests.



Agenda Reformasi Pajak: Jalan Menuju Keadilan Pajak dan Pemerataan Ekonomi

A Tax Reform Agenda: Towards Tax Justice and Economic Equity



White paper ini menawarkan strategi reformasi perpajakan untuk memperkuat pemerataan ekonomi, memperluas ruang fiskal, dan meningkatkan legitimasi sistem perpajakan. Dokumen ini mengulas tantangan kebijakan dan administrasi perpajakan serta strategi reformasi yang berkeadilan, sekaligus memperkuat advokasi The PRAKARSA dalam mendorong reformasi pajak yang lebih inklusif

This white paper proposes a strategic tax reform agenda to strengthen economic equity, expand fiscal space, and enhance the legitimacy of the tax system. It examines key policy and administrative challenges while strengthening The PRAKARSA's advocacy for a fairer and more inclusive tax reform agenda.

White paper ini disusun sebagai tawaran strategis untuk memperkuat agenda reformasi perpajakan Indonesia agar lebih mampu mendukung pemerataan ekonomi, memperluas ruang fiskal, dan meningkatkan legitimasi sistem perpajakan. Dokumen ini mengulas tantangan utama dalam kebijakan dan administrasi perpajakan, prinsip-prinsip reformasi yang berpihak pada keadilan ekonomi dan sosial, serta strategi implementasi yang dapat ditempuh pemerintah. Bagi The PRAKARSA, publikasi ini berfungsi sebagai dokumen advokasi tingkat tinggi yang memperkuat konsolidasi pesan dalam jejaring reformasi pajak dan menyediakan kerangka reformasi yang komunikatif untuk pemangku kepentingan pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

This white paper was developed as a strategic proposal to strengthen Indonesia's tax reform agenda so that it can better support economic equity, expand fiscal space, and enhance the legitimacy of the tax system. The document reviews the principal challenges in tax policy and administration, sets out reform principles grounded in economic and social justice, and outlines implementation strategies open to the government. For The PRAKARSA, the publication functions as a high-level advocacy document that consolidates messaging across tax reform networks and provides a communicable reform framework for stakeholders in government, parliament, the private sector, and civil society.



Buku Praktis Pajak

Practical Tax Handbook



Buku Praktis Pajak berperan sebagai panduan edukatif yang menyederhanakan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, pelaku UMKM, dan koperasi. Buku ini mencakup jenis dan kewajiban pajak, pelaporan, serta pengenalan CoreTax, sekaligus memperluas peran The PRAKARSA dalam meningkatkan literasi dan pemahaman publik mengenai tata kelola perpajakan.

The Practical Tax Guide provides an accessible introduction to taxation for individual taxpayers, MSMEs, and cooperatives. Covering tax types, obligations, reporting, and CoreTax, the guide expands The PRAKARSA's role in strengthening public tax literacy and understanding of tax governance.

Berbeda dari publikasi yang bersifat analitis dan advokatif, Buku Praktis Pajak mengambil peran edukatif dengan menyederhanakan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, pelaku usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Isi buku mencakup pengenalan jenis pajak, kewajiban perpajakan, mekanisme pelaporan, pengenalan sistem administrasi CoreTax, hingga panduan praktis yang aplikatif. Kehadiran buku ini penting karena memperluas jangkauan pengaruh The PRAKARSA dari arena advokasi kebijakan menuju penguatan literasi publik, sehingga agenda reformasi pajak juga ditopang oleh peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, kewajiban, dan tata kelola perpajakan.

Unlike our analytical and advocacy-oriented publications, the Practical Tax Handbook takes an educational role, simplifying tax knowledge for the public — particularly individual taxpayers, small and medium enterprises, and cooperatives. The book covers types of tax, tax obligations, reporting mechanisms, an introduction to the CoreTax administration system, and practical, applied guidance. Its significance lies in extending The PRAKARSA's reach from the arena of policy advocacy into public literacy, so that the tax reform agenda is also underpinned by greater public understanding of the function, obligations, and governance of taxation.



Highlight Policy Brief Policy Brief Highlights

Tiga policy brief utama yang diterbitkan pada 2025 memperlihatkan fokus organisasi pada isu-isu kebijakan yang spesifik, relevan, dan memiliki implikasi langsung terhadap agenda keadilan sosial-ekonomi. Ketiganya menautkan analisis teknis dengan rekomendasi kebijakan yang jelas, sehingga dapat digunakan dalam dialog dengan regulator, kementerian, parlemen, maupun jejaring masyarakat sipil.

The three principal policy briefs published in 2025 demonstrate the organisation's focus on policy issues that are specific, timely, and directly consequential for the socio-economic justice agenda. Each links technical analysis to clear policy recommendations, making them usable in dialogue with regulators, ministries, parliament, and civil society networks.



Isu Inti Core issue



Pajak impor alat bantu disabilitas

Import taxes on assistive devices

Pesan Kunci Key Message

Menunjukkan bahwa klasifikasi alat bantu sebagai barang mewah, pajak tinggi, dan prosedur bea cukai yang rumit memperburuk eksklusi sosial penyandang disabilitas.

Shows that classifying assistive devices as luxury goods, high taxation, and complex customs procedures deepen the social exclusion of persons with disabilities.

Arah Dampak/ Penggunaan Direction of impact / use

Mendorong pembebasan bea masuk dan PPN, penyederhanaan prosedur, serta dukungan bagi produsen lokal.

Calls for exemption from import duty and VAT, simplified procedures, and support for domestic producers.



PB
52



Isu Inti
Core issue

Perbankan dan Target Iklim Nasional

Banking and national climate targets

Pesan Kunci
Key Message

Menegaskan adanya gap besar antara kebutuhan pembiayaan iklim nasional dan komitmen sektor perbankan, dengan skor rata-rata aspek iklim yang masih sangat rendah.

Underlines the substantial gap between national climate finance needs and the banking sector's commitments, with average scores on climate dimensions still very low.

Arah Dampak/ Penggunaan
Direction of impact / use

Menguatkan dorongan revisi POJK 51/2017 dan agenda transformasi bank sebagai katalis pembiayaan berkelanjutan.

Reinforces the case for revising OJK Regulation 51/2017 and for transforming banks into catalysts for sustainable finance.


Isu Inti
Core issue

Posisi Indonesia dalam UN Tax Convention

Indonesia's position in the UN Tax Convention

Pesan Kunci
Key Message

Menempatkan negosiasi pajak global sebagai isu ruang fiskal nasional, keadilan pajak internasional, dan kepentingan negara berkembang.

Frames global tax negotiations as a matter of national fiscal space, international tax justice, and the interests of developing countries.

Arah Dampak/ Penggunaan
Direction of impact / use

Memperkuat posisi advokasi The PRAKARSA dalam mendorong peran Indonesia yang lebih proaktif di forum perpajakan global.

Strengthens The PRAKARSA's advocacy position in pressing for a more proactive Indonesian role in global tax forums.





Pajak Impor yang Tinggi: Krisis Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia

High Import Taxes: The Assistive Devices Crisis for Persons with Disabilities in Indonesia



Policy brief ini menyoroti hambatan struktural dalam akses alat bantu bagi penyandang disabilitas, terutama akibat tingginya biaya impor, terbatasnya produksi domestik, serta kebijakan perpajakan dan kepabeanan yang belum sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. The PRAKARSA menunjukkan bahwa klasifikasi sebagian alat bantu sebagai barang mewah dan prosedur bea cukai yang rumit turut memperbesar beban finansial, memperlambat distribusi, dan memperdalam eksklusi sosial. Melalui brief ini, organisasi mendorong reformasi regulasi berupa pembebasan pajak atas alat bantu, penyederhanaan prosedur kepabeanan, pemberian insentif bagi produsen lokal, dan penguatan koordinasi antarlembaga agar akses terhadap teknologi bantuan dapat diperlakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar.

This policy brief highlights the structural barriers to accessing assistive devices for persons with disabilities, driven primarily by high import costs, limited domestic production, and tax and customs policies that are not yet sensitive to the needs of vulnerable groups. The PRAKARSA shows that classifying certain assistive devices as luxury goods, together with complex customs procedures, increases the financial burden, slows distribution, and deepens social exclusion. Through this brief, the organisation calls for regulatory reform in the form of tax exemptions on assistive devices, simplified customs procedures, incentives for domestic producers, and stronger inter-agency coordination, so that access to assistive technology is treated as part of the fulfilment of fundamental rights.





Transformasi Perbankan sebagai Katalisator Utama Realisasi Target Iklim Nasional TBanking Transformation as a Key Catalyst for Realising National Climate Targets



Policy brief ini memanfaatkan temuan asesmen sektor perbankan untuk menyoroti kesenjangan besar antara kebutuhan pembiayaan iklim nasional dan komitmen lembaga keuangan. Dengan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar dan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas, sektor perbankan seharusnya memainkan peran yang lebih signifikan. Namun, hasil penilaian menunjukkan bahwa komitmen bank pada aspek perubahan iklim masih rendah. Karena itu, brief ini menekankan perlunya penguatan kebijakan regulator, khususnya melalui revisi POJK 51/2017 agar lebih berorientasi pada kepatuhan, termasuk penetapan porsi pembiayaan berkelanjutan, penyediaan insentif dan sanksi yang lebih efektif, serta penguatan standar tata kelola pembiayaan hijau.

This policy brief draws on findings from our banking sector assessment to highlight the substantial gap between national climate finance needs and the commitments of financial institutions. Given the scale of climate finance required and the limits of government fiscal capacity, the banking sector ought to play a far more significant role. Yet our assessment shows that banks' commitments on climate change remain weak. The brief therefore stresses the need to strengthen regulatory policy, particularly by revising OJK Regulation 51/2017 to make it more compliance-oriented including setting a minimum share of sustainable financing, providing more effective incentives and sanctions, and strengthening governance standards for green finance.





Mengawal Kepentingan Indonesia dalam Negosiasi UN Tax Convention Safeguarding Indonesia's Interests in the UN Tax Convention Negotiations



Policy brief ini menempatkan isu perpajakan global dalam kaitannya dengan ruang fiskal nasional dan kepentingan negara berkembang. The PRAKARSA menegaskan bahwa rendahnya rasio pajak, keterbatasan akses data lintas negara, lemahnya transparansi beneficial ownership, serta tingginya risiko penghindaran pajak lintas yurisdiksi menuntut posisi Indonesia yang lebih proaktif dalam proses negosiasi UN Tax Convention. Brief ini merekomendasikan agar Indonesia memimpin konsolidasi posisi Asia, memperkuat agenda strategis nasional dalam forum global, meningkatkan transparansi lintas negara, dan menolak mekanisme penyelesaian sengketa yang berpotensi merugikan negara berkembang. Dengan demikian, publikasi ini menegaskan hubungan erat antara diplomasi pajak global dengan upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di dalam negeri.

This policy brief situates global tax issues in relation to national fiscal space and the interests of developing countries. The PRAKARSA argues that a low tax ratio, limited access to cross-border data, weak beneficial ownership transparency, and high risks of cross-jurisdictional tax avoidance all demand a more proactive Indonesian position in the UN Tax Convention negotiations. The brief recommends that Indonesia lead the consolidation of an Asian position, advance a strategic national agenda in global forums, improve cross-border transparency, and reject dispute settlement mechanisms that could disadvantage developing countries. In doing so, the publication underscores the close link between global tax diplomacy and efforts to strengthen domestic development financing capacity.





Secara keseluruhan, publikasi penelitian dan policy brief tahun 2025 menunjukkan bahwa produksi pengetahuan The PRAKARSA semakin terarah pada penciptaan nilai kebijakan yang nyata. Setiap publikasi tidak hanya mendokumentasikan persoalan, tetapi juga mengidentifikasi bottleneck tata kelola, menawarkan opsi kebijakan, dan menyediakan kerangka argumentasi yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dan mitra advokasi. Pola ini mempertegas posisi The PRAKARSA sebagai think-and-do tank yang menghubungkan penelitian, advokasi, dan pengaruh kebijakan secara konsisten.

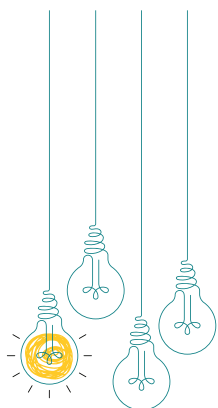
Taken together, our research publications and policy briefs in 2025 show that The PRAKARSA's knowledge production is increasingly geared towards creating tangible policy value. Each publication not only documents a problem but also identifies governance bottlenecks, offers policy options, and provides an argumentative framework that decision-makers and advocacy partners can use. This pattern reinforces The PRAKARSA's position as a think-and-do tank that consistently connects research, advocacy, and policy influence.

Media Engagement

Media Engagement



Opini Publik di Media Mainstream Op-eds in Mainstream Media



Opini di media arus utama merupakan bagian penting dari strategi amplifikasi gagasan The PRAKARSA. Melalui tulisan-tulisan opini, temuan riset dan posisi kebijakan organisasi diterjemahkan ke dalam argumen publik yang lebih mudah diakses, relevan dengan momentum, dan mampu memperluas jangkauan advokasi ke ruang debat yang lebih luas.

Op-eds in mainstream media are an important part of The PRAKARSA's strategy for amplifying ideas. Through opinion writing, our research findings and policy positions are translated into public arguments that are more accessible, tied to the moment, and able to extend our advocacy into wider spaces of debate.



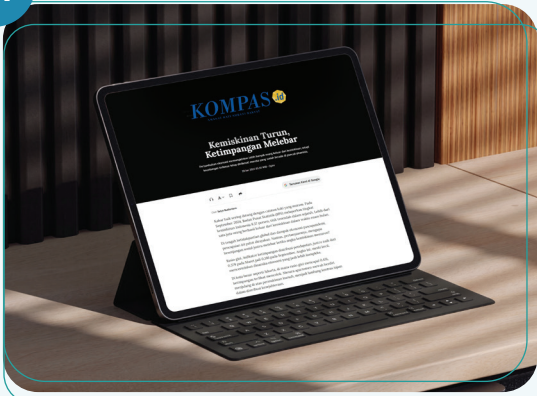
Untuk menjaga penyajian tetap informatif namun ringkas, portofolio opini tahun 2025 disajikan dalam format tabel yang memadukan konteks publikasi, pokok ulasan, dan nilai strategis masing-masing tulisan tanpa dipisahkan berdasarkan fokus isu.

To keep the presentation informative but concise, our 2025 op-ed portfolio is set out below in a table combining publication context, the substance of each piece, and its strategic value, without separating them by thematic focus.

01

28 Januari 2025 January 28, 2025

KOMPAS.id



Oleh Setyo Budiantoro
By Setyo Budiantoro

Kemiskinan Turun, Ketimpangan Melebar Poverty Falls, Inequality Widens

Menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak otomatis mencerminkan perbaikan kesejahteraan apabila ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi tetap melebar.

Argues that falling poverty figures do not automatically reflect improved wellbeing if the distribution of income and access to economic opportunity continues to widen.

02

4 Februari 2025 February 4, 2025

TEMPO



Oleh Ah Maftuchan
By Ah Maftuchan

Lagu Pop Swasembada Pangan The Food Self-Sufficiency Pop Song

Mengkritisi kecenderungan swasembada pangan yang berulang sebagai slogan politik, tanpa pembenahan menyeluruh pada produktivitas, tata kelola lahan, distribusi, dan kesejahteraan petani.

Critiques the recurrent invocation of food self-sufficiency as a political slogan, unaccompanied by comprehensive reform of productivity, land governance, distribution, and farmer welfare.

03

9 Juni 2025 June 9, 2025

ASIA TIMES



Oleh Setyo Budiantoro
By Setyo Budiantoro

If The World Could Just Be As Happy and Well As Indonesia If The World Could Just Be As Happy and Well As Indonesia

Mengangkat temuan bahwa kemajuan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari dimensi flourishing, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.

Draws on findings that progress cannot be measured by economic growth alone, but also by flourishing, wellbeing, and quality of life.

04

24 Juni 2025 June 24, 2025

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

Oleh Setyo Budiantoro
By Setyo Budiantoro

Bersahabat dengan Ekonomi Serabutan Making Peace with the Odd-Jobs Economy

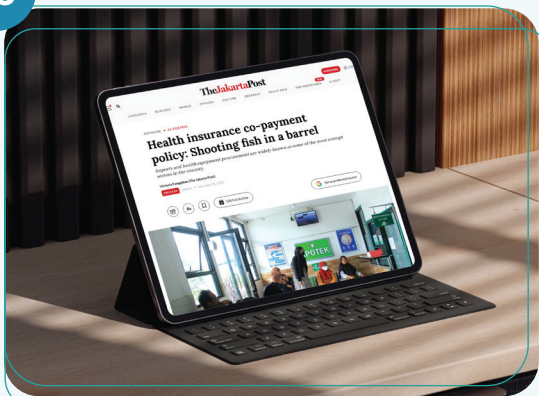
Menyoroti realitas pekerja dalam ekonomi serabutan yang kerap dipandang informal dan residual, padahal menopang kehidupan ekonomi kota dan rumah tangga miskin.

Examines the reality of workers in the odd-jobs economy, often seen as informal and residual despite sustaining urban economic life and poor households.

05

30 Juni 2025 June 30, 2025

TheJakartaPost


Oleh Victoria Faggidae
By Victoria Faggidae

Health Insurance Co-payment Policy: Shooting Fish in a Barrel Health Insurance Co-payment Policy: Shooting Fish in a Barrel

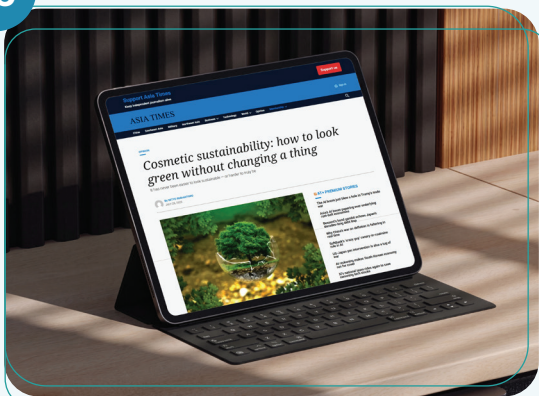
Mengkritik kebijakan co-payment layanan kesehatan sebagai instrumen pengendalian biaya yang keliru karena berpotensi membebani kelompok rentan dan melemahkan prinsip keadilan dalam JKN.

Criticises health service co-payments as a misdirected cost-control instrument that risks burdening vulnerable groups and eroding the principle of equity in the national health insurance scheme.

06

25 Juli 2025 July 25, 2025

ASIA TIMES


Oleh Setyo Budiantoro
By Setyo Budiantoro

Cosmetic Sustainability: How to Look Green Without Changing a Thing Cosmetic Sustainability: How to Look Green Without Changing a Thing

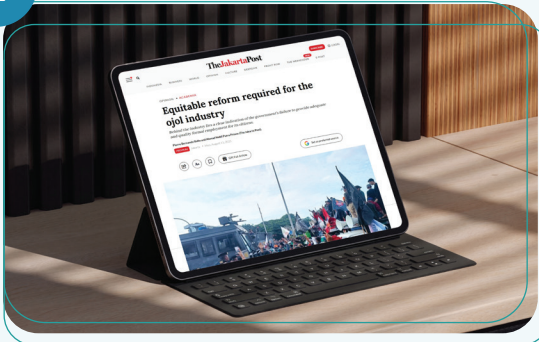
Membahas kecenderungan greenwashing dan praktik keberlanjutan yang bersifat kosmetik, ketika institusi mengadopsi bahasa hijau tanpa mengubah struktur pembiayaan dan operasi secara substantif.

Examines greenwashing and cosmetic sustainability practices, where institutions adopt green language without substantively changing their financing structures or operations.

07

13 Agustus 2025 August 13, 2025

TheJakartaPost



Oleh Pierre Bernando Ballo & Ahmad Nabil Putra Priono

By Pierre Bernando Ballo & Ahmad Nabil Putra Priono

Equitable Reform Required for The Ojol Industry Equitable Reform Required for The Ojol Industry

Menyoroti perlunya reformasi yang lebih adil bagi industri ride-hailing dengan menempatkan pengemudi sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar pelengkap ekosistem platform digital.

Argues for fairer reform of the ride-hailing industry, treating drivers as subjects of policy rather than an adjunct to the digital platform ecosystem.

08

29 Agustus 2025 August 29, 2025

Tribunnews.com



Oleh Setyo Budiantoro
By Setyo Budiantoro

Indonesia Berlayar dengan Dua Mata Terbuka Indonesia Sails with Both Eyes Open

Menggambarkan pentingnya arah pembangunan yang mampu melihat peluang industrialisasi dan transisi hijau secara bersamaan, seraya tetap menjaga kualitas institusi dan orientasi keadilan.

Describes the importance of a development direction able to see the opportunities of industrialisation and the green transition simultaneously, while maintaining institutional quality and an orientation towards justice.

09

4 September 2025 September 4, 2025

TEMPO



Oleh Ari Wibowo
By Ari Wibowo

Nasionalisme Warga Pati dalam Demonstrasi Tolak Kenaikan Pajak The Nationalism of Pati's Citizens in Protests Against Tax Increases

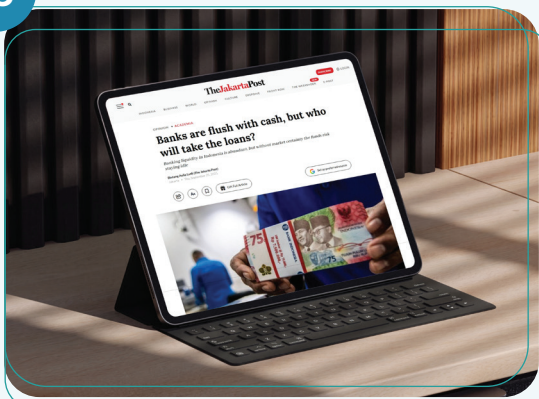
Membaca aksi warga Pati sebagai ekspresi solidaritas dan rasa keadilan yang terluka, serta pengingat bahwa kebijakan fiskal perlu sensitif terhadap beban sosial yang nyata di masyarakat.

Reads the protests in Pati as an expression of solidarity and a wounded sense of fairness, and as a reminder that fiscal policy must be sensitive to the real social burdens it creates.

10

26 September 2025 September 26, 2025

TheJakartaPost


Oleh Bintang Aulia Lutfi
By Bintang Aulia Lutfi

Banks Are Flush with Cash, But Who Will Take The Loans?

Banks Are Flush with Cash, But Who Will Take The Loans?

Menjelaskan bahwa likuiditas perbankan yang tinggi belum otomatis mendorong penyaluran kredit apabila kepastian pasar lemah; karenanya pembiayaan perlu diarahkan ke sektor produktif.

Explains that high banking liquidity does not automatically drive lending where market certainty is weak, and argues that financing should therefore be directed towards productive sectors.

11

3 Oktober 2025 October 3, 2025

Dkatadata


Oleh Pierre Bernando Ballo
By Pierre Bernando Ballo

Nasib Lansia Setelah Bonus Demografi Berakhir

The Fate of Older People After the Demographic Dividend Ends

Mengulas kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat menua, termasuk tantangan layanan perawatan, jaminan sosial, dan kebutuhan kebijakan yang lebih ramah lansia.

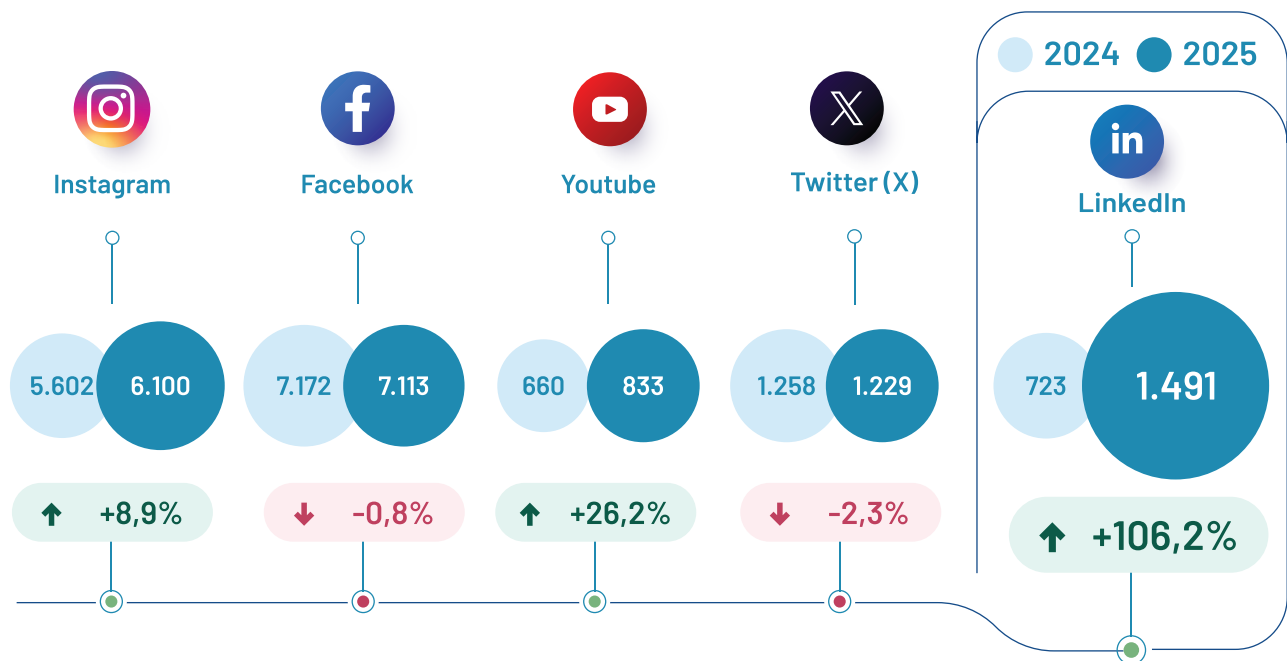
Reviews Indonesia's readiness for an ageing society, including challenges in care services, social security, and the need for more age-friendly policy.



Kampanye Media Sosial Social Media Campaigns

Kinerja media sosial sepanjang 2025 memperlihatkan pertumbuhan yang positif pada beberapa kanal utama, khususnya Instagram, YouTube, dan terutama LinkedIn. Di sisi lain, Facebook dan Twitter/X menunjukkan stagnasi atau sedikit penurunan, yang mengisyaratkan perlunya strategi platform yang lebih terarah.

Social media performance over 2025 showed positive growth on several key channels, particularly Instagram, YouTube, and above all LinkedIn. Facebook and Twitter/X, by contrast, were stagnant or slightly down, suggesting the need for a more targeted platform strategy.



Sementara itu, sepanjang tahun 2025, kami memproduksi 4 episode Podcast yang diisi oleh para narasumber ahli di bidangnya. Podcast sepanjang tahun 2025 mengangkat tema-tema pada isu transisi energi, rantai pasok, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan sosial pekerja. Adapun total podcast berhasil mencatatkan views sebanyak 705 penonton.

Over the course of 2025 we also produced four podcast episodes featuring expert guests. The 2025 podcast series covered energy transition, supply chains, sustainable finance, and social protection for workers, recording a total of 705 views.





Episode Podcast 2025
Podcast Episodes 2025

Episode 18



Transisi Energi
Energy Transition

Trump Comeback: Apa Kabar
Transisi Energi Indonesia?

Trump Comeback: What
Next for Indonesia's Energy
Transition?



Putra Adhiguna
(Managing
Director, Energy
Shift Institute)



Episode 19



**Rantai Pasok &
Logistik**
Supply Chains &
Logistics

Tantangan dan Peluang Dunia
Logistik pada Ketidakpastian
Masa Depan

Challenges and Opportunities
in Logistics Amid an
Uncertain Future



**Sriyono B.
Soebianto**
(CEO & Co-
Founder PT Mats
International
Indonesia)



Episode 20



**Kuangan
Berkelanjutan**
Sustainable
Finance

Pentingnya Keuangan Berke-
lanjutan Bagi Perempuan

Why Sustainable Finance
Matters for Women



Dia Mawesti
(Project Manager
FFA, Oxfam in
Indonesia)



Episode 21



**Perlindungan
Sosial**
Social
Protection

Bagaimana Kondisi Perlind-
ungan Sosial Bagi Pekerja di
Indonesia?

The State of Social Protec-
tion for Workers in Indonesia

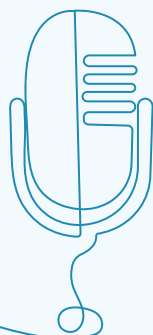


Ippei Tsuruga
(Social Protection
Programme
Manager for
Indonesia, ILO)



705

Total View
Total Podcast View



Melalui podcast, kami membuka ruang
percakapan yang lebih inklusif tentang isu-isu
penting bagi masa depan yang lebih adil dan
berkelanjutan.

Through our podcast, we create a more inclusive
space for dialogue on key issues toward a fairer
and more sustainable future.

Unit Usaha dan Layanan Pengetahuan

Business Unit and Capacity Development Services



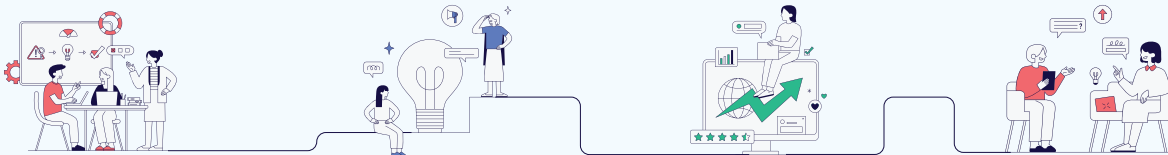
Pada 2025, penguatan reputasi kelembagaan The PRAKARSA tidak hanya terlihat dari meningkatnya permintaan kolaborasi programatik, tetapi juga dari menguatnya permintaan terhadap jasa pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang berbasis pada kompetensi inti organisasi. Arah ini penting karena menandai pergeseran bertahap dari ketergantungan tunggal pada pembiayaan hibah menuju model keberlanjutan yang mulai memadukan kerja-kerja advokasi berbasis donor dengan layanan pengetahuan yang relevan, teruji, dan dibutuhkan oleh mitra eksternal.

In 2025, the strengthening of The PRAKARSA's institutional reputation was evident not only in growing demand for programmatic collaboration, but also in rising demand for learning, training, and capacity development services grounded in the organisation's core competencies. This direction matters because it signals a gradual shift away from sole dependence on grant financing towards a sustainability model that combines donor-funded advocacy work with knowledge services that are relevant, tested, and needed by external partners.



Highlight Kegiatan Unit Bisnis dan Layanan Pembelajaran 2025

Highlights: Business Unit and Learning Services 2025



Kegiatan
Activity



Mitra/Klien
Partner/Client



Waktu & Lokasi
Date & Location



Peserta/Sasaran
Participants



Nilai Strategis
Strategic Value

01

Analisis Kebijakan & Policy Brief Batch 5

Policy Analysis & Policy Brief Writing, Batch 5

Open for Public

Open for Public

11 Maret & 18 Maret 2025, Online

11 & 18 March 2025, online

Akademik. Private sector, NGO/CSO

Academia, private sector, NGOs/CSOs

Memperkuat kapasitas peserta sebagai posisi pembuat kebijakan dalam lingkup pekerjaannya

Strengthens participants' capacity to act in a policymaking role within their own work



02

IHT Analisis Kebijakan & Policy Brief Batch 1

IHT Policy Analysis & Policy Brief Writing, Batch 1

Kemensos RI, LPPSP/Puska Kesos FISIP UI, OXFAM

Ministry of Social Affairs, LPPSP/Puska Kesos FISIP UI, Oxfam

6–8 Oktober 2025, Depok

6–8 October 2025, Depok

30 pekerja sosial/ penyuluh sosial dari regional Padang dan Bandung

30 social workers / social welfare extension officers from the Padang and Bandung regions

Memperkenalkan policy brief sebagai alat kerja kebijakan bagi lini sosial pemerintah

Introduces the policy brief as a working tool for the government's social welfare workforce



03

IHT Analisis Kebijakan & Policy Brief Batch 2

IHT on Policy Analysis & Policy Brief Writing, Batch 2

Kemensos RI, LPPSP/Puska Kesos FISIP UI, OXFAM

Ministry of Social Affairs, LPPSP/Puska Kesos FISIP UI, Oxfam

28–31 Oktober 2025

28–31 October 2025

30 pekerja sosial/ penyuluh sosial dari regional Banjarmasin dan Yogyakarta

30 social workers / social welfare extension officers from the Banjarmasin and Yogyakarta regions

Memperluas jangkauan layanan ke regional lain dan menguji replikasi modul

Extends the service to other regions and tests the replicability of the module



04

**IHT Analisis
Kebijakan &
Policy Brief
Batch 3**

IHT on Policy
Analysis &
Policy Brief
Writing,
Batch 3

Kemensos RI,
LPPSP/Puska
Kesos FISIP
UI, OXFAM

Ministry of
Social Affairs,
LPPSP/Puska
Kesos FISIP
UI, Oxfam

16-20
November
2025, Jakarta
Selatan

16-20
November
2025, South
Jakarta

30 pekerja sosial/
penyuluh sosial
dari dari BBPPKS
Makassar dan
Papua

30 social workers
/ social welfare
extension officers
from BBPPKS
Makassar and
Papua

Menguatkan standard-
isasi metode dan mem-
perluas cakupan nasional

Strengthens method-
ological standardisation
and extends national
coverage



05

Policy Advocacy Capability Training

Policy Advocacy Capability Training

DFAT / Australian Embassy Jakarta

DFAT / Australian Embassy Jakarta

27 November 2025, Jakarta

27 November 2025, Jakarta

Staf lokal DFAT / Australian Embassy

Locally engaged staff, DFAT / Australian Embassy

Memperkuat reputasi The PRAKARSA untuk layanan kebijakan bagi mitra pembangunan internasional

Strengthens The PRAKARSA's reputation for policy services to international development partners

06

Pelatihan Analisis Kebijakan untuk Serikat & Pengemudi Online

Policy Analysis Training for Unions and Online Drivers

YFAS, F-GSBM, SePOI

YFAS, F-GSBM, SePOI

11 Desember 2025

11 December 2025

20 perwakilan OMS, serikat buruh, dan pengemudi online

20 representatives of CSOs, trade unions, and online drivers

Membuktikan adaptabilitas modul untuk basis gerakan sosial dan advokasi berbasis komunitas

Demonstrates the module's adaptability for social movements and community-based advocacy



Portofolio kegiatan unit bisnis yang paling menonjol pada 2025 adalah rangkaian In-House Training Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief yang diselenggarakan bersama LPPSP/Puska Kesos FISIP Universitas Indonesia untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan dukungan OXFAM di Indonesia. Pelatihan ini dilaksanakan dalam tiga batch terpisah dan menasar pejabat fungsional pekerja sosial serta penyuluh sosial dari berbagai regional BBPPKS dan sentra Kemensos. Batch 1 di Depok pada 6–8 Oktober 2025 melibatkan 30 peserta, Batch 2 pada 28–31 Oktober 2025 memperluas jangkauan ke regional Banjarmasin dan Yogyakarta, dan Batch 3 pada 16–20 November 2025 di Jakarta Selatan melibatkan 30 peserta dari wilayah Makassar dan Papua. Dengan demikian, The PRAKARSA tidak hanya hadir sebagai lembaga riset yang menghasilkan pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra peningkatan kapasitas birokrasi sosial yang membantu menerjemahkan pengalaman lapangan menjadi analisis kebijakan yang lebih sistematis, tajam, dan dapat ditindaklanjuti.

Substansi pelatihan tersebut mencerminkan kekuatan khas The PRAKARSA: menghubungkan riset, analisis kebijakan, komunikasi kebijakan, dan strategi advokasi dalam satu paket pembelajaran yang aplikatif. Peserta tidak hanya dibekali pengantar evidence-based policy making, tetapi juga latihan pemetaan aktor, komunikasi kebijakan, penggunaan alat seperti Mendelow Matrix dan Social Network Analysis, serta praktik penyusunan policy brief yang memuat rumusan masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi yang operasional. Model pembelajaran seperti ini memperkuat posisi PRAKARSA sebagai think-and-do tank: pengetahuan tidak berhenti pada publikasi, melainkan diterjemahkan ke dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kapasitas aktor negara dalam merespons persoalan kesejahteraan sosial secara lebih reflektif dan berbasis bukti.

Selain rangkaian pelatihan untuk Kemensos, The PRAKARSA juga dipercaya menjadi fasilitator dalam program penguatan kapasitas advokasi

The most prominent element of the business unit's 2025 portfolio was the series of In-House Trainings on Policy Analysis and Policy Brief Writing, delivered together with LPPSP/Puska Kesos FISIP Universitas Indonesia for the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, with support from Oxfam in Indonesia. The training was delivered in three separate batches and targeted functional officials: social workers and social welfare extension officers from various BBPPKS regional centres and Ministry of Social Affairs service units. Batch 1, in Depok on 6–8 October 2025, involved 30 participants; Batch 2, on 28–31 October 2025, extended the reach to the Banjarmasin and Yogyakarta regions; and Batch 3, on 16–20 November 2025 in South Jakarta, involved 33 participants from the Makassar and Papua regions. Through this work, The PRAKARSA is present not only as a research institution producing knowledge, but also as a partner in strengthening the capacity of the social welfare bureaucracy, helping to translate field experience into policy analysis that is more systematic, sharper, and actionable.

The substance of the training reflects The PRAKARSA's distinctive strength: connecting research, policy analysis, policy communication, and advocacy strategy in a single applied learning package. Participants were introduced not only to evidence-based policymaking but also to actor mapping, policy communication, tools such as the Mendelow Matrix and Social Network Analysis, and the practice of drafting policy briefs that set out a problem statement, policy options, and operational recommendations. This model of learning reinforces PRAKARSA's position as a think-and-do tank: knowledge does not stop at publication but is translated into learning processes that build the capacity of state actors to respond to social welfare problems more reflectively and on the basis of evidence.

Beyond the Ministry of Social Affairs training series, The PRAKARSA was also entrusted to facilitate a policy advocacy capacity-strengthening programme

kebijakan yang didukung Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia untuk staf lokal Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan dalam format basic dan intermediate, dan menegaskan bahwa kompetensi The PRAKARSA dalam menjembatani riset, advokasi, dan komunikasi kebijakan relevan tidak hanya bagi kementerian/lembaga Indonesia, tetapi juga bagi mitra pembangunan internasional.

Dalam pelatihan DFAT tersebut, materi yang dibawakan mencakup Advocacy Strategy Framework, Problem Tree Analysis, serta evidence-based policymaking dan advocacy. Dengan kombinasi alat analisis, kerangka advokasi, dan teknik komunikasi kebijakan, The PRAKARSA memperlihatkan kapasitasnya sebagai penyedia jasa pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga dirancang untuk membantu peserta menerjemahkan bukti ke dalam strategi intervensi dan pesan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Kehadiran klien seperti DFAT juga penting dari sisi positioning karena memperkuat kredibilitas organisasi di pasar jasa pelatihan kebijakan yang lebih profesional dan kompetitif.

Di luar segmen pemerintahan, PRAKARSA juga memperluas jangkauan layanan unit bisnis melalui kerja sama dengan Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS) pada 11 Desember 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 20 perwakilan YFAS, Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri, dan Serikat Pengemudi Online Indonesia, dengan fokus pada isu ketenagakerjaan dan perlindungan pengemudi online. Kegiatan ini menunjukkan bahwa modul dan pendekatan yang dikembangkan The PRAKARSA cukup lentur untuk digunakan tidak hanya pada birokrasi pemerintah, tetapi juga pada organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan kelompok pekerja platform yang membutuhkan kemampuan menyusun masukan kebijakan secara lebih persuasif. Dari perspektif outcome, layanan ini memperluas basis pengguna pengetahuan The PRAKARSA sekaligus memperkuat reputasi organisasi sebagai mitra penguatan advokasi berbasis bukti bagi kelompok rentan.

supported by Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) for locally engaged staff at the Australian Embassy in Jakarta. Delivered in basic and intermediate formats, the programme confirmed that The PRAKARSA's competence in bridging research, advocacy, and policy communication is relevant not only to Indonesian ministries and agencies but also to international development partners.

The DFAT training covered the Advocacy Strategy Framework, Problem Tree Analysis, and evidence-based policymaking and advocacy. Combining analytical tools, advocacy frameworks, and policy communication techniques, The PRAKARSA demonstrated its capacity as a learning services provider whose offer is not merely theoretical but designed to help participants translate evidence into intervention strategies and actionable policy messages. The presence of a client such as DFAT is also significant for positioning, strengthening the organisation's credibility in a more professional and competitive market for policy training services.

Beyond the government segment, PRAKARSA also extended the reach of its business unit through cooperation with the Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS) on 11 December 2025. The training brought together 20 representatives of YFAS, the Federation of Independent Trade Unions (F-GSBM), and the Indonesian Online Drivers Union (SePOI), focusing on employment issues and protections for online drivers. The activity demonstrates that the modules and approaches developed by The PRAKARSA are flexible enough to be used not only within government bureaucracy but also by civil society organisations, trade unions, and platform worker groups that need to make policy submissions more persuasively. From an outcome perspective, this service broadens the user base for The PRAKARSA's knowledge while strengthening the organisation's reputation as a partner in building evidence-based advocacy for vulnerable groups.

Secara kelembagaan, kegiatan unit bisnis pada 2025 menghasilkan sedikitnya tiga capaian penting. Pertama, ia membuka jalur diversifikasi pendapatan dan membangun landasan bagi kemandirian finansial yang lebih sehat pada periode Renstra berikutnya. Kedua, ia memperkuat brand organisasi di mata mitra sebagai penyedia layanan pelatihan kebijakan yang kredibel, praktis, dan berorientasi hasil. Ketiga, ia menyediakan ruang inkubasi bagi standarisasi modul, pengemasan pengetahuan, serta dokumentasi metode pembelajaran yang ke depan dapat dikembangkan menjadi katalog layanan, skema mentoring pascapelatihan, maupun paket kerja sama yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, kegiatan unit bisnis pada 2025 bukan sekadar tambahan aktivitas, melainkan embrio model keberlanjutan organisasi yang menghubungkan reputasi intelektual dengan peluang pembiayaan non-hibah.

Institutionally, the business unit's work in 2025 produced at least three important gains. First, it opened a route to income diversification and laid the groundwork for healthier financial self-reliance in the next Strategic Plan period. Second, it strengthened the organisation's brand among partners as a credible, practical, and results-oriented provider of policy training. Third, it provided an incubation space for standardising modules, packaging knowledge, and documenting learning methods that can in future be developed into a service catalogue, post-training mentoring schemes, or more structured cooperation packages. In short, the business unit's work in 2025 was not simply an additional activity but the seed of a sustainability model that connects intellectual reputation with non-grant financing opportunities.

Kolaborasi Multipihak

Multi-Stakeholder Collaboration



Kolaborasi adalah cara kerja utama The PRAKARSA, bukan pelengkap. Sejak awal, mengempangkan jejaring antar think tank, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta ditempatkan sebagai salah satu misi lembaga, sejalan dengan pilihan untuk bekerja melalui pendekatan multipihak bersama aktor pemerintah dan nonpemerintah. Pilihan ini bertumpu pada keyakinan bahwa perubahan kebijakan yang berkelanjutan tidak dihasilkan oleh satu lembaga, melainkan oleh ekosistem aktor yang mampu menerjemahkan bukti menjadi tindakan kebijakan di ranahnya masing-masing.

Collaboration is The PRAKARSA's principal way of working, not an add-on. From the outset, building networks among think tanks, civil society organisations, and the private sector has been one of the institution's missions, consistent with our choice to work through a multi-stakeholder approach alongside governmental and non-governmental actors. That choice rests on the conviction that durable policy change is not produced by a single institution, but by an ecosystem of actors able to translate evidence into policy action within their own domains.

Bagian ini memetakan siapa saja mitra The PRAKARSA sepanjang 2025 dan bagaimana komposisinya bergeser. Pada 2025, The PRAKARSA menjalankan program bersama beberapa mitra pendanaan:

This section maps The PRAKARSA's partners over 2025 and how that composition has shifted. In 2025, The PRAKARSA delivered programmes with the following funding partners:

Mitra
Partner

 Dukungan
Support

 Periode
Period

	Ford Foundation	Program BUILD (Building Institutions and Networks) BUILD Programme (Building Institutions and Networks)	2021 - 2025 2021 - 2025
	Oxfam Great Britain in Indonesia	Fair Finance Asia (FFA) Fase 2 Fair Finance Asia (FFA) Phase 2	2023 - 2025 2023 - 2025
	Oxfam Novib & Regional Platform Asia	Fair for All (F4A) Fair for All (F4A)	2021 - 2025 2021 - 2025
	PT Oxford Policy Management Indonesia (FCDO UK)	Low Carbon Development Initiative (LCDI) Low Carbon Development Initiative (LCDI)	Berlanjut pada 2025 Berlanjut pada 2025
	Open Society Foundations (OSF)	Penguatan kebijakan industri hijau melalui insentif fiskal dan nonfiskal untuk transisi hijau dan green jobs Strengthening green industrial policy through fiscal and non-fiscal incentives for the green transition and green jobs	2025 - 2027 2025 - 2027
	Climate and Land Use Alliance (CLUA)	Enabling environment ekonomi restoratif berbasis inisiatif komunitas Enabling environment for a community-led restorative economy	2025 - 2026 2025 - 2026
	Rainforest Action Network (RAN)/Forest Finance	Dukungan bagi Koalisi ResponsiBank Indonesia Support for the ResponsiBank Indonesia Coalition	2025 2025
	Cooper/Smith	Dokumentasi pengembangan dan tantangan ekosistem kesehatan digital SATUSEHAT Documenting the development and challenges of the SATUSEHAT digital health ecosystem	2024 - 2025 2024 - 2025
	Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)	Tambahan pendanaan bagi penelitian ekonomi restoratif Additional funding for restorative economy research	2025 2025

Komposisi ini menandai dua pergeseran. Pertama, masuknya OSF, CLUA, RAN, dan LTKL memperluas basis pendanaan sekaligus membuka dua bidang kerja baru, yaitu kebijakan industri hijau dan ekonomi restoratif. Kedua, sejumlah kemitraan besar yang menopang organisasi selama periode Renstra 2021-2025 memasuki tahap akhir, termasuk BUILD dari Ford Foundation, F4A, dan FFA Fase 2, serta berakhirnya dukungan KONEKSI (DFAT/Cowater), Alliance Funds, dan FES Indonesia pada 2024. Konsolidasi mitra pendanaan karenanya menjadi salah satu agenda utama menuju fase life after BUILD.

This composition reflects two shifts. First, the entry of OSF, CLUA, RAN, and LTKL broadens the funding base while opening two new areas of work: green industrial policy and the restorative economy. Second, a number of major partnerships that sustained the organisation through the 2021-2025 Strategic Plan period are reaching their conclusion — including BUILD from the Ford Foundation, F4A, and FFA Phase 2 — following the end of support from KONEKSI (DFAT/Cowater), Alliance Funds, and FES Indonesia in 2024. Consolidating our funding partnerships is therefore one of the central agendas as we move into the "life after BUILD" phase.





Refleksi 2025

2025 Reflection

Tahun 2025 menghadirkan beragam tantangan bagi The PRAKARSA, mulai dari penguatan SDM dan keberlanjutan pendanaan hingga regenerasi kepemimpinan. Meski demikian, berbagai pembelajaran menjadi pijakan untuk memperkuat kelembagaan dan menjaga dampak riset serta advokasi kebijakan.

2025 brought a range of challenges for The PRAKARSA, from strengthening human resources and ensuring funding sustainability to leadership regeneration. Nevertheless, the lessons learned throughout the year have provided a foundation for strengthening the organization and sustaining the impact of research and policy advocacy.



Refleksi di Tahun 2025

Reflection on 2025



Tantangan Challenges

Sepanjang 2025, The PRAKARSA menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dinamika eksternal maupun dari kebutuhan penguatan internal. Tantangan-tantangan ini konsisten dengan temuan tiga asesmen kelembagaan yang dilakukan pada periode Renstra 2021-2025 yakni Organizational Mapping Tool (OMT) 2023, Asesmen Kelembagaan dan Asesmen Keuangan 2025 yang secara garis besar menyoroti prioritas perbaikan pada empat dimensi kelembagaan, yakni keselarasan, kewenangan, kapasitas, dan sumber daya, serta pada satu isu lintas dimensi, yaitu transisi generasi dan suksesi kepemimpinan.

Over the course of 2025, The PRAKARSA faced a set of interconnected challenges arising both from external dynamics and from internal strengthening needs. These challenges are consistent with the findings of three institutional assessments conducted during the 2021-2025 Strategic Plan period, the Organizational Mapping Tool (OMT) 2023, and the Institutional Assessment and Financial Assessment of 2025 which broadly identified priorities for improvement across four institutional dimensions (alignment, authority, capacity, and resources), together with one cross-cutting issue: generational transition and leadership succession



Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Capacity and Human Resource Development

Pada aspek SDM, tantangan utama terletak pada peningkatan retensi melalui penguatan jenjang karier dan pengembangan kapasitas, serta penyempurnaan sistem insentif dan evaluasi kinerja agar lebih transparan, terukur, dan berbasis kontribusi. Fungsi SDM yang selama ini lebih banyak menjalankan peran administratif perlu diperkuat menjadi lebih strategis, termasuk dalam pengelolaan beban kerja secara objektif melalui alat ukur yang terstandar. Organisasi juga memerlukan pendalaman *breadth and depth of expertise* pada bidang-bidang yang ditekuni agar mampu memenuhi ekspektasi pengguna hasil kerja yang terus meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada individu tertentu.

On the people's side, the principal challenge lies in improving retention through stronger career pathways and capacity development, and in refining incentive and performance evaluation systems so that they are more transparent, measurable, and contribution-based. The HR function, which to date has been largely administrative, needs to become more strategic, including in managing workload objectively through standardised measurement tools. The organisation also needs to deepen the breadth and depth of expertise in its areas of work in order to meet the rising expectations of those who use our outputs, while reducing dependence on particular individuals.





Sumber Daya dan Keberlanjutan Pendanaan Resources and Funding Sustainability



Di tengah kontraksi pendanaan pembangunan global, organisasi dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan pendanaan dari donor dan mitra eksisting, membuka sumber baru yang sejalan dengan arah strategis, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk isu prioritas, serta mengelolakeuangansecaralebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Meskipun posisi keuangan lembaga relatif aman yang ditandai dengan pertumbuhan dana tidak terikat. Penurunan jumlah lembaga donor selama periode Renstra menegaskan risiko konsentrasi pendanaan yang perlu dimitigasi, terutama ketika kebijakan donor dapat berubah sewaktu-waktu. Tantangan yang berkaitan adalah modernisasi sistem kerja dan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, yang masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.

Amid the contraction in global development funding, the organisation faces the need to sustain funding from existing donors and partners, open new sources aligned with its strategic direction, optimise budget allocation for priority issues, and manage finances more effectively, efficiently, and punctually. Although the institution's financial position is relatively secure as indicated by growth in unrestricted funds the decline in the number of donor institutions over the Strategic Plan period highlights a funding concentration risk that must be mitigated, particularly given that donor policy can change at short notice. A related challenge is the modernisation of working systems and the use of technology and digitalisation to improve efficiency and accountability, where room for optimisation remains.



Kolaborasi, Jejaring, dan Positioning Advokasi Collaboration, Networks, and Advocacy Positioning

Tantangan berikutnya adalah memaksimalkan potensi jejaring nasional dan internasional untuk mendukung riset dan advokasi, serta memperluas engagement dengan pemangku kepentingan yang selama ini belum banyak dijangkau, termasuk sektor swasta dan filantropi domestik. Di tengah perubahan lanskap kebijakan pasca-transisi pemerintahan, organisasi perlu menyesuaikan strategi dan narasi advokasinya sambil menjaga konsistensi posisi dan visibilitas kelembagaan. Strategi

A further challenge is maximising the potential of national and international networks in support of research and advocacy, and broadening engagement with stakeholders we have so far reached less extensively, including the private sector and domestic philanthropy. Amid a policy landscape reshaped by the change of administration, the organisation needs to adapt its advocacy strategy and narrative while maintaining consistency of position and institutional visibility. A positioning



positioning yang dikembangkan secara kolektif antar-divisi menjadi kunci agar upaya advokasi tetap terpadu dan berdampak.

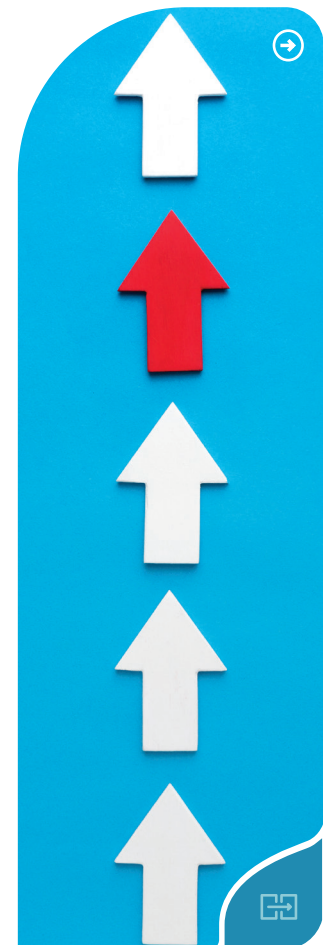
strategy developed collectively across divisions is key to keeping advocacy efforts coherent and impactful.



Transisi Generasi Dan Suksesi Kepemimpinan Generational Transition and Leadership Succession

Kesadaran akan pentingnya regenerasi telah tumbuh, namun mekanisme kaderisasi dan perencanaan suksesi yang terstruktur masih perlu dibangun lebih lanjut. Pergeseran komposisi tenaga kerja menuju generasi muda membawa ekspektasi baru terhadap pola kerja yang lebih fleksibel, transparan, dan partisipatif. Hal ini merupakan sesuatu yang menuntut adaptasi sistem nilai, pola komunikasi, dan struktur insentif. Tanpa program penghubung antar-generasi serta sistem dokumentasi dan manajemen pengetahuan yang memadai, terdapat risiko melemahnya memori institusional dan kesinambungan kepemimpinan ketika terjadi peralihan peran. Transisi kepemimpinan yang berlangsung pada 2025 karenanya perlu diikuti penguatan kelembagaan yang menyeluruh agar perubahan bersifat transformasional, bukan sekadar administratif.

. Awareness of the importance of renewal has grown, but structured mechanisms for developing successors and planning succession still need further development. The shift in workforce composition towards younger generations brings new expectations of more flexible, transparent, and participatory ways of working something that demands adaptation in value systems, communication patterns, and incentive structures. Without programmes that bridge generations and adequate documentation and knowledge management systems, there is a risk of weakening institutional memory and leadership continuity when roles change hands. The leadership transition that took place in 2025 therefore needs to be followed by comprehensive institutional strengthening so that the change is transformational rather than merely administrative.



Pembelajaran

Lessons Learned



Rangkaian tantangan di atas melahirkan sejumlah pembelajaran yang menjadi landasan konstruktif bagi transformasi kelembagaan ke depan. Pembelajaran ini penting untuk dirawat sebagai memori organisasi agar setiap langkah perbaikan berpijak pada bukti dan pengalaman, bukan sekadar asumsi.

The challenges set out above have generated a number of lessons that provide a constructive foundation for institutional transformation going forward. These lessons are worth preserving as organisational memory, so that each step towards improvement rests on evidence and experience rather than assumption.



Refleksi Terbuka sebagai Kekuatan Kelembagaan Open Reflection as An Institutional Strength

Keputusan untuk melakukan asesmen kelembagaan dan keuangan secara terbuka dan objektif termasuk membuka ruang bagi masukan lintas generasi mencerminkan kematangan organisasi. Budaya reflektif ini adalah aset yang nilainya akan optimal apabila hasil refleksi ditindaklanjuti secara nyata dan konsisten, bukan berhenti pada dokumen. The PRAKARSA menjadi salah satu lembaga yang memiliki keberanian untuk bercermin secara jujur pada praktik kesehariannya.

The decision to conduct institutional and financial assessments openly and objectively, including creating space for input across generations reflects organisational maturity. This reflective culture is an asset whose value will be fully realised only if the findings are acted on concretely and consistently, rather than stopping at the document stage. The PRAKARSA is among those institutions willing to look honestly at its own everyday practice.



Pemisahan Fungsi yang Terintegrasi Separation of functions within an integrated structure

Pembelajaran dari praktik baik lembaga sejenis menegaskan bahwa pemisahan fungsi riset dan advokasi yang tegas dapat mendorong kejelasan peran dan efisiensi sepanjang disertai alur koordinasi yang tetap terpadu. Penataan struktur berbasis fungsi "think" dan "do" tank karenanya menjadi salah satu prioritas perbaikan bagi organisasi.

Lessons from good practice at comparable institutions confirm that a clear separation between research and advocacy functions can bring greater role clarity and efficiency, provided it is accompanied by coordination flows that remain integrated. Restructuring around the "think" and "do" tank functions is therefore one of the organisation's priorities for improvement.



Pengelolaan Transisi Generasi secara Proaktif Managing Generational Transition Proactively

Perbandingan dengan lembaga lain memperlihatkan bahwa pendekatan proaktif dalam mengelola perbedaan generasi lebih efektif daripada pendekatan reaktif. Forum komunikasi lintas generasi, program mentoring dua arah, dan mekanisme umpan balik yang aman dan formal terbukti membantu membangun kohesi. Pelajaran pentingnya adalah bahwa perbedaan generasi bukan sekadar isu manajerial, melainkan transformasi kultural yang perlu dikelola dengan sengaja dan berkelanjutan.

Comparison with other institutions shows that a proactive approach to managing generational difference is more effective than a reactive one. Cross-generational communication forums, two-way mentoring programmes, and safe, formal feedback mechanisms have proved helpful in building cohesion. The key lesson is that generational difference is not merely a managerial issue but a cultural transformation that must be managed deliberately and continuously.





Suksesi dan Manajemen Pengetahuan yang Terdokumentasi

Documented Succession and Knowledge Management

Semakin besar dan kompleks sebuah organisasi, semakin krusial rencana suksesi yang konkret dan sistem manajemen pengetahuan yang terdokumentasi serta mudah diakses. Skala staf yang besar tidak dengan sendirinya menjamin sistem yang matang, kematangan justru ditentukan oleh kekuatan dokumentasi, tata kelola, dan proses, sebuah pengingat agar penguatan sistem internal tidak ditunda hingga kebutuhan menjadi mendesak.

The larger and more complex an organisation becomes, the more crucial concrete succession planning and documented, accessible knowledge management systems become. A large staff complement does not in itself guarantee a mature system; maturity is determined instead by the strength of documentation, governance, and process, a reminder not to defer the strengthening of internal systems until the need becomes urgent.



Sistem Pengukuran dan Komunikasi Formal sebagai Fondasi

Measurement Systems and Formal Communication as Foundations

Pengukuran beban kerja yang objektif, evaluasi kinerja yang baku, serta mekanisme komunikasi internal yang formal dan konsisten merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketersediaan alat ukur memungkinkan redistribusi tugas dan perencanaan kebutuhan SDM yang lebih adil dan terinformasi, sekaligus mengurangi risiko beban kerja berlebih pada segelintir individu.

Objective workload measurement, standardised performance evaluation, and formal and consistent internal communication mechanisms are the foundations of sustainable growth. Having measurement tools in place makes it possible to redistribute tasks and plan human resource needs more fairly and with better information, while reducing the risk of excessive workload falling on a small number of individuals.



Kehati-Hatian Finansial sebagai Landasan Transformasi

Financial Prudence as A Foundation for Transformation

Posisi keuangan yang prudent dan dana cadangan yang tumbuh memberi organisasi ruang dan waktu untuk melakukan pembenahan secara terencana, alih-alih reaktif. Di tengah lanskap pendanaan yang menurun, kehati-hatian ini justru menjadi modal untuk berani berinvestasi pada penguatan kelembagaan, diversifikasi sumber daya, dan langkah menuju kemandirian finansial termasuk melalui pengembangan layanan berbasis pengetahuan dan sumber pendapatan non-hibah.

A prudent financial position and growing reserves give the organisation the space and time to make improvements in a planned rather than reactive way. Amid a declining funding landscape, this prudence becomes the capital that allows us to invest with confidence in institutional strengthening, resource diversification, and steps towards financial self-reliance, including through the development of knowledge-based services and non-grant income streams.

Secara keseluruhan, tantangan tahun 2025 memperlihatkan bahwa penguatan yang dibutuhkan bukan bersifat parsial, melainkan sistemik yang mencakup struktur, tata kelola, sumber daya

Taken as a whole, the challenges of 2025 show that the strengthening required is not partial but systemic, encompassing structure, governance, human resources, financial resources, and leadership

manusia, sumber daya finansial, dan kesinambungan kepemimpinan secara terhubung. Pembelajaran yang dipetik telah diterjemahkan menjadi agenda konsolidasi kelembagaan dan menjadi bahan masukan utama bagi penyusunan Renstra 2026-2030. Dengan modal berupa sistem keuangan yang stabil, komitmen staf yang kuat terhadap misi sosial, jejaring mitra yang luas, serta budaya reflektif yang terbuka, The PRAKARSA berada pada posisi yang baik untuk menjaga dan memperluas dampak yang telah dibangun secara berkelanjutan.

continuity as interconnected concerns. The lessons drawn have been translated into an institutional consolidation agenda and have served as key input into the development of the 2026-2030 Strategic Plan. With the assets of a stable financial system, staff strongly committed to our social mission, a broad partner network, and an open, reflective culture, The PRAKARSA is well placed to sustain and expand the impact it has built.





Transparansi dan Akuntabilitas

Transparency and Accountability

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, The PRAKARSA secara konsisten melakukan audit atas laporan keuangan organisasi dan proyek oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia serta ketentuan donor.

To ensure transparency and accountability, The PRAKARSA consistently conducts audits of both organizational and project financial statements by an independent Public Accounting Firm (KAP), in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and donor requirements.

Ringkasan Kinerja Keuangan The PRAKARSA

Summary of The PRAKARSA's Financial Performance



The PRAKARSA berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, kami secara konsisten melaksanakan audit atas laporan keuangan organisasi maupun laporan keuangan proyek.

Audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia serta ketentuan yang dipersyaratkan oleh masing-masing donor. Proses ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi standar yang berlaku.

The PRAKARSA is committed to transparent and accountable financial management. As part of that commitment, we consistently carry out audits of both our organisational financial statements and our project financial reports.

Audits are conducted by independent public accounting firms in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and the requirements set by each donor. This process forms part of our efforts to ensure that funds are managed appropriately, can be properly accounted for, and meet applicable standards.

Tahun 2024 Year 2024

- 01** Audit Organisasi Tahun Buku 2023
 Organisational audit, financial 2023
- 02** Audit proyek FFA 2023 – Oxfam Indonesia & The PRAKARSA
 FFA project audit 2023 – Oxfam Indonesia & The PRAKARSA
- 03** Finalisasi SOP Keuangan
 Finalisation of financial standard operating procedures
- 04** Sosialisasi Coretax oleh DJP
 CoreTax socialisation by the Directorate General of Taxes
- 05** Financial Management Training: Taxation & Capacity Building – Oxfam Indonesia
 Financial Management Training: Taxation & Capacity Building – Oxfam Indonesia

Tahun 2025 Year 2025

- 01** Audit Organisasi Tahun Buku 2024
 Organisational audit, financial 2024
- 02** Audit Proyek FFA_Jan – Des 2024 – Oxfam Indonesia & The PRAKARSA
 FFA project audit, January–December 2024 – Oxfam Indonesia & The PRAKARSA
- 03** Audit Proyek FFA_Jan – Des 2024 – Oxfam Indonesia & The PRAKARSA
 FFA project audit, January–June 2025 – Oxfam Indonesia & The PRAKARS
- 04** Pelatihan Keuangan Strategis untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) – Re-Search
 Strategic Financial Management Training for Civil Society Organisations – ReSearch
- 05** Intensive Workshop Pengantar Coretax untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Nirlaba
 Intensive Workshop: Introduction to CoreTax for Civil Society and Non-Profit Organisations

Hasil Audit Tahun 2025

Audit Result for 2025



Laporan keuangan terlampir menyajikan secara “wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan Perkumpulan The PRAKARSA tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilakukan oleh KAP. Syarief Basir & Rekan

The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perkumpulan The PRAKARSA as at 31 December 2025, together with its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The audit was conducted by KAP Syarief Basir & Rekan.





Syarief Basir & Rekan

Registered Public Accountants
Business License No. KEP-086/KM.6/2003

Graha SBR
Jl. Tanjung Barat Raya No. 146
Jakarta 12530 - Indonesia
T : (62-21) 782 0681-82
F : (62-21) 782 0683
E : info@sbr-cpa.co.id
W : sbr-cpa.co.id

Nomor / Number : 00064/2.0536/AU.1/11/1116-3/1/IX/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KEPADA BADAN PENGURUS PERKUMPULAN PRAKARSA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perkumpulan Prakarsa, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Prakarsa tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perkumpulan Prakarsa sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE BOARD OF MANAGEMENT PERKUMPULAN PRAKARSA

Opinion

We have audited the financial statements of Perkumpulan Prakarsa, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statements of comprehensive income, cash flows and changes in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perkumpulan Prakarsa as at December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Perkumpulan Prakarsa in accordance with the Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants as applicable to audits of financial statements of public interest entities in Indonesia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As Of December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	13.544.136.731	3b,4	11.843.282.139	Cash and cash equivalents
Piutang	58.051.162	5	709.651.037	Accounts receivable
Uang muka	-	6	7.340.690	Advances
Pajak dibayar dimuka	10.408.278	10a	2.041.234	Prepaid tax
TOTAL ASET LANCAR	13.612.596.171		12.562.315.100	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	13.877.169	3f,7	17.773.665	Fixed assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	13.877.169		17.773.665	TOTAL NONCURRENT ASSETS
TOTAL ASET	13.626.473.340		12.580.088.765	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang program	294.283.496	8	1.137.690.508	Project payable
Biaya yang masih harus dibayar	262.800.014	9	89.971.617	Accrued expenses
Utang pajak	1.490.924	10b	942.251	Tax payable
TOTAL LIABILITAS LANCAR	558.574.434		1.228.604.376	TOTAL CURRENT LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto dengan pembatasan	5.872.100.682	3c	5.697.726.333	With restrictions net assets
Aset neto tanpa pembatasan	7.196.246.224	3c	5.653.758.056	Without restrictions net assets
TOTAL ASET NETO	13.068.346.906		11.351.484.389	TOTAL NET ASSETS
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	13.626.473.340		12.580.088.765	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Dengan pembatasan	9.836.893.444	3d,11	10.682.396.336	With restrictions
Tanpa pembatasan	3.294.668.229	3d,11	1.593.790.298	Without restrictions
TOTAL PENDAPATAN	13.131.561.673		12.276.186.634	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban program dengan pembatasan	9.662.519.095	3d,12a	9.255.194.581	Program expenses with restrictions
Beban program tanpa pembatasan	1.752.180.061	3d,12b	-	Program expenses without restrictions
TOTAL BIAYA	11.414.699.156		9.255.194.581	TOTAL EXPENSES
SURPLUS	1.716.862.517		3.020.992.053	SURPLUS
Pendapatan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF	1.716.862.517		3.020.992.053	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME



PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

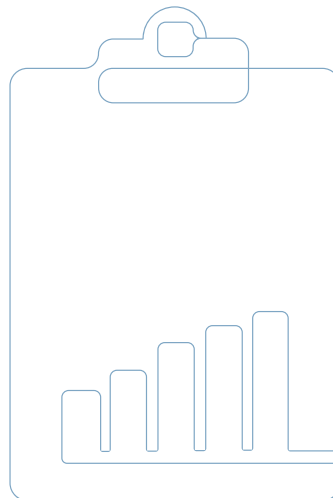
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

For The Year Ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			<i>Net Assets with Restrictions from Donor:</i>
Saldo awal	5.697.726.333	3.158.865.096	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian aset neto	-	(22.570.354)	<i>Net asset adjustments</i>
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	9.836.893.444	10.682.396.336	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(9.662.519.095)	(8.120.964.745)	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	5.872.100.682	5.697.726.333	<i>Ending balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah	5.872.100.682	5.697.726.333	Total
Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			<i>Net Assets Without Restrictions from Donor:</i>
Saldo awal	5.653.758.056	5.194.197.594	<i>Beginning balance</i>
Pendapatan Komprehensif tahun berjalan	(8.120.030.927)	(7.661.404.283)	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	9.662.519.095	8.120.964.745	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	7.196.246.224	5.653.758.056	<i>Ending Balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah	7.196.246.224	5.653.758.056	Total
Jumlah Aset Neto	13.068.346.906	11.351.484.389	Total Net Assets



PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Year Ended

December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Perubahan dalam aset neto	1.716.862.517	3.020.992.053	Changing on net assets
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas bersih:			Adjustments to reconcile changes in net assets to net cash:
Penyusutan	3.896.496	3.896.495	Depreciation
Koreksi aset bersih		(22.570.354)	Correction net asset
PERUBAHAN ASET DAN LIABILITAS OPERASI			CHANGE IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES
Piutang	651.599.875	(383.951.344)	Account receivables
Uang muka	7.340.690	223.394.486	Advance
Pajak diterima dimuka	(8.367.044)	(2.041.234)	Prepaid tax
Biaya yang masih harus dibayar	172.828.398	(310.653.042)	Accrued expenses
Utang lain-lain	(843.855.012)	470.189.646	Other payables
Utang pajak	548.673	(23.303.845)	Taxes payables
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.700.854.592	2.975.952.861	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	-	(9.999.000)	Acquisition properties, plants and equipments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	-	(9.999.000)	Net cash flows used in investing activities
Kenaikan kas dan setara kas	1.700.854.592	2.965.953.861	Increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	11.843.282.139	8.877.328.278	Cash and cash equivalent at beginning of the years
Kas dan setara kas akhir tahun	13.544.136.731	11.843.282.139	Cash and cash equivalent at the end of the years

Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak

Compliance with Tax Regulations



Kepatuhan terhadap peraturan pajak merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Kepatuhan ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara tepat waktu, tetapi juga mencerminkan integritas serta tanggung jawab kepada negara.

Dalam praktiknya, kepatuhan pajak mencakup pemahaman yang memadai atas regulasi yang berlaku, penerapan sistem pencatatan keuangan yang akurat, serta pengendalian internal yang efektif untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar. Sejak awal tahun 2025, pemerintah mulai memberlakukan sistem Coretax untuk proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak badan. Namun, untuk pelaporan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2024, The PRAKARSA masih menggunakan DJP Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi penuh penggunaan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan Badan direncanakan mulai tahun 2026.

Lebih dari sekadar menghindari sanksi administratif maupun denda, kepatuhan pajak juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kredibilitas lembaga di mata donor, mitra kerja, dan regulator. Hal ini menjadi semakin penting, khususnya bagi The PRAKARSA sebagai organisasi yang mengelola dana publik dan hibah, di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan utama.

Dengan demikian, membangun budaya kepatuhan pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi keuangan, melainkan bagian integral dari tata kelola organisasi secara keseluruhan. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan internal yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen manajemen untuk memastikan seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Compliance with tax regulations is one of the pillars of organisational sustainability. Compliance is understood not merely as an administrative obligation to calculate, remit, and report taxes on time, but as a reflection of integrity and responsibility towards the state.

In practice, tax compliance requires an adequate understanding of applicable regulations, accurate financial record-keeping systems, and effective internal controls to ensure that all tax obligations are properly met. From the beginning of 2025, the government began implementing the CoreTax system for calculating, remitting, and reporting corporate tax. However, for the corporate annual tax return for the 2024 tax year, The PRAKARSA continued to use DJP Online in accordance with the applicable rules. Full implementation of CoreTax for corporate annual tax returns is planned from 2026.

Beyond avoiding administrative sanctions and penalties, tax compliance also adds value by enhancing the institution's credibility in the eyes of donors, partners, and regulators. This is especially important for The PRAKARSA as an organisation managing public funds and grants, where transparency and accountability are fundamental expectations.

Building a culture of tax compliance is therefore not the responsibility of the finance function alone, but an integral part of the organisation's overall governance. This effort needs to be supported by clear internal policies, capacity development, and management's commitment to ensuring that all financial activity is conducted in accordance with applicable tax regulations.



Rencana dan Inisiatif Tahun 2026

Plans and Initiatives for 2026

Memasuki tahun 2026, The PRAKARSA berfokus pada penguatan program dan riset strategis sekaligus konsolidasi kelembagaan menuju Renstra 2026–2030. Melalui penguatan advokasi, diversifikasi pendanaan, pengembangan SDM, dan tata kelola yang adaptif, kami mempersiapkan fondasi organisasi yang lebih mandiri, agile, dan berkelanjutan.

As we enter 2026, The PRAKARSA is focusing on strengthening strategic programmes and research while consolidating the institution toward the 2026–2030 Strategic Plan. Through stronger advocacy, diversified funding, human resource development, and adaptive governance, we are laying the foundation for a more agile, independent, and sustainable organization.

Rencana dan Inisiatif The PRAKARSA di Tahun 2026

Plans and Initiatives for 2026



Rencana kerja 2026 diarahkan pada dua orientasi besar yang saling menopang yakni penguatan program dan riset pada isu-isu strategis, dan konsolidasi kelembagaan untuk memasuki fase Renstra 2026–2030. Dengan demikian, 2026 diposisikan sebagai tahun implementasi sekaligus penataan fondasi.

Pada ranah program, lembaga akan melanjutkan konsolidasi dan pendalaman *core focal concerns* di bidang keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis, serta melakukan diversifikasi terukur ke bidang-bidang terkait. Pada dimensi advokasi global, organisasi akan memusatkan sumber daya pada arena yang paling reseptif terutama negosiasi UN Tax Convention dan pemantauan aksesi Indonesia ke OECD dengan memosisikan diri sebagai penasihat teknis bagi kepentingan Indonesia dan Global South, dan mempertahankan garis dasar komitmen pada forum-forum regional, penguatan variasi metode riset, perluasan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset menjadi bagian dari upaya meningkatkan academic rigour dan branding think tank.

Pada aspek konsolidasi kelembagaan, agenda 2026 mencakup penyusunan dan operasionalisasi Renstra 2026–2030 termasuk penyesuaian struktur organisasi agar lebih agile dan adaptif,

Our 2026 work plan is directed towards two mutually reinforcing orientations: strengthening programmes and research on strategic issues, and consolidating the institution as we enter the 2026–2030 Strategic Plan period. 2026 is therefore positioned as a year of implementation and of foundation-building.

On the programme side, the institution will continue to consolidate and deepen its core focal concerns in social, economic, and ecological justice, while diversifying in measured ways into related fields. In global advocacy, the organisation will concentrate its resources on the most receptive arenas particularly the UN Tax Convention negotiations and monitoring of Indonesia's OECD accession positioning itself as a technical adviser on the interests of Indonesia and the Global South, while maintaining baseline commitments in regional forums. Strengthening the range of research methods and expanding cooperation with universities and research institutions form part of efforts to enhance academic rigour and think tank branding.

On institutional consolidation, the 2026 agenda includes the development and operationalisation of the 2026–2030 Strategic Plan, including adjustments to the organisational structure to make it more agile and adaptive,



penguatan fungsi advokasi/engagement, dan penguatan fungsi komunikasi, serta persiapan fase life after BUILD. Penguatan tata kelola keuangan dan strategi penggalangan dana ditempuh melalui pengelolaan keuangan non-profit yang prudent, diversifikasi pendanaan, investasi strategis dana cadangan, dan penambahan proyek baru agar skenario keuangan melampaui *cost recovery*. Pembentukan entitas usaha (PT) dan perluasan jenis layanan akan memperkuat kemandirian finansial yang berkelanjutan.

Dari segi SDM dan tata kelola internal, lembaga juga akan memperkuat pengembangan sumber daya manusia dengan sistem remunerasi, meritokrasi, dan capacity building, serta forum berbagi pengetahuan internal. Penguatan tata kelola melalui penyusunan kelengkapan berbagai SOP, termasuk mekanisme whistleblower dan penanganan pengaduan.

strengthening the advocacy and engagement function, strengthening the communications function, and preparing for the "life after BUILD" phase. Financial governance and fundraising strategy will be strengthened through prudent non-profit financial management, funding diversification, strategic investment of reserves, and the addition of new projects so that the financial outlook moves beyond cost recovery. The establishment of a business entity (PT) and the expansion of our service offering will strengthen sustainable financial self-reliance.

On human resources and internal governance, the institution will also strengthen staff development through remuneration systems, meritocracy, and capacity building, alongside internal knowledge-sharing forums. Governance will be strengthened through the development of a full set of standard operating procedures, including whistleblowing and complaints-handling



Penutup

Closing

Tahun 2025 menjadi pijakan penting bagi The PRAKARSA dalam menjaga kesinambungan kerja, memperluas isu strategis, dan memperkuat fondasi kelembagaan menuju organisasi yang semakin mandiri, adaptif, dan berpengaruh.

2025 marked an important milestone for The PRAKARSA in sustaining its core work, expanding into strategic issues, and strengthening its institutional foundation toward becoming an increasingly independent, adaptive, and influential organization.

Ringkasan Pencapaian Utama Tahun 2025

Summary of Key Achievements in 2025

Secara keseluruhan, tahun 2025 memperlihatkan bahwa The PRAKARSA berhasil menjaga kesinambungan kerja inti sekaligus memperluas spektrum isu strategis. Organisasi tetap relevan pada kebijakan sosial, memperkuat advokasi keadilan pajak dan tata kelola global, aktif dalam agenda transisi berkeadilan dan pembangunan rendah karbon, serta mulai menegaskan posisi pada green industrial policy dan restorative economy.

Ditingkat kelembagaan, penyegaran SDM, peningkatan kapasitas staf, penguatan sistem pengelolaan proyek, pertumbuhan media sosial tertentu, bertambahnya cadangan kelembagaan, dan pembukaan jalur donor baru merupakan fondasi penting untuk memasuki fase 2026-2030. Pada saat yang sama, tahun ini juga menunjukkan area yang masih perlu diperbaiki: retensi staf, kualitas deliverables, kemitraan dengan sektor swasta, dan efektivitas fundraising.

Overall, 2025 shows that The PRAKARSA succeeded in sustaining its core work while broadening its spectrum of strategic issues. The organisation remained relevant in social policy, strengthened its advocacy on tax justice and global governance, stayed active on the just transition and low-carbon development agendas, and began to establish a position on green industrial policy and the restorative economy.

Institutionally, the renewal of our people, improvements in staff capacity, stronger project management systems, growth on certain social media channels, increased institutional reserves, and the opening of new donor relationships form an important foundation for entering the 2026-2030 phase. At the same time, the year also revealed areas that still need attention: staff retention, the quality of deliverables, partnerships with the private sector, and the effectiveness of fundraising.



Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy



Ke depan, keberlanjutan The PRAKARSA akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk menerjemahkan pembelajaran 2025 ke dalam strategi yang lebih tajam. Renstra 2026-2030 perlu memperjelas prioritas isu, model pengaruh, mekanisme quality assurance, arsitektur kolaborasi, dan strategi pendanaan yang lebih berimbang antara hibah, layanan, dan bentuk pendapatan lain.

Strategi keberlanjutan juga perlu menempatkan komunikasi publik, penguatan brand, dan pengelolaan stakeholder sebagai fungsi inti organisasi, bukan semata fungsi pendukung. Dengan begitu, riset dan advokasi yang dilakukan The PRAKARSA dapat menghasilkan pengaruh yang lebih luas, lebih stabil, dan lebih terukur.

Looking ahead, The PRAKARSA's sustainability will depend heavily on the organisation's ability to translate the lessons of 2025 into a sharper strategy. The 2026-2030 Strategic Plan will need to clarify issue priorities, our model of influence, quality assurance mechanisms, the architecture of collaboration, and a funding strategy better balanced across grants, services, and other income streams.

The sustainability strategy also needs to treat public communication, brand strengthening, and stakeholder management as core organisational functions rather than merely support functions. In doing so, the research and advocacy that The PRAKARSA undertakes can generate influence that is broader, more stable, and more measurable.



Ungkapan Terima Kasih

Acknowledgements



Laporan Tahunan 2025 ini menegaskan bahwa The PRAKARSA terus bergerak, belajar, dan menyesuaikan diri di tengah perubahan konteks yang cepat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus, manajemen, staf, research associates, fellows, interns, para donor, mitra pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan seluruh jaringan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi, alat komunikasi kelembagaan, dan pijakan untuk menyusun langkah-langkah strategis berikutnya menuju organisasi yang semakin kokoh, relevan, dan berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

This 2025 Annual Report affirms that The PRAKARSA continues to move, learn, and adapt amid a rapidly changing context. We extend our thanks to our Governing Board, management, staff, research associates, fellows, and interns, and to our donors, government partners, civil society organisations, academics, the media, and the wider network that has been part of this journey.

We hope this report serves as a basis for evaluation, an instrument of institutional communication, and a foundation for the strategic steps ahead – towards an organisation that is ever more solid, relevant, and influential in the pursuit of socio-economic justice and wellbeing.







P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies





P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

☎ +62 21 7811 798

✉ perkumpulan@theprakarsa.org

📘 📺 📠 📧 The PRAKARSA

🎧 PRAKARSA Podcast

www.theprakarsa.org